



SALINAN

PROVINSI JAMBI
WALIKOTA JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- b. bahwa Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi sebagaimana di maksud pada pertimbangan huruf a, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 250);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atas peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang dimuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip.
6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
7. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
8. Tugas dan Fungsi adalah beban tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh instansi dan/atau pemerintah daerah yang dijabarkan atau dibagi habis oleh unit kerja dan/atau satuan kerja perangkat daerah menjadi fungsi-fungsi spesifik dan menjadi patokan dasar untuk melaksanakan kegiatan (program kerja).
9. Kegiatan adalah jenis-jenis aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan salah satu fungsi organisasi/instansi.
10. Pencipta Arsip adalah Pemerintah Kota Jambi sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. Mewujudkan tertib tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi arsip.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota Jambi ini meliputi Klasifikasi Arsip, Kode Klasifikasi Arsip, Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip.

BAB IV

KLASIFIKASI

Pasal 4

- (1) Klasifikasi arsip ditetapkan berdasarkan Arsip yang diciptakan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dikelompokkan ke dalam klasifikasi arsip berdasarkan:
 - a. Fungsi dan/atau Urusan; dan
 - b. Kegiatan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 5

- (1) Arsip yang diciptakan berdasarkan pengelompokkan fungsi dan/atau urusan dan kegiatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kode klasifikasi menggunakan kombinasi huruf dan angka.
 - b. Kode huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menggambarkan urusan.
 - c. Kode angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk fungsi dan kegiatan pada masing-masing urusan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Klasifikasi Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal, 15 Juni 2020

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada Tanggal, 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 29

| SURAT INI TELAH DITELITI DENGAN BAIK DAN CERMAT OLEH | |
|--|---|
| KABID Pengolahan Arsip TGL : 2020 | KADIS DKP Kota Jambi TGL : 2020 |
| <u>DESY PURLINAWATI, SH</u> NIP. 19681207 199412 2 003 | <u>ARZI EFENDI, SH</u> NIP. 19680425 199903 1 001 |

| |
|--|
| Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI |
| ttd |
| <u>AMIRULLAH, SH</u> NIP. 19650929 199602 1 001 |

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 Juni 2020
TENTANG : KLASIFIKASI ARSIP
PEMERINTAH DAERAH
KOTA JAMBI

Klasifikasi:

Fasilitatif

- KEU. Keuangan
- PEG. Kepegawaian
- PRC. Perencanaan
- HKM. Hukum
- ORG. Organisasi dan Ketatalaksanaan
- PLK. Perlengkapan/Peralatan/Kekayaan Daerah
- ARS. Kearsipan
- TUK. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
- HMS. Hubungan Masyarakat
- PPG. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
- DKL. Pendidikan dan Pelatihan
- PUS. Kepustakaan
- TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi
- WAS. Pengawasan

Substantif

- TN. Pertanian
- IN. Perindustrian
- DG. Perdagangan
- HB. Perhubungan
- PM. Penanaman Modal
- LH. Lingkungan Hidup
- PB. Penanggulangan Bencana
- KU. Koperasi dan UKM
- PK. Pendidikan dan Kebudayaan
- SS. Sosial
- KT. Ketenagakerjaan
- PD. Pemerintahan Daerah
- PS. Perpustakaan
- PP. Perencanaan Pembangunan
- PA. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- PW. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- KI. Komunikasi dan Informatika
- KS. Kesehatan
- KB. Kependudukan dan Keluarga Berencana
- HT. Kehutanan
- KA. Kearsipan
- PO. Pemuda dan Olahraga
- UU. Peraturan Perundang-Undangan

- KK. Keamanan dan Ketertiban
- PL. Pendidikan dan Pelatihan
- PG. Pengadaan
- PU. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

| SURAT INI TELAH DITELITI DENGAN BAIK DAN CERMAT OLEH | |
|--|---|
| KABID Pengolahan Arsip TGL : 5 Maret 2020 | KADIS DKP Kota Jambi TGL : 5 Maret 2020 |
| <u>DESY PURLINAWATI, SH</u> NIP. 19681207 199412 2 003 | <u>ARZI EFENDI, SH</u> NIP. 19680425 199903 1 001 |

| |
|--|
| Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI |
| ttd |
| <u>AMIRULLAH, SH</u> NIP. 19650929 199602 1 001 |

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 29 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 Juni 2020

TENTANG : KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH
DAERAH KOTA JAMBI

Kode Klasifikasi

KEU.

KEUANGAN

- KEU.00 A. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)
- KEU.00.00 1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
- a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas
 - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)
 - b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah
 - c. KUA beserta Nota Kesepakatannya
 - d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - e. Nota Kesepakatan PPA
 - f. Prioritas Plafon Anggaran
- KEU.00.01 2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
- a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
 - b. Dokumen RKA-SKPD
- KEU.00.02 3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD:
 - Nota Keuangan Pemerintah

- b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah
 - c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD
 - d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya
 - e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta Penjabarannya
 - f. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD
 - g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya
 - h. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD
- KEU.00.03 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
- a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan
 - 1) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Perubahan
 - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)
 - 2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah
 - 3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya
 - 4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
 - 5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan
 - 6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan
 - 1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah
 - 2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan

- c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan:
 - Nota Keuangan Pemerintah
 - Materi RAPBD
 - 2) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah
 - 3) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan
 - 4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya
 - 5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya
 - 6) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan
 - 7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya
 - 8) Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan

- | | |
|-----------|---|
| KEU.01 | B. PENYUSUNAN ANGGARAN |
| KEU.01.00 | 1. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan |
| KEU.01.01 | 2. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota |
| KEU.01.02 | 3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah |
| KEU.01.03 | 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) |
| KEU.02 | C. PELAKSANAAN ANGGARAN |
| KEU.02.00 | 1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS |
| KEU.02.01 | 2 Pendapatan |

a. Pendapatan Asli Daerah:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah
- 2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah, antara lain:
 - Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan
 - Pajak Parkir
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)
 - Pajak Kendaan Bermotor
- 3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- 4) Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain:
 - a) Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pelyanan
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
 - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - Retribusi Pelayanan Pasar
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- b) Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - Retribusi Tempat Pelelangan
 - Retribusi Terminal
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/ Villa
 - Retribusi Penyedotan Kakus
 - Retribusi Rumah Potong Hewan
 - Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - Retribusi Penyebrangan di Atas Air
 - Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c) Retribusi Perizinan Tertentu
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - Retribusi Izin Gangguan
 - Retribusi Izin Trayek
- d) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
- e) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- 5) Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat
- 6) Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
- 7) Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum

- 8) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
 - 9) Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank
- b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan
- 1) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak
 - 2) Dana Bagi Hasil untuk Kota
 - 3) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 4) Daerah yang tidak menerima DAU
 - 5) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah
- 1) Alokasi Dana Penyesuaian
 - 2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah
 - 3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi
 - 4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
 - 5) Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga
- d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
- e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
- f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- g. Dokumen Piutang Daerah
- h. Dokumen Pengelolaan Investasi

KEU.02.02

3. Belanja

- a. Dokumen Belanja Langsung
- Belanja Pegawai
 - Belanja Barang Jasa
 - Belanja Modal
- b. Dokumen Belanja Tidak Langsung
- Pegawai
 - Hibah

- Belanja Bagi Hasil
 - Subsidi
 - Bunga
 - Bantuan Sosial
 - Bantuan Keuangan
 - Belanja Tidak Terduga
- KEU.02.03 4. Pembiayaan Daerah
- a. Bukti Penerima Pembiayaan
 - SiLPA
 - Dana Cadangan
 - Dana Bergulir
 - Pinjaman Daerah
 - Pengalihan Piutang PBB-P2 menjadi PAD
 - b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan
 - Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir
 - Penyertaan Modal pada BUMD
 - Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD
 - Pengeluaran dari Dana Cadangan
 - Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM)
 - Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah
- KEU.02.04 5. Dokumen Penatausahaan Keuangan
- Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - Surat Permohonan Pembayaran (SPP)
 - Surat Perintah Membayar (SPM)
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- KEU.02.05 6. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
- Buku Kas Umum (BKU)
 - Buku Kas Pembantu (BKP)

- Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek
 - Rekening Koran Bank
 - Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi
 - Bukti Penyetoran Pajak
 - Register Penutupan Kas
 - Berita Acara Pemeriksaan
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK)
 - Laporan Pendapatan Negara
 - Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwulan/Semesteran
- KEU.02.06 7. Daftar Gaji
- KEU.02.07 8. Kartu Gaji
- KEU.02.08 9. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
- KEU.02.09 10. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari :
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Neraca
 - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- KEU.03 D. PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
- KEU.03.00 1. Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (*Blue Book*)
- KEU.03.01 2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (*Green Book*)
- KEU.03.02 3. Dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU), dan dokumen sejenisnya
- KEU.03.03 4. Dokumen *Loan Agreement* (PHLN) seperti : *Draft Agreement, Legal Opinion*, Surat Menyurat dengan Lender
- KEU.03.04 5. Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
- KEU.03.05 6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya :
- *Reimbursement*
 - *Direct Payment/Transfer Procedure*

- *Special Commitment/ L/C Opening*
 - *Special Account/Imprest Fund*
- KEU.03.06 7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (*Payment Advice*)
- KEU.03.07 8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
- KEU.03.08 9. *Replenishment* (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)
- KEU.03.09 10. *Staff Appraisal Report*
- KEU.03.10 11. *Report/Laporan* yang terdiri dari:
- *Progress Report*
 - *Monthly Report*
 - *Quarterly Report*
- KEU.03.11 12. Laporan Hutang Daerah :
- Laporan Pembayaran Hutang Daerah
 - Laporan Posisi Hutang Daerah
13. *Completion Report/Annual Report*
14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- KEU.04 E. PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
- KEU.04.00 1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan:
- Kuasa Pengguna Anggaran
 - Kuasa Pengguna Barang/Jasa
 - Pejabat Pembuat Komitmen
 - Pejabat Pembuat Daftar Gaji
 - Pejabat Penandatanganan SPM
 - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
 - Pengelola Barang

termasuk berita acara serah terima jabatan

- KEU.05 F. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)
- KEU.05.00 1. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- KEU.05.01 2. Dokumen Kebijakan Akuntansi
- KEU.05.02 3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
- KEU.05.03 4. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
- KEU.06 G. PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
- KEU.06.00 1. Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan
- KEU.06.01 2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :
- SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil
 - Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti pendukungnya a.l. : copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank
 - Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- KEU.06.02 3. Buku Rekening Bank
- KEU.06.03 4. Keputusan Pembukuan Rekening
- KEU.06.04 5. Pembukuan anggaran terdiri :
- Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan,
 - Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), Rekening Koran
- KEU.07 H. PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
- KEU.07.00 1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
- KEU.07.01 2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

- KEU.08 I. PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU
- KEU.08.00 1. Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD
- a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu
 - b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu
 - c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas
 - d. Berkas pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu
 - e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota
 - f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
 - g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada
 - h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
 - i. Nota persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
- KEU.09 J. PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU
1. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
 2. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
 3. Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro
 4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
 5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya

- KEU.10 K. PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU
- KEU.10.00 1. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
- KEU.10.01 2. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Kota, Panwasda dan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) PPK dan Panwas
- KEU.10.02 3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
- KEU.11 L. PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
- KEU.11.00 1. Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/kelurahan
- KEU.11.01 2. Program Kerja Pemerintah Desa/kelurahan :
- a. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa/kelurahan
 - b. Rencana Kerja Perangkat Desa/kelurahan
- KEU.11.02 3. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/kelurahan
- KEU.11.03 4. Bukti Pungutan Desa/kelurahan
- KEU.11.04 5. Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa/kelurahan :
- a. Peraturan Desa tentang Pembebasan Tanah Kas Desa/kelurahan
 - b. Pemohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa/kelurahan
 - c. Hasil persetujuan/rapat
 - d. Rekomendasi Walikota tentang persetujuan pembebasan tanah
 - f. Persetujuan Walikota tentang hasil musyawarah harga tanah kas Desa/kelurahan
 - g. Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa/kelurahan
 - h. Musyawarah tanah Hak Milik untuk dibeli menjadi pengganti
 - j. Rekomendasi Walikota tentang Persetujuan Pembebasan Tanah
 - k. Pelepasan Tanah Hak Milik menjadi Kas

Desa/kelurahan

- KEU.11.05 6. Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa/kelurahan
- a. Sewa Tanah Kas Desa tidak berubah fungsi
 - b. Sewa Tanah Kas Desa berubah fungsi
 - 1) Peraturan Desa/kelurahan tentang sewa tanah kas Desa/kelurahan
 - 2) Penawaran dari Penyewa
 - 3) Rekomendasi Walikota tentang ijin penyewaan tanah kas Desa/kelurahan
 - 4) Permohonan Ijin Gubernur
 - 5) Ijin Gubernur
- KEU.11.06 7. Dokumen Perubahan Peruntukkan Tanah Kas Desa/kelurahan
- a. Peraturan Desa/kelurahan tentang perubahan peruntukkan Tanah Kas Desa/kelurahan
 - b. Rekomendasi Walikota tentang persetujuan pembebasan tanah
 - c. Ijin tertulis Gubernur
- KEU.11.07 8. Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa/kelurahan dan Pamong/Kaur
- KEU.11.08 9. Lain-lain Pendapatan Asli Desa/kelurahan
- KEU.11.09 10. Pembukuan Kas Desa/kelurahan
- a. Buku Kas Umum
 - b. Buku Bantu Pengeluaran
- KEU.11.10 11. Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa/kelurahan
- KEU.11.11 12. Laporan Keuangan Kas Desa/kelurahan
- KEU.11.12 13. Pertanggungjawaban Kepala Desa/kelurahan (Laporan Keuangan Tahunan Desa/kelurahan)
- KEU.12 M. PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
- KEU.12.00 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
- KEU.12.01 2. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
- KEU.12.02 3. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional:

- a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
 - b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan)
 - c. Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP
- KEU.12.03 4. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah:
- a. Tuntutan Perbendaharaan
 - b. Tuntutan Ganti Rugi

**FASILITATIF
PEG.**

- | | |
|-----------|--|
| PEG.00 | I FUNGSI KEPEGAWAIAN |
| PEG.00.00 | A. Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik |
| PEG.00.01 | 1 Penyusunan kebijakan |
| PEG.00.02 | 2 Perumusan kebijakan |
| PEG.00.03 | 3 Pemberian masukan dan dukungan |
| PEG.00.04 | 4 Penetapan kebijakan |
| PEG.01 | 5 Memorandum of Understanding |
| PEG.01.00 | B. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara |
| PEG.01.01 | 1 Perencanaan Kebutuhan ASN |
| PEG.01.02 | a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan |
| PEG.01.03 | b. Analisis Kebutuhan |
| PEG.02 | 1) Aparatur Sipil Negara |
| PEG.02.00 | 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) |
| PEG.02.01 | c. Pengolahan data kebutuhan |
| | 2 Perencanaan Pertimbangan Formasi |
| | a. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN |
| | b. Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas |
| | 3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara |
| | 4 Standarisasi Jabatan |
| | a. Informasi Jabatan |
| | b. Kompetensi Jabatan |
| | c. Klasifikasi Jabatan |
| | C. Formasi dan Pengadaan Pegawai |
| | 1 Formasi ASN |
| | a. Usulan formasi disertai dengan: |
| | 1) Analisa Jabatan |
| | 2) Beban Kerja |
| | b. Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN |
| | c. Persetujuan Formasi |
| | d. Penetapan Formasi |
| | e. Penetapan Formasi Khusus |
| | 2 Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| | a. Proses Rekrutmen ASN |
| | b. Penetapan Pengumuman Kelulusan |
| | c. Berkas Lamaran yang tidak diterima |
| | d. Nota Usul Pengangkatan ASN |

- PEG.02.02 3 e. *Open Bidding* (Seleksi Terbuka Jabatan)
Sistem Rekrutmen ASN
 - a. Pengelolaan sistem rekrutmen
 - 1) standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai
 - 2) kisi kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian
 - 3) evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi
 - 1) Pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian
 - 2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi
 - 3) Sertifikasi dan pelaporan
 - penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan
 - pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi
- PEG.03 D. Mutasi Pegawai
- PEG.03.00 1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala, BKN
- PEG.03.01 2 Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan
- PEG.03.02 3 Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional
- PEG.03.03 4 Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan, hukum pegawai
- PEG.03.04 5 Usulan Peninjauan Masa Kerja
- PEG.03.05 6 Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat
- PEG.04 E. Pengembangan Karir
- PEG.04.00 1 Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/ Diklat/Kursus/ Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansilain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
 - a. Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pelaporan
 - d. Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat
- PEG.04.01 2 Usulan Penyesuaian ijazah
- PEG.04.02 3 Penyusunan sistem karier
- PEG.04.03 4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
- PEG.04.04 5 Angka Kredit
 - a. Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
 - b. Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
- PEG.05 F. Kinerja
- PEG.05.00 1 Hasil penilaian kinerja dan standar kerja
 - a. Sistem penilaian kinerja ASN
 - b. Standar kinerja jabatan pegawai ASN
 - c. Penilaian kinerja pegawai ASN
- PEG.05.01 2 Pengelolaan database dan analisis sistem informasi

- kinerja pegawai ASN
 - a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN
 - b. Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN
 - c. Teknis penilaian kinerja ASN
- PEG.05.02 3 Hasil Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN
- PEG.06 G. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
- PEG.06.00 1 Kode Etik Pegawai
- PEG.06.01 2 Disiplin
 - a. Penegakan Disiplin
 - b. Peningkatan Disiplin
- PEG.06.02 3 Pemberhentian
 - a. Pemberhentian dengan hormat
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat
 - c. Pemberhentian sementara
- PEG.06.03 4 Pensiun
 - a. Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara
 - 1) Administrasi pensiun ASN
 - 2) Perekaman dan pemeliharaan data pensiun
 - b. Penetapan Pensiun ASN
 - c. Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN
 - d. Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya
 - 1) Administrasi pensiun Pejabat Negara (Sekretariat)
 - 2) Penyiapan pensiun pejabat negara (Setneg/Setkab)
 - 3) Penetapan pensiun janda/duda pejabat negara (BKN)
- PEG.07 H. Bantuan Hukum
- PEG.07.00 1 Pemberian Bantuan Hukum
- PEG.07.01 2 Bantuan Hukum Pegawai
- PEG.08 I. Status dan Kedudukan Pegawai
- PEG.08.00 1 Pertimbangan status kepegawaian
 - a. Analisis status kepegawaian
 - b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian
- PEG.08.01 2 Pertimbangan kedudukan kepegawaian
 - a. Analisis kedudukan kepegawaian
 - b. Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian
- PEG.08.02 3 Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai
- PEG.08.03 4 Perselisihan/sengketa kepegawaian
- PEG.09 J. Sistem Informasi Kepegawaian
- PEG.09.00 1 Pengolahan data dan informasi kepegawaian
 - a. Pengolahan Data
 - Pengelolaan database kepegawaian ASN
 - Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN
 - b. Informasi kepegawaian
 - 1) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN

- 2) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN
 - 3) Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik
- PEG.09.00 2 Pengembangan sistem informasi kepegawaian
- PEG.09.01 3 Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian
- a. Arsip kepegawaian elektronik
 - 1) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian
 - 2) Perekaman dan arsip kepegawaian
 - 3) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik
 - b. Arsip Kepegawaian Fisik
- PEG.10 K. Pengawasan dan pengendalian
- PEG.10.00 1 Formasi, pengadaan dan pasca diklat
- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan
 - b. Monitoring dan Evaluasi
 - b. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
- PEG.10.01 2 Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian
- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan
 - b. Monitoring dan Evaluasi
 - c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
- PEG.10.02 3 Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan
 - b. Monitoring dan Evaluasi
 - c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
- PEG.10.03 4 Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN
- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan
 - b. Monitoring dan Evaluasi
 - c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
- PEG.10.04 5 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
- PEG.10.05 6 Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
- PEG.11 L. Administrasi Pegawai
- PEG.11.00 1 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
- PEG.11.01 2 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan
- PEG.11.02 3 Cuti Alasan Penting
- PEG.11.03 4 Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara
- PEG.11.04 5 Dokumentasi Identitas Pegawai
- a. Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu
 - b. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan
 - c. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
 - d. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
- PEG.11.05 6 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- PEG.11.06 7 Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan
- PEG.12 M. Kesejahteraan Pegawai
- PEG.12.00 1 Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
- PEG.12.01 2 Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS
- PEG.12.02 3 Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan
- PEG.12.03 4 Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial

- PEG.12.04 5 Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas
PEG.12.05 6 Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena Dinas
PEG.12.06 7 Berkas tentang Pemberian Tali Kasih
PEG.12.07 8 Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
PEG.12.08 9 Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi
PEG.12.09 10 Berkas tentang Medical Record
PEG.13 N. Administrasi Perseorangan
PEG.13.00 1 Berkas perseorangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
a. Berkas Lamaran yang diterima
b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya
c. Nota Persetujuan / Pertimbangan Kepala BKN
d. SK Pengangkatan CASN
e. Hasil Pengujian Kesehatan
e. Hasil Pengujian Kesehatan
f. Surat Tanda Lulus Pelatihan Prajabatan
g. SK Pengangkatan ASN
h. SK Peninjauan Masa Kerja
i. SK Kenaikkan Pangkat
j. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan dan Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan
k. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional
l. SK Perpindahan Wilayah Kerja
l. SK. Perpindahan Antar Instansi
m. SK. Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)
n. Berita Acara Pemeriksaan
o. SK Hukuman Jabatan / Hukuman Disiplin ASN
p. SK Perbantuan / Dipekerjakan di luar Instansi Induk
q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan / Dipekerjakan
r. SK Pemberian Uang Tunggu
s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik diangkat sebagai Pejabat Negara
t. SK Pengalihan ASN
u. SK Pemberhentian Sebagai ASN
w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang
x. Surat Keterangan Kembali ASN yang dinyatakan Hilang
y. SK Penggantian Nama
z. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran
aa Akta Nikah / Cerai
bb Akta Kelahiran
cc. Isian Formulir PUASN
dd Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji ASN dan Jabatan
ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol / Ormas/ LSM
ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga

- gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang
 - hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan
 - ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
 - jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus
 - kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala
 - ll. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri
 - mm. Surat Izin Berpergian Ke Luar Negeri
 - nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN
 - oo. Ijazah/Sertifikat
 - pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai
 - qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk
 - rr. Surat Pertimbangan Status ASN
 - ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN
 - tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah
 - uu. SK. Pensiun
- PEG.13.01 2 Berkas perseorangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- PEG.13.02 3 Berkas Perseorangan Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
- a. Walikota dan Wakil Walikota
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - c. Ketua, wakil ketua, dan anggota KPUD/BAWASLU
- PEG.13.02 4 Berkas perseorangan Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II
- 5 Berkas perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
- PEG.14 O. Penilaian Kompetensi
- 1 Berkas Penilaian Kompetensi
 - 2 Hasil Penilaian Kompetensi

FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN

- PRC.**
- II PERENCANAAN**
- PRC.00 1 Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan
- PRC.00.00 a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/*Master Plan* (RPJP)
- PRC.00.01 b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
- PRC.00.02 c. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- PRC.01 2 Rencana Kerja Tahunan
- PRC.01.00 a. Usulan unit kerja beserta data Pendukung
- PRC.01.01 b. Rencana kerja Tahunan Unit kerja/SKPD
- PRC.01.02 c. Rencana kerja Tahunan Pemerintah Kota
- PRC.02 3 Program Kerja Tahunan
- PRC.02.00 a. Program Kerja Tahunan Unit Kerja/SKPD
- PRC.02.01 b. Program Kerja Tahunan Pemerintah Kota
- PRC.03 4 Penetapan/Kontrak Kerja
- a. Pimpinan Unit Kerja
 - b. Kontrak Kinerja Sekretaris Daerah, asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan SKPD, Staf Ahli, Ketua, Wakil

| | | |
|-------------|------------|---|
| | | Ketua, Anggota DPRD, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya |
| PRC.04 | 5 | Laporan |
| PRC.04.00 | | a. Laporan Berkala |
| | | 1) Laporan Harian |
| | | 2) Laporan Mingguan |
| | | 3) Laporan Bulanan |
| | | 4) Laporan Triwulan |
| | | 5) Laporan Semesteran |
| | | 6) Laporan Tahunan Unit Kerja |
| | | 7) Laporan Tahunan Lembaga/Instansi |
| | | 8) Laporan Pertanggungjawaban Walikota |
| PRC.04.01 | | b. Laporan Insidental |
| PRC.04.02 | | c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) |
| PRC.05 | 6 | Evaluasi Program |
| PRC.05.00 | | a. Evaluasi program unit kerja/SKPD |
| PRC.05.01 | | b. Evaluasi program Pemerintah Kota |
| HKM. | III | HUKUM |
| HKM.00 | 1 | Program Legislasi : |
| | | - Bahan/Materi/Program Legislasi Pemerintah Kota |
| HKM.01 | 2 | Peraturan Daerah termasuk Naskah Akademik, Rancangan awal, Rancangan akhir sampai dengan ditetapkan beserta Telaah Hukum |
| HKM.02 | 3 | Peraturan Walikota termasuk Rancangan awal, Rancangan akhir sampai dengan ditetapkan beserta Telaah Hukum |
| HKM.03 | 4 | Keputusan/Ketetapan Walikota Jambi termasuk Rancangan awal , Rancangan akhir sampai dengan ditetapkan beserta telaah hukum |
| HKM.04 | 5 | Keputusan Sekretaris Daerah Kota termasuk Rancangan Awal, Rancangan Akhir sampai dengan ditetapkan beserta telaah hukum |
| HKM.05 | 6 | Instruksi/Surat Edaran Walikota |
| HKM.06 | 7 | Instruksi/Surat Edaran Kepala SKPD |
| HKM.07 | 8 | Surat Perintah Walikota |
| HKM.08 | 9 | Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon II dan II Daerah |
| HKM.09 | 10 | Peraturan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi |
| HKM.09.00 | | a. Peraturan Ketua Lembaga Tinggi Negara |
| HKM.09.01 | | b. Peraturan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri |
| HKM.09.02 | | c. Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian |
| HKM.09.03 | | d. Peraturan Ketua Komisi/Tim/Dewan Nasional |
| HKM.09.04 | | e. Peraturan/Ketetapan Gubernur |
| HKM.10 | 11 | Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis yang bersifat nasional/regional/ instansional termasuk Rancangan |
| HKM.11 | 12 | Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding (MOU)</i> /Kontrak/Perjanjian Kerjasama : |
| HKM.11.00 | | a. Dalam Negeri |
| HKM.11.01 | | b. Luar Negeri |
| HKM.12 | 13 | Dokumentasi Hukum |
| | | Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, |

| | | |
|-----------|----|--|
| | | Instruksi Walikota, Surat Edaran Walikota |
| HKM.13 | 14 | Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum |
| HKM.13.00 | | a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/Pembinaan Hukum |
| HKM.13.01 | | b. Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum |
| HKM.14 | 15 | Kasus/Sengketa Hukum : |
| HKM.14.00 | | a. Pidana |
| | | Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran : |
| | | a. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis |
| | | b. Berkas pembelaan dan bantuan hukum |
| | | c. Telaah hukum dan opini hukum |
| HKM.14.01 | | b. Perdata |
| | | Berkas tentang kasus/sengketa perdata : |
| | | a. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis' |
| | | b. Berkas pembelaan dan bantuan hukum |
| | | c. Telaah hukum dan opini hukum |
| HKM.14.02 | | c. Tata Usaha Negara |
| | | Berkas tentang kasus/sengketa Usaha Negara : |
| | | a. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis' |
| | | b. Berkas pembelaan dan bantuan hukum |
| | | c. Telaah hukum dan opini hukum |
| HKM.14.03 | | d. Perburuhan |
| | | Berkas tentang kasus/sengketa Usaha Negara : |
| | | a. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis' |
| | | b. Berkas pembelaan dan bantuan hukum |
| | | c. Telaah hukum dan opini hukum |
| HKM.14.04 | | e. Arbitrase |
| | | Berkas tentang kasus/sengketa Usaha Negara : |
| | | a. Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis' |
| | | b. Berkas pembelaan dan bantuan hukum |
| | | c. Telaah hukum dan opini hukum |
| HKM.14.05 | | f. Sengketa Adat |
| HKM.15 | 16 | Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi |
| | | Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama) |
| HKM.16 | 17 | Perizinan |
| HKM.16.00 | | a. Berkas perizinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin' |
| HKM.16.01 | | b. Permohonan ijin yang ditolak |
| HKM.17 | 18 | Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) |
| HKM.17.00 | | a. Hak Cipta |
| HKM.17.01 | | b. Hak Paten |
| | | 1) Paten Biasa |
| | | 2) Paten Sederhana |
| HKM.17.02 | | c. Hak Desain Industri |

| | |
|-----------|---|
| HKM.17.03 | d. Hak Rahasia Dagang |
| HKM.17.04 | e. Hak Merk |
| HKM.17.05 | f. DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) |
| HKM.18 | 19 Permohonan HKI yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) |
| HKM.19 | 20 Penghargaan Kelembagaan |

ORG.

| | |
|-----------|--|
| ORG.00 | 1 Struktur Organisasi Dilingkungan Pemerintah Daerah |
| ORG.00.00 | a. Pembentukan |
| ORG.00.01 | b. Perubahan |
| ORG.00.02 | c. Pembubaran |
| ORG.01 | 2 Uraian Jabatan dan Tata Kerja |
| ORG.02 | 3 Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional |
| ORG.03 | 4 Tata Laksana |
| ORG.03.00 | a. Prosedur tetap atau SOP |
| ORG.03.01 | b. Mekanisme Kerja |
| ORG.04 | 5 Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana |
| ORG.04.00 | a. Evaluasi Struktur Organisasi |
| ORG.04.01 | b. Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi |
| ORG.04.02 | c. Evaluasi Uraian Jabatan |
| ORG.04.03 | d. Uraian Tata Laksana |

PLK.

| | |
|-----------|--|
| PLK.00 | 1 Ketentuan-ketentuan tentang Pengelolaan Barang Daerah |
| PLK.01 | 2 Rencana Kebutuhan Barang |
| PLK.01.00 | a. Usulan SKPD |
| PLK.01.01 | b. Rencana/Daftar Kebutuhan Barang (RKBU/DKBU) Pemerintah Kota |
| PLK.02 | 3 Standarisasi, Meliputi: Standarisasi Barang dan Harga |
| PLK.03 | 4 Pengadaan Barang dan Jasa |
| PLK.03.00 | a. Barang |
| | - Surat Permintaan Penawaran Harga |
| | - BA. Penjelasan Lelang |
| | - BA. Evaluasi Teknis |
| | - Evaluasi Penawaran |
| | - SK. Pemenang |
| | - BA. Hasil Lelang |
| | - HPS |
| | - Memo persetujuan PA/KPA |
| | - Dok. Pengadaan |
| | - SPPBJ |
| | - Kontrak |
| | - BA |
| | - Lap |
| PLK.03.00 | b. Jasa |
| | - Surat Permintaan Penawaran Harga |
| | - BA. Penjelasan Lelang |
| | - BA. Evaluasi Teknis |
| | - Evaluasi Penawaran |

- SK. Pemenang
 - BA. Hasil Lelang
 - HPS
 - Memo persetujuan PA/KPA
 - Dok. Pengadaan
 - SPPBJ
 - Kontrak
 - BA
 - Laporan Pengadaan Jasa
- PLK.04 5 Peminjaman Barang Bergerak, Meliputi: Alat Perlengkapan Kantor, Kendaraan Dinas, Barang Inventaris dan Barang Bergerak Lainnya
- PLK.05.00 6 a. Bukti-bukti Kepemilikan Gedung/Bangunan meliputi: Sertifikat Tanah, Ijin Bangunan, Gambar Berikut Bestek (Rancang Bangun Gedung), Silsilah Riwayat Bangunan, Cara perolehan dan Pengalihan Kepemilikan
- PLK.05.01 b. Bukti-bukti Kepemilikan Barang Bergerak, meliputi: Kendaraan Dinas, Barang Inventaris dan Barang Bergerak Lainnya
- PLK.06 7 Administrasi Pergudangan meliputi: Buku Gudang, Buku Pengadaan, Buku Penerimaan Barang, Buku Pengeluaran Barang, Kartu Barang, Kartu Persediaan Barang dan Laporan Mutasi Barang
- PLK.07 8 Pemeliharaan Barang Meliputi: Pemeliharaan dan Perbaikan Perabot Kantor, Kendaraan Dinas dan Barang Inventaris Lainnya serta Balik Nama Barang
- PLK.08 9 Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- PLK.09 10 Inventaris Barang :
- PLK.09.00 a. Barang Bergerak
- PLK.09.01 b. Barang Tidak Bergerak
- PLK.010 11 Distribusi Meliputi:
- PLK.010.00 a. Barang Habis Pakai
- PLK.010.01 b. Barang Bergerak
- PLK.010.02 c. Barang Tidak Bergerak
- PLK.11 12 Penghapusan (Penjualan, Pemindahtanganan, Tukar Guling, Hibah) Gedung Bangunan dan Kelengkapan Persyaratan
- PLK.12 13 Kasus Penolakan Pemeblian Rumah Dinas Oleh Penghuni/Bukan Penghuni, meliputi: Permohonan dan Hasil Pembahasan Persyaratannya
- ARS. VI KEARSIPAN**
- ARS.00 1 Administrasi
- ARS.00.00 a. Kartu Kendali
- ARS.00.01 b. Buku Agenda
- ARS.00.02 c. Lembar Pengantar/buku ekspedisi
- ARS.00.03 d. Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan dokumen/Arsip
- ARS.01 2 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip
- ARS.01.00 a. Daftar Arsip
- ARS.01.01 b. Pemeliharaan Arsip dan tuang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)
- ARS.02 3 Persetujuan Jadwal retensi Arsip (JRA)

| | | |
|-------------|------------|--|
| ARS.03 | 4 | Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip) |
| ARS.04 | 5 | Autentifikasi Arsip |
| ARS.05 | 6 | Aksesibilitas Arsip |
| ARS.06 | 7 | Penyusutan Arsip |
| ARS.06.00 | | a. Pemindahan arsip Inaktif |
| | | 1) Berita Acara Pemindahan |
| | | 2) Daftar Arsip yang dipindahkan |
| ARS.06.01 | | b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna |
| | | 1) Berita Acara Pemusnahan |
| | | 2) Daftar Arsip yang dimusnahkan |
| | | 3) Rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari instansi terkait |
| | | 4) Surat keputusan pemusnahan |
| ARS.06.02 | | c. Penyerahan arsip statis |
| | | 1) Berita acara serah terima arsip |
| | | 2) Daftar Arsip yang Diserahkan |
| ARS.07 | 8 | Pembinaan Kearsipan |
| ARS.07.00 | | a. Bimbingan/Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan |
| ARS.07.01 | | b. Bimbingan Teknis |
| ARS.07.02 | | c. Supervisi dan Monitoring |
| TUK. | VII | KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN |
| TUK.00 | 1 | Telekomunikasi : Administrasi Penggunaan/Langganan Peralatan Telekomunikasi Meliputi: Telepon, Radio, Teleks, TV Kabel dan Internet |
| TUK.01 | 2 | Perjalanan Dinas : |
| TUK.01.00 | | a. Dalam Negeri |
| TUK.01.01 | | b. Luar Negeri |
| TUK.02 | 3 | Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantopr lainnya |
| TUK.03 | 4 | Risalah/Notulen Rapat |
| TUK.03.00 | | a. Rapat Pimpinan Daerah/Setingkat Eselon I |
| TUK.03.01 | | b. Rapat Pimpina Eselon II dan III |
| TUK.03.02 | | c. Rapat Staf |
| TUK.04 | 5 | Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi |
| TUK.05 | 6 | Pengurusan kendaraan dinas : |
| TUK.05.00 | | a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas |
| TUK.05.01 | | b. Pemeliharaan dan perbaikan |
| TUK.05.02 | | c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan |
| TUK.06 | 7 | Pemeliharaan gedung dan taman :" |
| TUK.06.00 | | a. Pertamanan/ <i>landscaping</i> |
| TUK.06.01 | | b. Penghijauan |
| TUK.06.02 | | c. Perbaikan gedung |
| TUK.06.03 | | d. Perbaikan rumah dinas/wisma |
| TUK.06.04 | | e. Kebersihan gedung dan taman |
| TUK.07 | 8 | Pengelolaan jaringan listrik, air, telpon dan komputer : |
| TUK.07.00 | | a. Perbaikan |
| TUK.07.01 | | b. Pemasangan |
| TUK.08 | 9 | Ketertiban dan keamanan |
| TUK.08.00 | | a. Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap |

- pejabat, kantor dan rumah dinas :
- 1). Daftar nama satuan pengamanan
 - 2). Daftar jaga/daftar piket
 - 3). Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian
 - 4). Surat ijin keluar masuk orang atau barang
- TUK.08.00 b. Laporan ketertiban dan keamanan
- 1). Kehilangan
 - 2). Kerusakan
 - 3). Kecelakaan
 - 4). Gangguan
- TUK.09 10 Administrasi pengelolaan parkir
- TUK.10 11 Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan pegawai lainnya

HMS.

VIII HUBUNGAN MASYARAKAT

- HMS.00 1 Keprotokolan
- HMS.00.00 a. Penyelenggaraan acara kedinasan (Upacara, pelantikan, peresmian dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
- HMS.00.01 b. Buku Tamu
- HMS.00.02 c. Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga/Instansi
- HMS.00.03 d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
- 1) Kunjungan Dinas Pimpinan Lembaga/Instansi
 - 2) Kunjungan Dinas Pejabat lain/Pegawai
- HMS.00.04 e. Daftar nama/alamat kantor/pejabat
- HMS.01 2 Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing dalam berbagai media : Kertas/Foto/Video/Rekaman Suara/Multimedia
- HMS.02 3 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan :
- a. Kliping koran
 - b. Brosur/leaflet/poster/plakat
 - c. Pengumuman/pemberitaan
- HMS.03 4 Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi
- a. Hubungan antar lembaga pemerintah
 - b. Hubungan dengan organisasi sosial/LSM
 - c. Hubungan dengan perusahaan
 - d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG/Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 - e. Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)
 - f. Hubungan dengan media massa :
- 1) Siaran pers/konferensi pes/*Press release*
 - 2) Kunjungan wartawan/peliputan
 - 3) Wawancara
- HMS.04 5 Dengar Pendapat/Hearing DPRD
- HMS.05 6 Bahan/materi pidato/sidang DPRD, Forkompinda kota
- HMS.06 7 Penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal
- HMS.07 8 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik

| | | |
|--------|----|--|
| HMS.08 | 9 | Pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan |
| HMS.09 | 10 | Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar |
| HMS.10 | 11 | Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf |

PPG.

IX PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

| | | |
|-----------|----|---|
| PPG.00 | 1 | Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, mulai dari rancangan awal sampai dengan akhir termasuk catatan-catatan perkembangan dan log book |
| PPG.00.00 | a. | Admisnitiasi penelitian, pengkajian dan pengembangan meliputi: rencana kerja, TOR proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat |
| PPG.00.01 | b. | Hasil Penelitian dan Pengembangan |
| PPG.00.02 | c. | Hasil Pengkajian Kebijakan dan Strategi |
| PPG.01 | 2 | Sosialisasi dan Deseminasi Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan |
| PPG.02 | 3 | Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan |
| PPG.03 | 4 | Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan |
| PPG.04 | 5 | Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan |
| PPG.04.00 | a. | Data |
| PPG.04.01 | b. | Statistik |
| PPG.04.02 | c. | Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian |
| PPG.05 | 6 | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan |
| PPG.06 | 7 | Seminar, Lokakarya, Temukarya, <i>Workshop</i> |

DKL.

X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

| | | |
|-----------|---|---|
| DKL.00 | 1 | Pedoman-pedoman Kediklatan |
| DKL.01 | 2 | Kurikulum-kurikulum Diklat |
| DKL.02 | 3 | Modul-modul Diklat |
| DKL.03 | 4 | Panduan Fasilitator |
| DKL.04 | 5 | Saran/Rekomendasi Penyelenggaraan Diklat |
| DKL.05 | 6 | Notulen Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat |
| DKL.06 | 7 | Akreditasi Lembaga Diklat |
| DKL.06.00 | - | Surat permohonan akreditasi |
| DKL.06.01 | - | Laporan Hasil Verifikasi Lapangan |
| DKL.06.02 | - | Berita Acara Rapat Verifikasi |
| DKL.06.03 | - | Berita Acara Rapat Tim Penilai |
| DKL.06.04 | - | Surat Keputusan Penetapan Akreditasi |
| DKL.06.05 | - | Sertifikat Akreditasi |
| DKL.06.06 | - | Laporan Akreditasi Lembaga Diklat |
| DKL.07 | 8 | Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kediklatan |
| DKL.07.00 | - | Surat permohonan Sertifikasi |
| DKL.07.01 | - | Laporan Hasil Verifikasi Lapangan |
| DKL.07.02 | - | Berita Acara Rapat Verifikasi |
| DKL.07.03 | - | Berita Acara Rapat Tim Penilai |
| DKL.07.04 | - | Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi |
| DKL.07.05 | - | Sertifikat Sertifikasi |
| DKL.07.06 | - | Laporan Sertifikasi Lembaga Diklat |

| | | |
|-----------|----|---|
| DKL.08 | 9 | Sistem Informasi Diklat |
| DKL.08.00 | | - Data Lembaga Diklat |
| DKL.08.01 | | - Data Prasarana Diklat |
| DKL.08.02 | | - Data Sarana Diklat |
| DKL.08.03 | | - Data Pengelola Diklat |
| DKL.08.04 | | - Data Penyelenggara Diklat |
| DKL.08.05 | | - Data Widyaiswara |
| DKL.08.06 | | - Data Program diklat |
| DKL.09 | 10 | Registrasi Sertifikat/STTPL Peserta Didik |
| DKL.09.00 | | a. Surat Permohonan Kode Registrasi |
| DKL.09.01 | | b. Buku Registrasi |
| DKL.09.02 | | c. Surat Penyampaian Kode Registrasi |
| DKL.10 | 11 | Rencana Tahunan Diklat |
| DKL.11 | 12 | Rencana Penyelenggaraan Diklat |
| DKL.12 | 13 | Penyelenggaraan Diklat |
| DKL.12.00 | | - Surat Pemanggilan Peserta |
| DKL.12.01 | | - Surat Keputusan Tim Penyelenggara Diklat |
| DKL.12.02 | | - Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat |
| DKL.12.03 | | - Panduan Diklat |
| DKL.12.04 | | - Laporan Panitia Penyelenggara Diklat |
| DKL.12.05 | | - Sambutan Pembukaan Penyelenggaraan Diklat |
| DKL.12.06 | | - Daftar Peserta Diklat |
| DKL.12.07 | | - Bahan Ajar Diklat |
| DKL.12.08 | | - Daftar Hadir peserta Diklat |
| DKL.12.09 | | - Daftar Hadir Widyaiswara |
| DKL.12.10 | | - Formulir Evaluasi diklat |
| DKL.12.11 | | - Formulir Evaluasi Widyaiswara |
| DKL.12.12 | | - Hasil Formulasi Evaluasi Peserta Diklat |
| DKL.12.13 | | - Sertifikasi/STTPL |
| DKL.12.14 | | - Sambutan Penutupan Dilat |
| DKL.13 | 14 | Laporan Penyelenggaraan Diklat |
| DKL.14 | 15 | Evaluasi Penyelenggaraan Diklat |
| DKL.15 | 16 | Evaluasi Alumni Pasca Diklat |

PUS.

| | | |
|-----------|---|---|
| PUS.00 | 1 | Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka |
| PUS.00.00 | | a. Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit |
| PUS.00.01 | | b. Administrasi pengolahan bahan pustaka |
| PUS.01 | 2 | Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka |
| PUS.01.00 | | a. Buku induk koleksi |
| PUS.01.01 | | b. Daftar buku terseleksi |
| PUS.01.02 | | c. Daftar buku dalam pemesanan |
| PUS.01.03 | | d. Daftar buku dalam permintaan |
| PUS.01.04 | | e. Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah |
| PUS.01.05 | | f. Daftar pengiriman Bahan Pustaka Surplus |
| PUS.01.06 | | g. Lembar kerja pengolahan BP (Boram, Pengkatalogan) |
| PUS.01.07 | | h. Shelt List/Jajaran kartu utama (Master List) |
| PUS.01.08 | | i. Daftar tambahan Buku (Assesion list) |
| PUS.01.09 | | j. Daftar/jajaran kendali (subyek dan Pengarang) |

- PUS.02 3 Layanan jasa Perpustakaan dan Informasi
- PUS.02.00 a. Data dan Statistik Anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka
- PUS.02.01 b. Pertanyaan Rujukan dan Jawaban
- PUS.03 4 Preservasi bahan pustaka
- PUS.03.00 a. Survei kondisi bahan pustaka
- PUS.03.01 b. Reprografi bahan pustaka
- PUS.04 5 Pembinaan Perpustakaan
- PUS.04.00 a. Bimbingan Teknis
- PUS.04.01 b. Penyuluhan
- PUS.04.02 c. Sosialisasi

TIK.

XII TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- TIK.00 1 Rencana Strategis/*master plan* Pembangunan Sistem Informasi (SIM)
- TIK.01 2 Dokumentasi Arsitektur
- TIK.01.00 a. Sistem informasi
- TIK.01.01 b. Sistem Aplikasi
- TIK.01.02 c. Infrastruktur
- TIK.02 3 Dokumentasi Implementasi
- TIK.02.00 a. Sistem Informasi
- TIK.02.01 b. Sistem Aplikasi
- TIK.02.02 c. Infrastruktur
- TIK.03 4 Perekaman dan Pemuktahiran Data
- TIK.03.00 a. Formulir isian
- TIK.03.01 b. Daftar Petugas Perekaman
- TIK.03.02 c. Jadwal Pelaksanaan
- TIK.04 5 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data
- TIK.04.00 a. Perencanaan Migrasi
- TIK.04.01 b. Pelaksanaan Migrasi
- TIK.04.02 c. Berita Acara Kegiatan Migrasi
- TIK.04.03 d. Daftar sistem aplikasi dan data yang diimigrasi
- TIK.04.04 e. Laporan hasil migrasi
- TIK.05 6 Dokumen *hosting*
- TIK.05.00 a. Formulir permintaan *hosting*
- TIK.05.01 b. Laporan hasil uji kelayakan
- TIK.05.02 c. Laporan pelaksanaan *hosting*
- TIK.06 7 Layanan *Back-up* Data Digital

WAS.

XIII PENGAWASAN

- WAS.00 1 Rencana Pengawasan
- WAS.00.00 a. Rencana Strategis Pengawasan
- WAS.00.01 b. Rencana Kerja Tahunan
- WAS.00.02 c. Rencana Kinerja Tahunan
- WAS.00.03 d. Penetapan Kinerja Tahunan
- WAS.00.04 e. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional
- WAS.00.05 f. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
- WAS.01 2 Pelaksanaan Pengawasan

- WAS.01.00 a. - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan Tindak Lanjut
- WAS.01.01 b. - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan Tindak Lanjut
- WAS.01.02 c. Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat
- WAS.01.03 d. Laporan Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Temuan
- WAS.01.04 e. Laporan Perkembangan Barang Milik Daerah
- WAS.01.05 f. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah daerah
- WAS.01.06 g. *Good Corporate Governance* (GCG) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- WAS.02 3 Pelaksanaan Pemeriksaan
- WAS.02.00 a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil pemeriksaan Operasional (LHPO) yang memerlukan tindak lanjut
- WAS.02.01 b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil pemeriksaan Operasional (LHPO) yang tidak memerlukan tindak lanjut

SUBSTANTIF

TN.

I. PERTANIAN

TN.00

1. KEBIJAKAN

Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan

TN.00.00

A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan

TN.00.01

B. Penyiapan Bahan

TN.00.02

C. Perumusan Kebijakan

TN.00.03

D. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan

TN.00.04

E. Penetapan Berbentuk NSPK

TN.01

2. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

TN.01.00

A. Perbibitan Ternak

1) Produksi Bibit Ternak Ruminansia

a) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar

b) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil

2) Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia

a) Produksi Bibit Ternak Unggas

b) Produksi Bibit Aneka Ternak

3) Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak

a) Penilaian Bibit Ternak

b) Pelepasan Bibit Ternak

4) Mutu Bibit ternak

a) Sertifikasi Bibit Ternak

b) Pengawasan Mutu Bibit Ternak

- 5) Pengembangan Bibit Ternak
 - a) Analisis Pengembangan Bibit Ternak
 - b) Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak
 - 6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran
- TN.01.01 B. Pakan Ternak
- 1) Bahan Pakan
 - a) Bahan Pakan Asal Hewan
 - b) Bahan Pakan Asal Tumbuhan
 - 2) Pakan Hijauan
 - a) Budidaya Pakan Hijauan
 - b) Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak
 - 3) Pakan Olahan
 - a) Produksi Pakan Olahan
 - b) Pengolahan Pangan
 - 4) Mutu Pakan
 - a) Sertifikasi Pakan
 - b) Pengawasan Pakan
 - 5) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran
- TN.01.02 C. Budidaya Ternak
- 1) Ternak Potong
 - a) Ternak Sapi dan Kerbau Potong
 - b) Ternak Kambing dan Domba Potong
 - 2) Ternak Unggas dan Aneka Ternak
 - a) Ternak Unggas
 - b) Aneka Ternak dan Monogastrik
- TN.01.03 D. Kesehatan Hewan
- 1) Pengamatan Penyakit Hewan
 - a) Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner
 - b) Penyidikan Penyakit Hewan
 - 2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - a) Pencegahan Penyakit Hewan
 - b) Pemberantasan Penyakit Hewan
 - c) Rekomendasi MBM
 - 3) Perlindungan Hewan
 - a) Analisis Risiko Penyakit Eksotik
 - b) Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan
 - 4) Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan
 - a) Kelembagaan Kesehatan Hewan
 - b) Sumber Daya Kesehatan Hewan
 - c) Laporan THL
 - d) Proposal Poskeswan
 - 5) Pengawasan Obat Hewan
 - a) Peredaran dan Mutu Obat Hewan
 - b) Pendaftaran Obat Hewan
 - c) Rekomendasi Obat Hewan
- TN.01.04 E. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen
- 1) Pascapanen

- a) Teknologi Pascapanen
 - b) Sarana Pascapanen
 - 2) Higien Sanitasi
 - a) Penerapan Higien Sanitasi
 - b) Inspeksi Higien Sanitasi
 - 3) Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan
 - a) Pengawasan Sanitary
 - b) Pengawasan Keamanan Produk Hewan
 - 4) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
 - a) Zoonosis
 - b) Kesejahteraan Hewan
 - 5) Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan
 - a) Pengujian Produk Hewan;
 - b) Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan
 - 6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/
Pengeluaran
- TN.02
TN.02.00
3. HORTIKULTURA
- A. Perlindungan hortikultura
- 1) Perlindungan Tanaman Buah
 - a) Teknologi Perlindungan Tanaman Buah
 - b) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - 2) Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
 - a) Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
 - b) Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
 - 3) Perlindungan Tanaman Florikultura
 - a) Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura
 - b) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura
 - 4) Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
 - a) Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan
 - b) Informasi dan Persyaratan Teknis
- TN.02.01
- B. Perbenihan Hortikultura
- 1) Penilaian Varietas
 - a) Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas
 - b) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas
 - c) Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas
 - d) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas
 - e) Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas
 - f) Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas
 - g) Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis

- h) Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan
- i) Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas
- 2) Pengawasan Mutu Benih
 - a) Bahan Penyipahan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengawasan mutu benih
 - b) Bahan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura
 - c) Bahan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura
 - d) Bahan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, Prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura
 - e) Bahan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura
 - f) Bahan Penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura
 - g) Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas
- 3) Budidaya dan Pascapanen Florikultura
 - a) Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong
 - b) Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap
 - c) Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong
 - d) Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap

TN.03
TN.03.00

4. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan

- 1) Basis Data Lahan
 - a) Identifikasi Lahan
 - b) Analisis dan Penyajian Data Lahan
- 2) Pengendalian Lahan
 - a) Identifikasi dan Analisis Lahan
 - b) Rekomendasi Teknis pengendalian lahan
- 3) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
 - a) Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan
 - b) Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan
- 4) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
 - a) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan
 - b) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan
- 5) Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
 - a) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan

- b) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan
- TN.03.01
 - B. Pengelolaan Air Irigasi
 - 1) Pengembangan Sumber Air
 - a) Air Permukaan
 - b) Air Tanah
 - 2) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
 - a) Pengembangan Jaringan
 - b) Optimasi Air
 - 3) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
 - a) Iklim
 - b) Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
 - 4) Kelembagaan
 - a) Identifikasi Kelembagaan
 - b) Pengembangan Kelembagaan
- TN.03.02
 - C. Pembiayaan Pertanian
 - 1) Pembiayaan Program
 - a) Data dan Informasi pembiayaan program
 - b) Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program
 - 2) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
 - a) Pembiayaan Syariah
 - b) Kerja Sama pembiayaan
 - 3) Pembiayaan Agribisnis
 - a) Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis
 - b) Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis
 - 4) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis
 - a) Kelembagaan Agribisnis
 - b) Pemberdayaan Agribisnis
- TN.03.03
 - D. Pupuk Pestisida
 - 1) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
 - a) Tanaman Pangan
 - b) Hortikultura dan Perkebunan
 - 2) Pupuk Anorganik
 - a) Tanaman Pangan
 - b) Hortikultura dan Perkebunan
 - 3) Pestisida
 - a) Pestisida Kimia
 - b) Pestisida Hayati
 - 4) Pengawasan Pupuk dan Pestisida
 - a) Pengawasan Pupuk
 - b) Pengawasan Pestisida
- TN.03.04
 - E. Alat dan Mesin Pertanian
 - 1) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
 - a) Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b) Perkebunan dan Peternakan
 - 2) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
 - a) Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b) Perkebunan dan Peternakan
 - 3) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
 - a) Kelembagaan
 - b) Pelayanan

- TN.04
TN.04.00
5. TANAMAN PANGAN
- A. Perbenihan Tanaman Pangan
- 1) Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
 - a) Penilaian Varietas
 - b) Pengawasan Mutu Benih
 - 2) Produksi Benih Serealia
 - a) Padi
 - b) Serealia Non Padi
 - 3) Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
 - a) Aneka Kacang
 - b) Aneka Umbi
 - 4) Kelembagaan Benih
 - a) Kelembagaan Produksi
 - b) Kelembagaan Pengawasan
- TN.04.01
- B. Budidaya Serealia
- 1) Padi Irigasi dan Rawa
 - a) Padi Irigasi
 - b) Padi Rawa
 - 2) Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
 - a) Padi Tadah Hujan
 - b) Padi Lahan Kering
 - 3) Jagung
 - a) Intensifikasi Jagung
 - b) Pengembangan Jagung
 - 4) Serealia Lain
 - a) Intensifikasi Serealia Lain
 - b) Pengembangan Serealia Lain
- TN.04.02
- C. Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
- 1) Kedelai
 - a) Intensifikasi Kedelai
 - b) Pengembangan Kedelai
 - 2) Ubi Kayu
 - a) Intensifikasi Ubi Kayu
 - b) Pengembangan Ubi Kayu
 - 3) Aneka Kacang
 - a) Intensifikasi Aneka Kacang
 - b) Pengembangan Aneka Kacang
 - 4) Aneka Umbi
 - a) Intensifikasi Aneka Umbi
 - b) Pengembangan Aneka Umbi
- TN.04.03
- D. Perlindungan Tanaman Pangan
- 1) Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - a) Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan
 - b) Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan.
 - 2) Dampak Perubahan Iklim
 - a) Adaptasi
 - b) Mitigasi dampak perubahan iklim
 - 3) Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - a) Identifikasi teknologi pengendalian.
 - b) Verifikasi teknologi pengendalian.
 - 4) Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu

- a) Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.
 - b) Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.
- TN.04.04 E. Pascapanen Tanaman Pangan
- 1) Pa di
 - a) Teknologi pascapanen padi.
 - b) Sarana pascapanen padi.
 - 2) Jagung dan Serealia Lain
 - a) Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain.
 - b) Sarana pascapanen jagung dan serealia lain.
 - 3) Kedelai dan Aneka Kacang
 - a) Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang.
 - b) Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.
 - 4) Aneka Umbi
 - a) Teknologi pascapanen aneka umbi.
 - b) Sarana pascapanen aneka umbi.
- TN.05
TN.05.00 6. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
- A. Pengolahan Hasil Pertanian
- 1) Tanaman Pangan
 - a) Serealia
 - b) Aneka Kacang dan Aneka Umbi
 - 2) Hortikultura
 - a) Tanaman Buah dan Sayuran
 - b) Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat
 - 3) Perkebunan
 - a) Tanaman Semusim
 - b) Tanaman Tahunan
 - 4) Peternakan
 - a) Ruminansia
 - b) Non Ruminansia
- TN.05.01 B. Mutu dan Standarasi
- 1) Standardisasi
 - a) Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b) Perkebunan dan Peternakan
 - 2) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
 - a) Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b) Perkebunan dan Peternakan
 - 3) Akreditasi dan Kelembagaan
 - a) Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b) Perkebunan dan Peternakan
 - 4) Kerjasama dan Harmonisasi
 - a) Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b) Perkebunan dan Peternakan
- TN.05.02 C. Pengembangan Usaha dan Investasi
- 1) Kemitraan dan Kewirausahaan
 - a) Kemitraan
 - b) Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif
 - 2) Investasi

- a) Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b) Perkebunan dan Peternakan
 - 3) Promosi Dalam Negeri
 - a) Daya Saing
 - b) Eksibisi dan Ekspo
 - 4) Promosi Luar Negeri
 - a) Daya Saing
 - b) Eksibisi dan Ekspo
- TN.05.03 D. Pemasaran Domestik
- 1) Informasi Pasar
 - a) Analisis Pasar
 - b) Deseminasi Informasi Pasar
 - 2) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
 - a) Pemantauan Pasar
 - b) Stabilisasi Harga
 - 3) Sarana dan Kelembagaan Pasar
 - a) Sarana Pasar
 - b) Kelembagaan Pasar
 - 4) Jaringan Pemasaran
 - a) Akses Pasar
 - b) Sarana Pemasaran
- TN.06 7. PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
- TN.06.00 A. Administrasi meliputi :
- TN.06.01 Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat
- TN.06.02 B. Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
- TN.06.03 1) Hasil Penelitian dan Pengembangan
- 2) Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
- TN.06.02 C. Diseminasi
- TN.06.03 D. Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
- 1) Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
 - 2) Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
- TN.06.04 E. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
- TN.06.05 F. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
- TN.06.06 G. Data Penelitian dan Pengembangan
- TN.06.07 H. Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
- TN.06.08 I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
- 1) Hak Cipta
 - 2) Hak Paten Sederhana
 - 3) Hak Paten Biasa
 - 4) Hak Merek
 - 5) Pendaftaran Varietas Tanaman
 - 6) Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
 - 7) Permohonan HKI yang ditolak
- TN.07 8. KETAHANAN PANGAN
- TN.07.00 A. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- 1) Ketersediaan Pangan
 - a) Analisis Ketersediaan Pangan
 - b) Sumberdaya Pangan
 - 2) Akses Pangan

- a) Analisis Akses Pangan
 - b) Pengembangan Akses Pangan
 - 3) Kerawanan Pangan
 - a) Analisis Kerawanan Pangan
 - b) Penanggulangan Kerawanan Pangan
- TN.07.01 B. Distribusi dan Cadangan Pangan
- 1) Distribusi Pangan
 - a) Analisis Distribusi Pangan
 - b) Kelembagaan Distribusi Pangan
 - 2) Harga Pangan
 - a) Analisis Harga Pangan Produsen
 - b) Analisis Harga Pangan Konsumen
 - 3) Cadangan Pangan
 - a) Cadangan Pangan Pemerintah
 - b) Cadangan Pangan Masyarakat
- TN.07.02 C. Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
- 1) Konsumsi Pangan
 - a) Pola Konsumsi Pangan
 - b) Kebutuhan Konsumsi Pangan
 - 2) Penganekaragaman Pangan
 - a) Pengembangan Pangan Lokal
 - b) Promosi Penganekaragaman Pangan
 - 3) Keamanan Pangan Segar
 - a) Pengawasan Keamanan Pangan Segar
 - b) Kelembagaan Keamanan Pangan Segar
- TN.07.03 D. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
- 1) Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan
 - 2) Dewan Ketahanan Pangan
 - 3) SOLID
 - 4) Penghargaan Ketahanan Pangan
- TN.08
TN.08.00 9. KARANTINA PERTANIAN DAN HEWAN
- A. Data Karantina
- 1) Data karantina Hewan
 - a) Data Penyakit Hewan
 - b) Teknik dan Metode
 - c) Data Kualitatif dan Kuantitatif
 - d) Data Sarana/Laboratorium/Lokasi
 - e) Laporan
 - 2) Data Karantina Tumbuhan
 - a) Data Penyakit Tumbuhan
 - b) Teknik dan Metode
 - c) Data Kualitatif dan Kuantitatif
 - d) Data Sarana/Laboratorium/Lokasi
 - e) Laporan
- TN.08.01 B. Inventarisasi Penyakit
- 1) Inventarisasi Penyakit Hewan
 - a) Survei
 - b) Determinasi Penyakit/Daerah Pencar
 - c) pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa
 - 2) Inventarisasi Penyakit Tumbuhan
 - a) Survei
 - b) Determinasi Penyakit/Daerah Pencar
 - c) pengamatan Penyakit di

- laboratorium/kandang uji diagnosa
- TN.08.02 C. Tindakan Karantina
- 1) Tindakan Karantina Hewan
 - a) Pemeriksaan
 - b) Pengasingan
 - c) Pengamatan
 - d) Perlakuan
 - e) Penahanan
 - f) Penolakan
 - g) Pemusnahan
 - h) Pembebasan
 - 2) Tindakan Karantina Tumbuhan
 - a) Pemeriksaan
 - b) Pengasingan
 - c) Pengamatan
 - d) Perlakuan
 - e) Penahanan
 - f) Penolakan
 - g) Pemusnahan
 - h) Pembebasan
- TN.08.03 D. Sertifikasi Pelepasan Karantina
- 1) Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan
 - 2) Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan
- TN.08.04 E. Pemberantasan Penyakit
- 1) Pemberantasan Penyakit Hewan
 - a) Penutupan Satu Daerah
 - b) Pembatasan Gerak HPHK
 - c) Pembinaan HPHK
 - 2) Pemberantasan Penyakit Tumbuhan
 - a) Penutupan Satu Daerah
 - b) Pembatasan Gerak OPTK
 - c) Pembinaan OPTK
- TN.08.05 F. Keamanan Pangan
- 1) Pengawasan Keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan)
 - 2) Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)
- TN.08.06 G. Tertib Operasional
- 1) Tertib Operasional Karantina Hewan
 - a) Penelitian Data Laporan Operasional
 - b) Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS)
 - 2) Tertib Operasional Karantina Tumbuhan
 - a) Penelitian Data Laporan Operasional
 - b) Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS)
- TN.09 10. PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
- TN.09.00 A. Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman
- 1) Permohonan Perlindungan Varietas Tananm
 - 2) Pengujian Perlindungan Varietas Tananm
 - 3) Pendaftaran Varietas Sumber Daya Genetik Tanaman
- TN.09.01 B. Pelayanan Perijinan Pertanian
- 1) Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin

- pertanian)
 - 2) Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
 - 3) Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
 - C. Pelayanan Hukum
 - 1) Sertifikasi
 - 2) Pertimbangan Hukum
- TN.10 11. BIMBINGAN TEKNIS
- TN.11 12. EVALUASI

IN. II PERINDUSTRIAN

- IN.00 1. KEBIJAKAN
- Kebijakan mengenai industri manufaktur, industri agro, industri unggulan berbasis teknologi tinggi, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, kerja sama industri internasional, pengkajian kebijakan iklim dan mutu industri meliputi:
- IN.00.00 A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - IN.00.01 B. Penyiapan kebijakan
 - IN.00.02 C. Perumusan dan penyusunan bahan
 - IN.00.03 D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
 - IN.00.04 E. Penetapan dalam bentuk NSPK
- IN.01 2. IKLIM USAHA DAN KERJASAMA
- IN.01.00 A. INDUSTRI MANUFAKTUR
- Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya
- 1) Industri Material Logam
 - a) Logam Besi
 - b) Logam Bukan Besi
 - 2) Industri Kimia Dasar
 - a) Anorganik dasar
 - b) Organik dasar
 - c) Dasar lainnya
 - 3) Industri Kimia Hilir
 - a) Kimia Anorganik Hilir
 - b) Kimia Organik Hilir
 - c) Kimia Hilir Lainnya
 - 4) Industri Tekstil dan Aneka
 - a) Tekstil
 - b) Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya
 - c) Alas Kaki, Kulit, dan Aneka
- IN.01.01 B. INDUSTRI AGRO
- 1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
 - a) Kayu
 - b) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya
 - 2) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
 - a) Hasil Tanaman Pangan
 - b) Hasil Perkebunan
 - c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan
 - 3) Industri Minuman dan Tembakau
 - a) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan
 - b) Hasil Tembakau
 - c) Hasil Susu dan Minuman Lainnya

- IN.01.02 C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
- IN.01.03 D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
 - 1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan
 - a) Pangan
 - b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan
 - 2) Industri Kerajinan dan Sandang
 - a) Kerajinan
 - b) Sandang
- IN.02 3. PROMOSI INDUSTRI
- IN.02.00 A. INDUSTRI MANUFAKTUR
Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya
 - 1) Industri Material Dasar Logam
 - a) Logam Besi
 - b) Logam Bukan Besi
 - 2) Industri Kimia Dasar
 - a) Anorganik Dasar
 - b) Organik Dasar
 - c) Dasar Lainnya
 - 3) Industri Kimia Hilir
 - a) Kimia Anorganik Hilir
 - b) Kimia Organik Hilir
 - c) Kimia Hilir Lainnya
 - 4) Industri Tekstil dan Aneka
 - a) Tekstil
 - b) Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya
 - c) Alas Kaki, Kulit, dan Aneka
- IN.02.01 B. INDUSTRI AGRO
 - 1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
 - a) Kayu
 - b) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya
 - 2) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
 - a) Hasil Tanaman Pangan
 - b) Hasil Perkebunan
 - c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan
 - 3) Industri Munuman dan Tembakau
 - a) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan
 - b) Hasil Tembakau
 - c) Hasil Susu dan Minuman Lainnya
- IN.02.02 C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
- IN.02.03 D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH SUMATERA
 - 1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan
 - a) Pangan
 - b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan
 - 2) Industri Kerajinan dan Sandang
 - a) Kerajinan
 - b) Sandang
- IN.03 4. STANDARISASI DAN TEKNOLOGI
- IN.03.00 A. INDUSTRI MANUFAKTUR
 - 1) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya
 - a) Industri Tekstil dan Aneka
 - Tekstil

- Pakaian Jadi, Tekstil
Lainnya
 - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka
- IN.03.01 B. INDUSTRI AGRO
- 1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
 - a) Kayu
 - b) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya
 - 2) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
 - a) Hasil Tanaman Pangan
 - b) Hasil Perkebunan
 - c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan
 - 3) Industri Minuman dan Tembakau
 - a) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan
 - b) Hasil Tembakau
 - c) Hasil Susu dan Minuman Lainnya
- IN.03.02 C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
- IN.03.03 D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
1. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan
 - a) Pangan
 - b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan
 2. Industri Kerajinan dan Sandang
 - a) Kerajinan
 - b) Sandang
- IN.04 5. ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN KOTA
Berkas yang berkaitan dengan analisis industri unggulan kota mulai dari permohonan sampai dengan pemberian rekomendasi
- IN.05 6. MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI KOTA
- IN.06 7. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
Berkas yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur pendukung mulai dari permohonan sampai dengan pemberian rekomendasi
- IN.07 8. FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
Berkas yang berkaitan dengan fasilitas pengembangan kawasan industri mulai dari permohonan sampai dengan pemberian rekomendasi
- IN.08 9. STANDARISASI
- IN.08.00 A. Standar
- Standar Industri Manufaktur
 - Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi
- IN.08.01 B. Penyiapan Penerapan
- Penyiapan Penerapan Standar
 - Kerja sama Standarisasi
- IN.08.02 C. Infrastruktur Standar
- Pengembangan Infrastruktur Standar
 - Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian
- IN.09 10. PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP
- IN.09.00 A. Industri Hijau
- Pengembangan Industri Hijau
 - Kerja Sama Industri Hijau
- IN.09.01 B. Lingkungan Hidup
- Lingkungan Global
 - Pengendalian Lingkungan Hidup
- IN.09.02 C. Energi

- Konservasi Energi
- Diversifikasi Energi

DG.

III PERDAGANGAN

DG.00

1. KEBIJAKAN

Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional.

DG.00.00

A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan

DG.00.01

B. Penyiapan bahan

DG.00.02

C. Perumus Kebijakan

DG.00.03

D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan

DG.00.04

E. Penetapan dalam bentuk NSPK

DG.00.05

F. perumusan dan penerapan standar

DG.01

2. PERDAGANGAN DALAM NEGERI

DG.01.00

A. Bina Usaha

1) Kelembagaan dan penguatan usaha

a) Kelembagaan

b) Penguatan usaha

2) Jasa Perdagangan

a) Perdagangan berbasis elektronik

b) Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis

3) Usaha dagang asing dan keagenan

a) Usaha dagang asing

b) Keagenan

4) Informasi perusahaan

a) Pendaftaran perusahaan

b) Seksi analisa LKTP

5) Pelaku pasar

a) Pengecer

b) Pemasok

DG.01.01

B. Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri

1) iklim usaha dan bimbingan teknis

a) Iklim usaha

b) Bimbingan teknis

2) fasilitasi usaha dan pemasaran

a) Fasilitasi usaha produktif

b) Pemasaran

3) pengembangan produk lokal

a) Penelaahan potensi produk

b) Fasilitasi penguatan produk

4) pencitraan produk dalam negeri

a) kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri

b) peningkatan promosi

DG.01.02

C. Logistik dan Sarana Distribusi

1) Pengembangan sarana distribusi

a) Perencanaan

b) Bimbingan teknis pengembangan

2) Pengelolaan sarana distribusi

a) Bimbingan teknis pengelolaan

b) Evaluasi pengelolaan

3) kerja sama pengembangan sistem logistik

- a) Pemerintah
 - b) Lembaga non pemerintah
 - 4) Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik
 - a) Informasi logistik
 - b) Bimbingan teknis penyedia jasa logistik
- DG.01.03
- D. Bahan Pokok dan Barang Strategis
 - 1) Informasi Pasar
 - a) Informasi harga; pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis
 - b) Informasi non harga; pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis
 - 2) Hasil industri
 - a) Gula dan tepung
 - b) Minyak goreng dan garam
 - 3) Barang strategis
 - a) Hasil agro
 - b) Hasil industri
 - 4) Bahan pokok agro
 - a) Serelia
 - b) Hewan dan non serelia
- DG.02
- DG.02.00
- 3. STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
 - A. Standardisasi
 - 1) kelembagaan dan informasi standar
 - a) Hubungan kelembagaan
 - b) Informasi standar
 - 2) kerjasama standarisasi
 - a) kerjasama regional
 - b) kerjasama bilateral dan multilateral
 - 3) Perumusan dan Penerapan Standar
 - a) Penerapan Standar
 - b) Perumusan Standar
 - 4) Tata Usaha
 - a) Kepegawaian
 - b) Keuangan
 - c) Perencanaan dan Program
 - d) Inventaris Kantor/BMAN
 - B. Pemberdayaan Konsumen
 - 1) kerjasama, informasi, dan publikasi
 - a) kerja sama
 - b) informasi dan publikasi
 - 2) analisa penyelenggara perlindungan konsumen
 - a) konsultasi hukum
 - b) analisis
 - 3) bimbingan konsumen dan pelaku usaha
 - a) bimbingan konsumen
 - b) bimbingan pelaku usaha
 - 4) fasilitasi kelembagaan
 - a) pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
 - b) pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen
 - C. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 - 1) produk pertambangan dan aneka industri
- DG.02.01
- DG.02.02

- a) produk pertambangan dan olahan
 - b) produk aneka industri
 - 2) produk pertanian, kimia, dan kehutanan
 - a) produk pertanian dan kehutanan
 - b) produk kimia dan olahan
 - 3) jasa
 - a) jasa distribusi
 - b) jasa bisnis
 - 4) kerjasama lembaga pemerintah dan non pemerintah
- DG.02.03 D. Metrologi
- 1) Sarana dan Kerjasama
 - a) Sarana metrologi legal
 - b) Kerja sama metrologi legal
 - 2) Kelembagaan dan Penilaian
 - a) kelembagaan metrologi legal
 - b) penilaian kelembagaan metrologi legal
 - 3) UTP dan Standar Ukuran
 - a) Besaran massa, listrik, tekanan dan suhu
 - b) Besaran arus, panjang dan volume
 - 4) Pengawasan
 - a) Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
 - b) Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional
 - 5) Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)
 - a) Bimbingan Mutu
 - b) Pelayanan Teknis
- DG.03 4. BIMBINGAN TEKNIS
- DG.04 5. EVALUASI
- HB. IV PERHUBUNGAN**
- HB.00 1. KEBIJAKAN
- Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkerataapian
- HB.00.00 A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - HB.00.01 B. Penyiapan kebijakan
 - HB.00.02 C. Perumusan dan penyusunan bahan
 - HB.00.03 D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
 - HB.00.04 E. Penetapan dalam bentuk NSPK
- HB.01 2. PERHUBUNGAN DARAT
- HB.01.00 A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 1) Jaringan Transportasi Jalan :
 - a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan :
 - penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
 - penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
 - standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
 - jaringan trayek angkutan antar kota
 - jaringan lintas pada jaringan jalan primer
 - kualifikasi teknis petugas terminal
 - jaringan transportasi jalan sekunder
 - b) Pengembangan Transportasi Jalan :

- sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - pengembangan transportasi jalan
- 2) Sarana Angkutan Jalan Pengujian Kendaraan Bermotor
- pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
 - sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
 - sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
 - akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
- 3) Lalu lintas jalan
- a) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :
- analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
 - manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional baik di jalan tol/non-tol
- b) Perlengkapan Jalan :
- Pedoman teknis perlengkapan jalan
 - penimbangan kendaraan bermotor di jalan
 - akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
 - kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
 - pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
- 4) Angkutan jalan
- a) Angkutan Penumpang :
- tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
 - izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
 - izin trayek antar kota antar propinsi
 - izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/propinsi
 - penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
 - pemberian subsidi angkutan umum
 - angkutan perintis
 - penghargaan perusahaan angkutan umum
- b) Angkutan Barang :
- sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - tarif angkutan barang
 - izin operasi angkutan barang tertentu
 - pembinaan angkutan barang
- 5) Pengendalian operasional
- a) Monitoring Operasional :
- pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
- b) Bimbingan Teknis Penyidik Aparatur Sipil Negara :

- Pedoman Teknis
 - Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - Bimtek PPNS
 - pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- HB.01.01 B. Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, dan Penyeberangan
- 1) Jaringan Transportasi Sungai dan Penyeberangan
 - a) Analisa dan Evaluasi Jaringan :
 - pendataan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan
 - analisis serta informasi jaringan transportasi sungai dan penyeberangan
 - b) Pengembangan Jaringan :
 - pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
 - pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai dan penyeberangan
 - 2) Sarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan
 - a) Rancang Bangun Sarana
 - b) Bimbingan Perawatan Sarana
 - :
 - perawatan dan pemeliharaan sarana sungai dan penyeberangan
 - pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan penyeberangan
 - 3) Lalu Lintas Sungai
 - a) Manajemen Lalu Lintas :
 - manajemen lalu lintas
 - tata cara berlalu lintas di sungai dan penyeberangan
 - Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
 - sertifikasi inspektur sungai dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
 - b) Alur dan Perambuan :
 - pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
 - penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
 - perambuan sungai, danau dan penyeberangan
 - 4) Angkutan Sungai
 - Bimbingan Usaha Angkutan :
 - penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
 - persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
- HB.01.02 C. Bina Sistem Transportasi Perkotaan
- 1) Jaringan Transportasi Perkotaan
 - a) transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan

- b) transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- c) Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan
- 2) Lalu Lintas Perkotaan
 - a) manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
 - b) manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - c) penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
- 3) Angkutan Perkotaan
 - a) penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
 - b) jaringan trayek perkotaan
 - c) penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 4) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan
 - a) penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
 - b) pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
 - c) penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 5) Dampak Transportasi Perkotaan
 - a) penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
 - b) penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
 - c) masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
 - d) pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
 - e) rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - f) Masterplan transportasi perkotaan

HB.01.03

D. Keselamatan Transportasi Darat

- 1) Manajemen Keselamatan
 - a) Monitoring dan Evaluasi :
 - monitoring dan evaluasi data kecelakaan
 - kualifikasi unit pengkajian
 - pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
 - b) Pengembangan Keselamatan :
 - program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
 - harmonisasi kebijakan

- 2) Promosi dan Kemitraan Keselamatan
 - a) Promosi :
 - promosi keselamatan
 - penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
 - b) Kemitraan :
 - kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
- 3) Bina Keselamatan Angkutan Umum
 - a) Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum :
 - b) Keselamatan Awak Angkutan Umum : keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau
- 4) Audit dan Inspeksi Keselamatan
 - a) Audit Keselamatan :
 - Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
 - identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
 - audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
 - b) Inspeksi Keselamatan :
 - Pedoman keselamatan
 - Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
 - investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

PM.
PM.00

V PENANAMAN MODAL

1. KEBIJAKAN

Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi:

- PM.00.01 A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
- PM.00.02 B. Penyiapan Kebijakan
- PM.00.03 C. Perumusan Kebijakan
- PM.00.04 D. Masukan dan Dukungan Kebijakan
- PM.00.05 E. Penetapan NSPK

PM.01

2. PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

PM.01.00

- A. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
 - 1) Agribisnis
 - a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
 - b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan
 - 2) Energi
 - a) Energi Terbarukan
 - b) Energi Tak Terbarukan

- 3) Sumber Daya Mineral
 - a) Mineral Logam
 - b) Mineral Non Logam
- PM.01.01 B. Perencanaan Industri Manufaktur
 - 1) Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka
 - a) Industri Logam dan Mesin
 - b) Industri Tekstil dan Aneka
 - 2) Industri Kimia
 - a) Industri Kimia Dasar
 - b) Industri Barang Kimia dan Farmasi
 - 3) Industri Alat Transportasi dan Telematika
 - a) Industri Alat Transportasi
 - b) Industri Telematika
- PM.01.02 C. Perencanaan Jasa dan Kawasan
 - 1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata
 - a) Jasa Perdagangan
 - b) Jasa Pariwisata
 - 2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya
 - a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan
 - b) Jasa Lainnya
 - 3) Kawasan Ekonomi
 - a) Kawasan Ekonomi Khusus
 - b) Kawasan Ekonomi Lainnya
- PM.01.03 D. Perencanaan Infrastruktur
 - 1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan
 - a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian
 - b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 - 2) Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air
 - a) Infrastruktur Energi
 - b) Infrastruktur Sumber Daya Air
 - 3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya
 - a) Infrastruktur Transportasi Laut
 - b) Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya
- PM.02 3. PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- PM.02.00 A. Deregulasi Penanaman Modal
 - 1) Sektor Primer
 - a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan
 - b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan
 - 2) Sektor Sekunder
 - a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika
 - b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka
 - 3) Sektor Tersier
 - a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi
 - b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya
- PM.02.01 B. Pengembangan Potensi Daerah
 - 1) Sektor Primer dan Tersier
 - a) Sektor Primer
 - b) Sektor Tersier

- 2) Sektor Sekunder
 - a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika
 - b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka
- PM.02.02 C. Pemberdayaan Usaha
 - 1) Pembinaan dan Penyuluhan
 - a) Pembinaan
 - b) Penyuluhan
 - 2) Kemitraan Usaha
 - a) Sektor Primer dan Tersier
 - b) Sektor Sekunder
 - 3) Pelayanan Usaha
 - a) Sektor Primer dan Tersier
 - b) Sektor Sekunder
- PM.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL
- PM.03.00 A. Pengembangan Promosi
 - 1) Analisis Strategi Promosi
 - a) Analisis Target Promosi
 - b) Analisis Daya Saing Promosi
 - 2) Fasilitasi Promosi Luar Negeri
 - a) Wilayah Amerika dan Eropa
 - b) Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika
- PM.03.01 B. Promosi Sektoral
 - 1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan
 - a) Industri Sumber Daya Alam
 - b) Jasa dan Kawasan
 - 2) Promosi Industri Manufaktur
 - a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik
 - b) Industri Manufaktur Lainnya
 - 3) Promosi Infrastruktur
 - a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan
 - b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya
- PM.03.02 C. Fasilitasi Promosi Daerah
- PM.03.03 D. Pameran dan Sarana Promosi
 - 1) Pameran
 - a) Penyusunan Program dan Monitoring
 - b) Penyelenggaraan dan Evaluasi
 - 2) Media Cetak
 - a) Materi Promosi
 - b) Publikasi dan Distribusi
 - 3) Media Elektronik
 - a) Materi Promosi
 - b) Pelayanan Informasi
- PM.04 5. KERJASAMA PENANAMAN MODAL
- PM.04.00 A. Kerjasama Bilateral dan Multilateral
 - 1) Kerjasama Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa
 - a) Kerjasama Wilayah Amerika
 - b) Kerjasama Wilayah Eropa
 - 2) Kerjasama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika
 - a) Kerjasama Wilayah Asia
 - b) Kerjasama Wilayah Pasifik dan Afrika
 - 3) Kerjasama Multilateral

- PM.04.01
 - B. Kerjasama Regional
 - 1) Kerjasama Regional ASEAN
 - a) Kerjasama ASEAN
 - b) Kerjasama Sub Regional ASEAN
 - 2) Kerjasama Intra Kawasan
 - a) Kerjasama APEC
 - b) Kerjasama ASEM dan Kawasan Lainnya
- PM.04.02
 - C. Kerjasama Dunia Usaha Internasional
 - 1) Asosiasi dan Lembaga Bisnis
 - a) Asosiasi Bisnis
 - b) Lembaga Bisnis
 - 2) Lembaga Keuangan
 - a) Lembaga Perbankan
 - b) Lembaga Non Perbankan
- PM.05
 - 6. PELAYANAN PENANAMAN MODAL
- PM.05.00
 - A. Pelayanan Aplikasi
 - 1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier
 - a) Aplikasi Baru
 - b) Aplikasi Perluasan
 - c) Aplikasi Perubahan
 - 2) Aplikasi Sektor Sekunder
 - a) Aplikasi Baru
 - b) Aplikasi Perluasan
 - c) Aplikasi Perubahan
- PM.05.01
 - B. Pelayanan Perizinan
 - 1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier
 - a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana
 - b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi
 - c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa
 - 2) Perizinan Sektor Sekunder
 - a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam
 - b) Industri Kimia dan Barang Kimia
 - c) Industri Aneka
- PM.05.02
 - C. Pelayanan Fasilitas
 - 1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier
 - a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana
 - b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi
 - c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa
 - 2) Perizinan Sektor Sekunder
 - a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam
 - b) Industri Kimia dan Barang Kimia
 - c) Industri Aneka
- PM.06
 - 7. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERIJINAN TERPADU
- PM.06.00
 - A. Pemantauan Penanaman Modal
- PM.06.01
 - B. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan
- PM.06.02
 - C. Fasilitas Penyelesaian Masalah
- PM.06.03
 - D. Pengawasan Perijinan

- PM.06.04 E. Pencabutan/Pembatalan Perizinan
- PM.06.05 F. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Penanaman Modal

LH. VI LINGKUNGAN HIDUP

- LH.00 1. KEBIJAKAN
Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah, penataan hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas
- LH.00.00 A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan:
 - 1) Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah
 - 2) Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor
 - 3) Kajian Dampak Lingkungan
 - 4) Pengembangan Perangkat Kebijakan
- LH.00.01 B. Penyiapan bahan
- LH.00.02 C. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
- LH.00.03 D. Pengumpulan dan pengolahan data
- LH.00.04 E. penetapan dalam bentuk NSPK
- LH.01 2. TATA LINGKUNGAN
- LH.01.00 A. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 1) Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - a) Dokumentasi Inventarisasi
 - b) Pedoman Inventarisasi
 - c) Penetapan Ekoregion
 - d) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional
 - e) Pedoman Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
 - 2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
 - a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam
 - b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam
- LH.01.01 B. Penerapan Kebijakan
 - 1) Evaluasi Penerapan
 - 2) Perencanaan Lingkungan Hidup
- LH.01.02 C. Ekonomi Lingkungan
 - 1) Perencanaan
 - a) Valuasi Ekonomi
 - b) Internalisasi Lingkungan
 - 2) Insentif dan Pendanaan Lingkungan
- LH.01.03 D. Dampak Lingkungan
 - 1) Bimbingan teknis Dampak Lingkungan
 - 2) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan
 - a) Penilaian dokumen lingkungan
 - b) Pemeriksaan dokumen lingkungan
 - 3) Evaluasi dan Tindak Lanjut
 - a) Evaluasi

- b) Tindak Lanjut
- LH.02
LH.02.00
3. PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
- A. Pemantauan dan Pengawasan
- 1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa
 - a) Industri Kimia
 - b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin
 - c) Aneka Industri
 - d) Prasarana dan Jasa
 - 2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas
 - 3) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
 - a) Peternakan dan Perikanan
 - b) Perkebunan
 - c) Kehutanan dan Holtikultura
 - d) Usaha Skala Kecil
 - 4) Udara Sumber Bergerak
 - a) Transportasi Air dan Udara
 - b) Transportasi Darat
 - c) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat
- LH.02.01
- B. Evaluasi dan Pengembangan
- 1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa
 - a) Industri Kimia
 - b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin
 - c) Aneka Industri
 - d) Prasarana dan Jasa
 - 2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas
 - 3) Agro Industri dan Usaha Skala kecil
 - a) Peternakan dan Perikanan
 - b) Perkebunan
 - c) Kehutanan dan Holtikultura
 - d) Usaha Skala Kecil
 - 4) Udara Sumber Bergerak
 - a) Transportasi Darat, Air dan Udara
 - b) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat
- LH.03
LH.03.00
4. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN
- A. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan
- 1) Pengembangan
 - a) Sumber Daya Genetik
 - b) Keamanan Hayati
 - 2) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
 - 3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik
 - a) Pengembangan dan Pemanfaatan
 - b) Pemantauan dan Pengawasan
 - 4) Keamanan Hayati
 - a) Pengembangan dan Pengelolaan
 - b) Pemantauan dan Pengawasan
 - 5) Pengendalian Kerusakan Lahan
 - a) Lahan Budidaya
 - b) Lahan Non Budidaya
- LH.03.01
- B. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
- 1) Kerusakan Ekosistem
 - a) Sungai

- b) Kerusakan Ekosistem
 - c) Pengelolaan Kualitas Air
 - 2) Danau
 - a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem
 - b) Pengelolaan Kualitas Air
 - 3) Rawa
 - a) Rawa gambut
 - b) Rawa bukan gambut
 - LH.03.02 C. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut
 - 1) Pencegahan
 - 2) Penanggulangan
 - 3) Pemulihan
 - LH.03.03 D. Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer
 - 1) Perangkat Mitigasi
 - 2) Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
 - a) Laporan inventarisasi GRK nasional
 - b) Data bidang inventarisasi GRK
 - 3) Pengendalian Bahan Perusak Ozon
 - a) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon
 - b) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon
 - LH.03.03 E. Adaptasi Perubahan Iklim
 - 1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim
 - a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim
 - b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim
 - 2) Kerentanan Perubahan Iklim
 - a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim
 - b) Media kliring kerentanan perubahan iklim
- LH.04
- LH.04.00 5. PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH
 - A. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 1) Registrasi dan notifikasi
 - a) Registrasi
 - b) Notifikasi
 - 2) Pemantauan
 - a) Sektor industri
 - b) Sektor non industri
 - 3) Evaluasi dan Tindak Lanjut
 - a) Sektor industri
 - b) Sektor non industri
 - LH.04.01 B. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 1) Pengumpulan dan Pemanfaatan
 - 2) Pengangkutan dan Pengolahan
 - 3) Penimbunan dan Dumping
 - 4) Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas
 - a) Notifikasi
 - b) Rekomendasi Limbah Lintas Batas
 - LH.04.02 C. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
 - 1) Pemantauan
 - a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas
 - b) Manufaktur

- c) Agroindustri
 - d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi
 - 2) Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi
 - a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas
 - b) Manufaktur
 - c) Agroindustri
 - d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi
 - LH.04.03 D. Pengelolaan Sampah
 - 1) Pembatasan Sampah
 - 2) Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
 - 3) Pembentukan Dewan Adipura
 - 4) Penetapan Pemenang Adipura
- LH.05
- LH.05.00 6. HUKUM LINGKUNGAN
 - A. Hukum Administrasi Lingkungan
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan
 - a) Pengelolaan Pengaduan
 - b) Pengembangan Pengaduan
 - 2) Penataan Hukum Administrasi Lingkungan
 - a) Penerapan hukum administrasi lingkungan
 - b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan
 - LH.05.01 B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
 - a) Administrasi Gugatan
 - b) Gugatan
 - 2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan
 - a) Kerugian Negara dan Masyarakat
 - b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - LH.05.02 C. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
 - 1) Penyidikan
 - a) Administrasi Penyidikan
 - b) Pelaksanaan Penyidikan
 - 2) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
 - a) Koordinasi penuntutan
 - b) Evaluasi dan tindak lanjut
 - 3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - LH.05.03 D. Perjanjian Internasional Lingkungan
 - 1) Pendapat Hukum Perjanjian Internasional
 - a) Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional
 - b) Tindak Lanjut Perjanjian Internasional
 - 2) Evaluasi Perjanjian Internasional
 - a) Evaluasi Perjanjian Internasional Pencemaran
 - b) Evaluasi Perjanjian Internasional Perusakan
 - LH.06.
 - LH.06.00 7. KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 - A. Komunikasi Lingkungan
 - 1) Pengembangan Komunikasi
 - a) Program Komunikasi
 - b) Evaluasi Komunikasi
 - 2) Publikasi dan Kampanye

- LH.06.01
 - B. Penguatan Inisiatif Masyarakat
 - 1) Komunitas Pendidikan Lingkungan
 - a) Pengembangan dan Bimbingan
 - b) Evaluasi
 - 2) Kearifan Lingkungan
 - a) Inventarisasi
 - b) Revitalisasi
- LH.06.02
 - C. Peningkatan Peran Masyarakat
 - 1) Masyarakat Perkotaan
 - a) Masyarakat Kawasan Permukiman
 - b) Masyarakat Kawasan Rentan
 - 2) Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
 - a) Masyarakat Petani
 - b) Masyarakat Nelayan
- LH.06.03
 - D. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat
 - 2) Organisasi Profesi dan Dunia Usaha
- LH.07.
 - 8. PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
- LH.07.00
 - A. Data dan Informasi Lingkungan
 - 1) Pengelolaan Data
 - a) Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - b) Manajemen Basis Data
 - 2) Pengelolaan Informasi
 - a) Analisis Data dan Penyajian Informasi
 - b) Perpustakaan
 - 3) Pengembangan Perangkat Lunak
 - a) Pengembangan Instrumen Layanan Informasi
 - b) Pengembangan Instrumen Analisis Data
 - 4) Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan
 - a) Pengembangan Sistem Jaringan
 - b) Pemeliharaan Jaringan
- LH.07.01
 - B. Kelembagaan Lingkungan
 - 1) Kelembagaan dan Tata Laksana
 - a) Pengembangan Kelembagaan
 - b) Tata Laksana
 - 2) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
 - a) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi
 - b) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota
- LH.07.02
 - C. Standarisasi dan Teknologi
 - 1) Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan
 - a) Perangkat Manajemen Lingkungan
 - b) Pengujian Lingkungan
 - 2) Standardisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
 - a) Kompetensi Keahlian Lingkungan
 - b) Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
 - a) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan

- LH.07.03
 - b) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan
- D. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
 - 1) Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
 - a) Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - b) Kajian Kualitas Lingkungan
 - 2) Laboratorium Rujukan dan Pengujian
 - a) Laboratorium Rujukan
 - b) Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi

PB.

VII PENANGGULANGAN BENCANA

- PB.00
 - 1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - Meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi:
 - A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - B. Penyiapan kebijakan
 - C. Perumusan dan penyusunan bahan
 - D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
 - E. Penetapan dalam bentuk NSPK
 - 2. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
 - A. Pengurangan Resiko Bencana
 - 1) Pencegahan
 - a) Pengkajian Resiko
 - b) Pengelolaan Resiko
 - 2) Mitigasi
 - a) Mitigasi Struktur
 - b) Mitigasi Non Struktur
 - B. Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Peran Lembaga Usaha
 - a) Usaha Padat Modal
 - b) Usaha Padat Karya
 - 2) Peran Organisasi Sosial Masyarakat
 - a) Organisasi Internasional
 - b) Organisasi Sosial Masyarakat Nasional
 - 3) Peran Masyarakat
 - a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat
 - b) Peningkatan Ketahanan Masyarakat
 - C. Kesiapsiagaan
 - 1) Peringatan Dini
 - a) Pemaduan Sistem Jaringan
 - b) Pemantauan dan Peringatan
 - 2) Perencanaan Siaga
 - a) Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya
 - b) Penerapan Rencana Strategis
 - 3) Penyiapan Sumber Daya
 - a) Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya
 - b) Pengendalian
- PB.01
 - 1) PB.01.00
 - A. Pengurangan Resiko Bencana
 - 1) Pencegahan
 - a) Pengkajian Resiko
 - b) Pengelolaan Resiko
 - 2) Mitigasi
 - a) Mitigasi Struktur
 - b) Mitigasi Non Struktur
 - B. Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Peran Lembaga Usaha
 - a) Usaha Padat Modal
 - b) Usaha Padat Karya
 - 2) Peran Organisasi Sosial Masyarakat
 - a) Organisasi Internasional
 - b) Organisasi Sosial Masyarakat Nasional
 - 3) Peran Masyarakat
 - a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat
 - b) Peningkatan Ketahanan Masyarakat
 - C. Kesiapsiagaan
 - 1) Peringatan Dini
 - a) Pemaduan Sistem Jaringan
 - b) Pemantauan dan Peringatan
 - 2) Perencanaan Siaga
 - a) Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya
 - b) Penerapan Rencana Strategis
 - 3) Penyiapan Sumber Daya
 - a) Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya
 - b) Pengendalian
 - 2) PB.01.01
 - B. Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Peran Lembaga Usaha
 - a) Usaha Padat Modal
 - b) Usaha Padat Karya
 - 2) Peran Organisasi Sosial Masyarakat
 - a) Organisasi Internasional
 - b) Organisasi Sosial Masyarakat Nasional
 - 3) Peran Masyarakat
 - a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat
 - b) Peningkatan Ketahanan Masyarakat
 - 3) PB.01.02
 - C. Kesiapsiagaan
 - 1) Peringatan Dini
 - a) Pemaduan Sistem Jaringan
 - b) Pemantauan dan Peringatan
 - 2) Perencanaan Siaga
 - a) Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya
 - b) Penerapan Rencana Strategis
 - 3) Penyiapan Sumber Daya
 - a) Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya
 - b) Pengendalian
- PB.02
 - 1) PB.02.00
 - A. Tanggap Darurat
 - 1) Perencanaan Darurat
 - a) Pendataan Darurat
 - b) Perencanaan Operasi
 - 2) Pengendalian Operasi
 - a) Pengorganisasian Pos Komando
 - b) Sarana dan Prasarana Pos Komando

- 3) Penyelamatan dan Evakuasi
 - a) Penyelamatan
 - b) Evakuasi
- PB.02.01 B. Bantuan Darurat
 - 1) Bantuan Sandang Pangan
 - a) Bantuan Sandang
 - b) Bantuan Pangan
 - 2) Bantuan Kesehatan dan Air Bersih
 - a) Bantuan Kesehatan
 - b) Bantuan Air Bersih
 - 3) Bantuan Hunian Sementara
 - a) Pembangunan Hunian Sementara
 - b) Pendukung Hunian Sementara
- PB.02.02 C. Perbaikan Darurat
 - 1) Pembersihan Lingkungan
 - a) Penyiapan Peralatan
 - b) Angkutan
 - 2) Perbaikan Sarana Vital
 - a) Prasarana Sosial
 - b) Prasarana Ekonomi
 - 3) Pemantauan dan Pelaporan
 - a) Pemantauan
 - b) Pelaporan
- PB.03
- PB.03.00 4. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
 - A. Penilaian Kerusakan
 - 1) Inventarisasi Kerusakan
 - a) Inventarisasi Fisik
 - b) Inventarisasi Sosial Ekonomi
 - 2) Estimasi Pembiayaan
 - a) Estimasi Pembiayaan Pembangunan
 - b) Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi
 - PB.03.01 B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik
 - 1) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum
 - a) Rehabilitasi Fasilitas Umum
 - b) Rekonstruksi Fasilitas Umum
 - 2) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial
 - a) Rehabilitasi Fasilitas Sosial
 - b) Rekonstruksi Fasilitas Sosial
 - 3) Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan
 - a) Rehabilitasi Rekonstruksi Berat
 - b) Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan
 - PB.03.02 C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi
 - 1) Pemulihan dan Peningkatan Sosial
 - a) Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya
 - b) Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan
 - 2) Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi
 - a) Pemulihan Ekonomi
 - b) Peningkatan Ekonomi
 - PB.03.03 D. Penanganan Pengungsi
 - 1) Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi
 - a) Perlindungan Pengungsi
 - b) Pemberdayaan Pengungsi
 - 2) Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi
 - a) Kompensasi
 - b) Pengembalian hak
 - 3) Penempatan Pengungsi
 - a) Pemulangan dan Repatriasi

- b) Relokasi/Pengalihan
 - 5. LOGISTIK DAN PERALATAN
 - A. Logistik
 - 1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan
 - a) Analisis Kebutuhan
 - b) Pengadaan
 - 2) Penyimpanan dan Distribusi
 - a) Penyimpanan
 - b) Distribusi
 - B. Peralatan
 - 1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan
 - a) Analisis Kebutuhan
 - b) Pengadaan
 - 2) Penyimpanan dan Pemeliharaan
 - a) Penyimpanan
 - b) Pemeliharaan
 - 3) Pengerahan dan Distribusi
 - a) Pengerahan
 - b) Distribusi

KU. VIII KOPERASI DAN UKM

- KU.00
 - 1. KEBIJAKAN
 - Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya KUKM, Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Pengembangan SDM, Perjanjian Kerja Sama, Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan
 - A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - B. Penyiapan kebijakan
 - C. Perumusan kebijakan
 - D. Pemberian masukan dan dukungan kebijakan
 - E. Penetapan dalam bentuk NSPK
- 2. MONITORING DAN EVALUASI
- 3. KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
 - A. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
 - 1) Organisasi Koperasi dan UKM
 - 2) Badan Hukum Koperasi dan UKM
 - a) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi dan UKM
 - b) Evaluasi Badan Hukum Koperasi dan UKM
 - 3) Penelaahan Kasus Hukum Koperasi dan UKM
 - B. Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Penyusunan dan Evaluasi Peraturan-Undang-Undang Koperasi dan UKM
 - a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undang Koperasi
 - b) Evaluasi Peraturan-Undang-Undang Koperasi dan UKM
 - 2) Dokumentasi Peraturan Perundang-Undang-Undang
 - a) Produk Peraturan Perundang-Undang Pusat
 - b) Peraturan Daerah
 - C. Tata laksana Koperasi dan UKM
 - 1) Tata laksana Koperasi
 - a) Tata laksana Koperasi Primer
 - b) Tata laksana Koperasi Sekunder
 - 2) Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah

- a) Tata laksana Usaha Kecil
 - b) Tata laksana Usaha Mengah
 - 3) Klasifikasi Koperasi dan UKM
 - D. Keanggotaan Koperasi
 - 1) Partisipasi Usaha dan Permodalan
 - 2) Partisipasi Pengawasan
 - a) Rapat Anggota
 - b) Pengawasan
 - 3) Pengembangan Anggota
 - a) Kaderisasi
 - b) Penyuluhan
 - KU.02.04 E. Pengendalian dan Akuntabilitas
 - 1) Pengendalian
 - a) Pengendalian Intern
 - b) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian
 - 2) Bidang Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit
 - 3) Monitoring dan Evaluasi
 - a) Monitoring
 - b) Evaluasi
- KU.03 4 PEMBIAYAAN
- KU.03.00 A. Program Pendanaan Koperasi dan UKM
 - 1) Program Pendanaan Jangka Pendek
 - 2) Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang
 - 3) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir
- KU.03.01 B. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
 - 1) Pengembangan dan Pengendalian KSP
 - a) Pengembangan Kelembagaan KSP
 - b) Pengendalian Kelembagaan KSP
 - 2) Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi
 - a) Pengembangan USP Koperasi
 - b) Pengendalian USP Koperasi
 - 3) Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM
 - a) Pengembangan USP-LKM
 - b) Pengendalian USP-LKM
- KU.03.02 C. Urusan Permodalan
 - 1) Pengembangan Permodalan Sendiri Koperasi dan UKM
 - 2) Pengembangan Permodalan Luar
 - a) Permodalan Bank
 - b) Permodalan Non Bank
 - 3) Pengembangan Kredit Program
 - a) Kredit Program Bank
 - b) Kredit Program Non Bank
- KU.03.03 D. Asuransi dan Jasa Keuangan
 - 1) Asuransi Koperasi dan UKM
 - 2) Perpajakan Koperasi dan UKM
 - 3) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial
 - a) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank
 - b) Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank
- KU.03.04 E. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
 - 1) Lembaga Pembiayaan
 - a) Modal Ventura
 - b) Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang

- 2) Penjaminan Kredit
 - a) Penjaminan
 - b) Asuransi Kredit
- 3) Pasar Modal
 - a) Obligasi
 - b) Modal Penyertaan
- KU.03.05 F. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
- KU.04 5 PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA
- KU.04.00 A. Perdagangan Dalam Negeri
 - 1) Pengadaan Sektor Formal dan Informal
 - 2) Distribusi Sektor Formal dan Informal
 - 3) Pengembangan Sektor Formal dan Informal
- KU.04.01 B. Ekspor dan Impor
 - 1) Ekspor
 - 2) Impor
 - 3) Hubungan Perdagangan Internasional
Hubungan Perdagangan Multilateral, Regional,
dan Bilateral
- KU.04.02 C. Sarana dan Prasarana Pemasaran
 - 1) Sarana
 - a) Pengembangan Pasar Tradisional
 - b) Pengembangan Sentra Pemasaran
 - 2) Prasarana
 - a) Lembaga Perantara
 - b) Fasilitasi HAKI
 - 3) Pengembangan Potensi Pemasaran
 - a) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi
 - b) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM
- KU.04.03 D. Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi dan UKM
 - 1) Kemitraan
 - 2) Jaringan Usaha
 - 3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan
- KU.04.04 E. Informasi dan Publikasi Bisnis Koperasi dan UKM
 - 1) Pengumpulan Informasi
 - 2) Pengolahan Informasi
 - 3) Publikasi dan Promosi
- KU.04.05 F. Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan
UKM
- KU.05. 6 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- KU.05.00 A. Pengembangan Kewirausahaan
 - 1) Lembaga Kewirausahaan
 - a) Pengembangan Jaringan Kewirausahaan
 - b) Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan
 - 2) Penumbuhan Kewirausahaan
 - a) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan
 - b) Evaluasi Kewirausahaan
 - 3) Sosialisasi Kewirausahaan
 - a) Perangkat Lunak
 - b) Promosi Kewirausahaan
- KU.05.01 B. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
 - 1) Diklat Formal dan Informal
 - a) Diklat Formal
 - b) Diklat Informal
 - 2) Diklat Non Formal
 - a) Perangkat Lunak
 - b) Sarana dan Prasarana Diklat

- 3) Kerjasama Lembaga Diklat
 - a) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah
 - b) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah
- KU.05.02 C. Peran Serta Masyarakat
 - 1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM
 - 2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM
 - 3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi dan UKM
- KU.05.03 D. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
 - 1) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Non Pemerintah
- KU.05.04 E. Advokasi
 - 1) Advokasi Organisasi dan Manajemen
 - 2) Advokasi Kemitraan dan Teknologi
 - 3) Advokasi Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Kajian Penerapan
 - b) Sosialisasi Perundang-Undangan
- KU.06
- KU.06.00 7 PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA
 - A. Produktifitas dan Mutu
 - 1) Produktifitas
 - a) Inkubator Teknologi
 - b) Pengembangan Klaster
 - 2) Peningkatan Mutu
 - a) Disain
 - b) Standarisasi
 - 3) Sertifikasi, Label dan Merk Produk
 - KU.06.01 B. Restrukturisasi Usaha
 - 1) Restrukturisasi Manajemen Koperasi dan UKM
 - 2) Restrukturisasi Pendanaan Koperasi dan UKM
 - 3) Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi dan UKM
 - KU.06.02 C. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
 - 1) Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
 - a) Asosiasi dan Manajemen LPB
 - b) Akreditasi LPB
 - 2) Pengembangan Bisnis LPB
 - a) Peningkatan Kerja Sama LPB
 - b) Kerja Sama Layanan LPB
 - 3) Pengembangan Jaringan LPB
 - a) Kerja Sama Kelembagaan LPB
 - b) Kerja Sama Sarana dan Teknologi
 - KU.06.03 D. Fasilitasi Investasi UKMK
 - 1) Investasi Klaster UKMK
 - a) Fasilitasi Investasi UKMK Agro Bisnis
 - b) Fasilitasi Investasi UKMK Non Agro Bisnis
 - 2) Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha
 - a) Pengembangan Pangan
 - b) Pengembangan Non Pangan
 - 3) Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK
 - a) Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi

- b) Fasilitasi Investasi Usaha
UKM
- KU.06.04 E. Pengembangan Sistem Bisnis
 - 1) Fasilitasi Transaksi
 - a) Dalam Negeri
 - b) Luar Negeri
 - 2) Kerja Sama Usaha
 - a) Pertukaran Koperasi
 - b) Pertukaran UKM
 - 3) Jaringan Komunikasi Bisnis
 - a) Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis
 - b) Komunikasi Bisnis
- KU.07.
KU.07.00 8 PENGKAJIAN SUMBER DAYA KOPERASI DAN UKM
 - A. Penelitian Koperasi
 - 1) Perencanaan dan Pengendalian
 - a) Perencanaan
 - b) Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Penyelenggaraan
 - a) Kelembagaan Koperasi
 - b) Bisnis Koperasi
 - 3) Tata Laksana Penelitian
 - a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi
 - b) Sarana dan Prasarana
 - KU.07.01 B. Penelitian UKM
 - 1) Perencanaan dan Pengendalian
 - a) Perencanaan
 - b) Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Penyelenggaraan
 - a) Kelembagaan UKM
 - b) Bisnis UKM
 - 3) Tata Laksana Penelitian
 - a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi
 - b) Sarana dan Prasarana
 - KU.07.02 C. Penelitian Sumber Daya
 - 1) Perencanaan dan Pengendalian
 - a) Perencanaan
 - b) Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Penyelenggaraan
 - a) Sumber Daya Manusia
 - b) Pembiayaan
 - 3) Tata Laksana Penelitian
 - a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi
 - b) Sarana dan Prasarana
 - KU.07.03 D. Pengembangan Perkaderan UMK
 - 1) Penyuluhan
 - a) Penyelenggaraan
 - b) Materi Penyuluhan
 - 2) Perkaderan
 - a) Penilaian
 - b) Pengembangan
 - 3) Kerja Sama dan Jaringan
 - a) Lembaga Pemerintah
 - b) Lembaga Non Pemerintah
 - KU.08 9 KERJASAMA INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA

- PK. IX PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
- PK.00 1. KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN
- PK.00.00 A. Meliputi kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas, dan pendidikan tinggi.
- 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - 2) Penyiapan bahan
 - 3) Perumusan kebijakan
 - 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
 - 5) Penetapan dalam bentuk NSPK
 - 6) Perumusan dan penerapan standar
- PK.00.01 B. MoU (*Memorandum of Understanding*)
- PK.01. 2. KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN
- PK.01.00 A. Pengkajian dan pengusulan penetapan
- PK.01.01 B. Penyiapan bahan
- PK.01.02 C. Perumusan penetapan
- PK.01.03 D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan
- PK.01.04 E. Penetapan dalam bentuk keputusan
- PK.02 3. PEMBINAAN PENDIDIKAN
- PK.02.00 A. Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal
- 1) PAUD
 - a) Bahan ajar Alat permainan edukatif
 - b) Pelatihan
 - c) *Block Grant*
 - d) Sosialisasi
 - e) Peringatan hari anak nasional
 - 2) Pendidikan masyarakat
 - a) Penyelenggaraan program
 - Bahan ajar
 - Penyusunan majalah
 - b) Pemberian bantuan sosial
 - Penilaian proposal
 - Pemberian bansos
 - c) Pembinaan program
 - Temu koordinasi
 - Bintek program/pendampingan
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan
 - d) Lomba, penghargaan, dan anugerah
 - e) Peringatan hari anak internasional
 - f) Pameran/publikasi/sosialisasi
 - 3) Pendidikan Kesetaraan (paket A, B, C)
 - 4) Kursus dan pelatihan
 - a) Penyelenggaraan program
 - Uji kompetensi (akreditasi)
 - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP)
 - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan
 - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra
 - b) Pemberian bantuan sosial
 - c) Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya
 - d) Standar kursus dan pelatihan

- Kurikulum
 - Bahan ajar
 - e) Lomba lembaga kursus berprestasi
 - f) Publikasi dan promosi kursus
 - g) Sertifikasi
 - 5) Pendidik dan tenaga kependidikan
 - a) Bahan ajar
 - b) *Block grant*
 - c) Sosialisasi (modul)
 - d) Data pendidik dan tenaga pendidik
- PK.02.01 B. Pendidikan dasar
- 1) Sekolah dasar
 - a) Kurikulum
 - b) Bahan ajar
 - c) Pelatihan
 - d) *Block grant*
 - e) Bimbingan teknis/sosialisasi
 - f) Lomba, sayembara, dan festival
 - g) Bantuan operasional sekolah [BOS]
 - h) Bantuan siswa miskin
 - 2) Sekolah menengah pertama
 - a) Kurikulum
 - b) Bahan ajar
 - c) Pelatihan
 - d) *Block grant*
 - e) Bimbingan teknis/sosialisasi
 - f) Lomba, sayembara, dan festival
 - g) Bantuan operasional sekolah [BOS]
 - h) Bantuan siswa miskin
 - 3) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK
 - a) Bahan ajar
 - b) Petunjuk teknis
 - c) *Block grant*
 - d) Sosialisasi
 - e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore
 - f) Kurikulum/bahan pembelajaran
 - g) Alat bantu pembelajaran
 - h) Pendataan
 - i) Kelembagaan
 - Unit kesehatan sekolah
 - Pendidikan jasmani adaptif
 - Pendidikan inklusi
 - *Block grant*
 - Bimbingan teknis/sosialisasi
 - Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore
 - 4) Pendidik dan tenaga pendidik
 - a) Pendataan dan pemetaan
 - b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik
 - c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)
 - d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah
 - e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan

- f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan
 - g) *Block grant*
 - h) Bimbingan teknis/sosialisasi
- PK.02.02 C. Pendidikan menengah
- 1) Sekolah menengah atas
 - a) Kurikulum
 - b) Bahan ajar
 - c) Pelatihan
 - d) *Block Grant*
 - e) Bimbingan teknis/sosialisasi
 - f) Lomba, sayembara, dan festival
 - g) Bantuan operasional sekolah [BOS]
 - h) Bantuan siswa miskin
 - 2) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK
 - a) Bahan ajar
 - b) Petunjuk teknis
 - c) *Block grant*
 - d) Sosialisasi
 - e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore
 - f) Kurikulum/bahan pembelajaran
 - g) Alat bantu pembelajaran
 - h) Pendataan
 - i) Kelembagaan
 - Unit kesehatan sekolah
 - Pendidikan jasmani adaptif
 - Pendidikan inklusi
 - *Block grant*
 - Bimbingan teknis/sosialisasi
 - Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore
 - 3) Pendidik dan tenaga pendidik
 - a) Pendataan dan pemetaan
 - b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik
 - c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)
 - d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah
 - e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
 - f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan
 - g) *Block grant*
 - h) Bimbingan teknis/sosialisasi
- PK.03
PK.03.00 4. KEBUDAYAAN
- A. Pelestarian cagar budaya dan permuseuman
 - 1) Registrasi nasional
 - a) Pendaftaran dan penetapan
 - b) Pengelolaan data
 - 2) Pelindungan
 - a) Perizinan dan pengamanan
 - b) Pemeliharaan dan pemugaran
 - 3) Pengembangan dan pemanfaatan
 - a) Pengembangan
 - b) Pemanfaatan

- 4) Eksplorasi dan dokumentasi
 - a) Eksplorasi cagar budaya
 - b) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum
- PK.03.01 B. Pembinaan kesenian dan perfilman
- 1) Pembinaan seni pertunjukan
 - a) Seni pertunjukan tradisional
 - b) Seni pertunjukan nontradisional
 - 2) Pembinaan seni rupa
 - a) Seni rupa murni
 - b) Seni rupa terapan
 - 3) Pembinaan literasi dan apresiasi film
 - a) Literasi
 - b) Apresiasi
 - 4) Dokumentasi dan publikasi
 - a) Dokumentasi seni dan film
 - b) Publikasi seni dan film
- PK.03.02 C. Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi
- 1) Kelembagaan dan kepercayaan
 - a) Pemberdayaan lembaga
 - b) Hubungan antar lembaga
 - 2) Komunitas kepercayaan
 - a) Komunitas adat
 - b) Upacara adat
 - 3) Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
 - a) Pengetahuan tradisional
 - b) Ekspresi budaya tradisional
 - 4) Lingkungan budaya dan pranata sosial
 - a) Lingkungan budaya
 - b) Pranata sosial
- PK.03.03 D. Sejarah dan nilai budaya
- 1) Sejarah
 - a) Penggalian sumber sejarah
 - b) Penulisan sejarah
 - 2) Pemetaan nilai
 - a) Pemetaan
 - b) Klasifikasi
 - 3) Verifikasi dan perumusan nilai
 - a) Verifikasi nilai
 - b) Perumusan nilai
 - 4) Dokumentasi dan publikasi
 - a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya
 - b) Publikasi sejarah dan nilai budaya
- PK.03.04 E. Internalisasi nilai dan diplomasi budaya
- 1) Internalisasi nilai budaya
 - a) Pengemasan nilai budaya
 - b) Penanaman nilai budaya
 - 2) Kekayaan budaya
 - a) Pencatatan kekayaan budaya
 - b) Penetapan kekayaan budaya
 - 3) Warisan budaya nasional dan dunia
 - a) Warisan budaya benda
 - b) Warisan budaya takbenda
 - 4) Diplomasi budaya
 - a) Diplomasi dalam negeri

- b) Diplomasi luar negeri
- PK.04 5. KURIKULUM
- PK.04.00 A. Pembinaan kurikulum
- PK.04.01 B. Hasil evaluasi penyusunan kurikulum
- PK.05 6 PENILAIAN PENDIDIKAN
- PK.05.00 A. Penilaian akademik
- PK.05.01 B. Penilaian non akademik
- PK.05.02 C. Analisis dan sistem informasi penilaian
- PK.06 7 PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
- PK.06.00 A. Pengembangan profesi pendidik
 - 1) Peningkatan kompetensi
 - a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal
 - b) Pengembangan profesi pendidikan dasar
 - c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah
 - 2) Sertifikasi
 - a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal
 - b) Pengembangan profesi pendidikan dasar
 - c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah
 - d) Pengembangan profesi pendidik pendidikan tinggi (dosen)
- PK.06.01 B. Pengembangan tenaga kependidikan
 - 1) Program
 - a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik
 - b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai
 - 2) Evaluasi
 - a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik
 - b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai
- PK.06.02 C. Pengembangan SDM kebudayaan
 - 1) Program
 - a) Peningkatan kompetensi
 - b) Sertifikasi
 - 2) Evaluasi
 - a) Peningkatan kompetensi
 - b) Sertifikasi
- PK.06.03 D. Penjaminan mutu pendidikan
 - 1) Pemetaan mutu
 - a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal
 - b) Penjaminan mutu pendidikan dasar
 - c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
 - 2) Sistem informasi
 - a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal
 - b) Penjaminan mutu pendidikan dasar
 - c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
- PK.06.04 E. Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman/Proposa

| | | |
|------------|----------|--|
| | | 1/TOR/KAK |
| PK.06.05 | F. | Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi |
| PK.06.06 | I. | Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi |
| PK.06.07 | J. | Penyaluran <i>block grant</i> pascabencana |
| PK.06.08 | K. | Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional |
| PK.07. | 8 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN |
| PK.07.00 | A. | Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film 1) Perancangan dan produksi 2) Penyiaran dan pengendalian |
| PK.07.01 | B. | Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan <i>web</i> 1) Perancangan dan produksi 2) Aplikasi dan pengendalian |
| PK.07.02 | C. | Pengembangan jejaring 1) Pengkajian dan perancangan 2) Pemeliharaan dan pengendalian |
| PK.08 | 9 | DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN |
| PK.08.00 | A. | Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 1) Validasi dan integrasi data peserta didik 2) Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan |
| PK.08.01 | B. | Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran 1) Validasi dan integrasi data satuan pendidikan 2) Validasi dan integrasi data proses pembelajaran |
| PK.08.02 | C. | Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik 1) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak 2) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah 3) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan tinggi |
| PK.09. | 10 | ARKEOLOGI |
| PK.09.00 | A. | Program dan kerja sama penelitian 1) Program 2) Kerjasama |
| PK.09.00 | B. | Data dan informasi penelitian 1) Data 2) Informasi |
| PK.10 | 11 | MONITORING DAN EVALUASI |
| SS. | X | SOSIAL |
| SS.00 | 1 | Kebijakan Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. |
| SS.00.00 | 1 | Pengkajian dan pengusulan kebijakan |
| SS.00.01 | 2 | Penyiapan kebijakan |
| SS.00.02 | 3 | Perumusan kebijakan |
| SS.00.03 | 4 | Masukan dan dukungan kebijakan |
| SS.00.04 | 5 | Penetapan NSPK |
| SS.01 | 2 | Rehabilitasi Sosial |
| SS.01.00 | A. | Kesejahteraan sosial anak 1) Kesejahteraan Sosial Anak Balita |

- a. Pengangkatan Anak
 - b. Pengasuhan Anak Balita
 - 2 Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
 - a. Pengasuhan Anak dalam Keluarga
 - b. Pengasuhan Anak dalam Lembaga
 - 3 Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum
 - a. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum
 - b. Pengembangan Remaja
 - 4 Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan
 - a. Kelembagaan dan Penguatan Keluarga
 - b. Aksesibilitas Anak dengan Kecacatan
 - 5 Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
 - a. Kelembagaan Perlindungan Anak
 - b. Advokasi dan Perlindungan Khusus
- SS.01.01 B Rehabilitasi Sosial
- 1 Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
 - a. Dalam Panti
 - b. Luar Panti
 - 2 Kelembagaan dan advokasi sosial
 - 3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
- SS.01.02 C Rehabilitasi sosial tuna sosial
- 1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
 - 2 Tuna susila dan korban *trafficking* perempuan
 - 3 Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan
 - a. Penyiapan
 - b. Reintegrasi
 - 4 Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas
- SS.01.03 D Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 1 Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat
 - 2 Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi
- SS.01.04 E Pelayanan sosial lanjut usia
- 1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti
 - 2 Pengembangan kelembagaan
 - a. Pembinaan Lembaga
 - b. Kerjasama Lembaga
 - 3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
- SS.02 3 Perlindungan dan Jaminan Sosial
- SS.02.00 A Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial
- 1 Bimbingan dan standardisasi
 - 2 Perizinan dan pengumpulan
- SS.02.01 B Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran
- 1 Perlindungan sosial korban tindak kekerasan
 - a. Pemulihan sosial
 - b. Pemulangan dan Reintegrasi
 - 2 Perlindungan sosial pekerja migran
 - a. Penampungan dan pemulihan sosial
 - b. Pemulangan dan Reintegrasi

- 3 Evaluasi dan pelaporan
 - a Kerjasama
 - b Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- SS.02.02 C Perlindungan sosial korban bencana sosial
 - 1 Ketahanan sosial masyarakat
 - a Keserasian sosial
 - b Penguatan Sumber Daya
 - 2 Tanggap Darurat
 - a Bantuan Darurat
 - b Advokasi sosial
 - 3 Pemulihan sosial
 - a Penguatan sosial
 - b Reintegrasi sosial
 - 4 Kerja sama
 - a Kerja sama pemerintah
 - b Kerja sama non pemerintah
- SS.02.03 D Perlindungan sosial korban bencana alam
 - 1 Kesiapsiagaan dan mitigasi
 - 2 Tanggap darurat
 - a Bantuan darurat
 - b Advokasi Sosial
 - 3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial
 - 4 Kerja sama
 - a Kerja sama pemerintah
 - b Kerja sama Non Pemerintah
- SS.02.04 E Jaminan sosial
 - 1 Seleksi dan verifikasi
 - 2 Asuransi kesejahteraan sosial
 - a Kelembagaan
 - b Pengelolaan premi
 - 3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan
 - a Pendampingan
 - b Penyaluran
 - 4 Kerja sama
 - a Kerja sama pemerintah
 - b Kerja sama Non Pemerintah
- SS.03 4 Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
- SS.03.00 A Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan social
 - 1 Ketahanan keluarga
 - a Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga
 - b Konsultasi dan advokasi keluarga
 - 2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
 - 3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
 - 4 Kemitraan dunia usaha
 - a Kerja sama
 - b Bimbingan Sosial
 - 5 Karang Taruna
 - a Kelembagaan
 - b Pengembangan Kapasitas
- SS.03.01 B Pemberdayaan komunitas adat terpencil
 - 1 Persiapan pemberdayaan
 - a Identifikasi
 - b Analisis
 - 2 Pemberdayaan sumber daya manusia
 - a Pemberdayaan sumber daya manusia adat

- terpencil
 - b Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil
 - 3 Penggalian dan pengembangan potensi
 - a Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan
 - b Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan
 - 4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
 - a Keserasian sosial
 - b penguatan sosial
 - 5 Kerja sama kelembagaan
 - a Kerja sama kelembagaan
 - b Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- SS.03.02 C Penanggulangan kemiskinan perkotaan
- 1 Identifikasi dan analisis
 - 2 Pengembangan kapasitas
 - a Pengembangan kapasitas sumber daya manusia
 - b Pengembangan kapasitas usaha
 - 3 Penataan sosial lingkungan kumuh
 - a Bimbingan sosial
 - b Pengembangan lingkungan sosial
 - 4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
 - a Advokasi sosial
 - b Pengembangan aksesibilitas
- SS.03.03 D Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
- 1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
 - a Pengangkatan
 - b Penghargaan
 - c Kesejahteraan
 - 2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
 - a Identifikasi
 - b Pendayagunaan
 - 3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
 - a penggalian nilai
 - b Pelestarian nilai
 - 4 Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional
 - a Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama
 - b Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional
- KT. XI KETENAGAKERJAAN**
- KT.00 1 PERUMUSAN KEBIJAKAN
- Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- KT.00.00 - Pengkajian dan pengusulan kebijakan
- KT.00.01 - Penyiapan bahan
- KT.00.02 - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan

- KT.00.03 - Pengumpulan dan pengolahan data
- KT.00.04 - Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)
- KT.01 2 PERENCANAAN TENAGA KERJA
- KT.01.00 A Perencanaan Tenaga Kerja Makro
 - 1 Perencanaan Tenaga Kerja Nasional
 - a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional
 - b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional
 - c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional
 - 2 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
 - a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
 - b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
 - c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
- KT.01.01 B Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
 - 1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
 - a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
 - b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
 - c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
 - 2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
 - a Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta
 - b Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
 - c Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
- KT.02 3 PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
- KT.02.00 A Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
 - 1 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
 - a Penerapan Standar Kompetensi
 - b Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi
 - c Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
 - 1) Program Pelatihan Ketenagakerjaan
 - 2) Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan
 - d Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 1) Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 2) Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
 - e Pengembangan Program Pelatihan Ketrasmigrasian
 - 1) Program Pelatihan Ketrasmigrasian
 - 2) Penyusunan Materi Pelatihan Ketrasmigrasian

- 2 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
 - a Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
 - 1) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
 - 2) Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan
 - b Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
 - 1) Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
 - 2) Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas
 - c Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
 - 1) Standar Mutu Lembaga Pelatihan
 - 2) Bimbingan Penerapan Standar Mutu
 - d Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
 - 1) Sistem Pendanaan Pelatihan
 - 2) Kerjasama Antar Lembaga
- 3 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
 - a Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
 - 1) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
 - 2) Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
 - b Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
 - 1) Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
 - 2) Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
 - c Tenaga Pelatihan
 - 1) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan
 - 2) Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan
 - d Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
 - 1) Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
 - 2) Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
- 4 Bina Pemagangan
 - a Pemagangan Dalam Negeri
 - 1) Program Pemagangan Dalam Negeri
 - 2) Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri
 - b Pemagangan Luar Negeri
 - 1) Program Pemagangan Luar Negeri
 - 2) Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri
 - c Perizinan dan Advokasi Pemagangan
 - 1) Perizinan dan Rekomendasi
 - 2) Advokasi dan Perlindungan
 - d Promosi dan Jenjang Pemagangan
 - 1) Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan
 - 2) Pemagangan Jejaring Pemagangan
- 5 Produktivitas dan Kewirausahaan
 - a Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 1) Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 2) Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan

- Kewirausahaan
 - b Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
 - 1) Sistem dan Metode Produktivitas
 - 2) Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas
 - c Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
 - 1) Pengukuran Produktivitas
 - 2) Kajian Produktivitas
 - d Pengembangan Kewirausahaan
 - 1) Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
 - 2) Bimbingan Konsultasi
- KT.03
KT.03.00
- 4 PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
- A Pengembangan Pasar Kerja
- 1 Informasi Pasar Kerja
 - a Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri
 - b Informasi Pasar Kerja Luar Negeri
 - 2 Analisis Pasar Kerja
 - a Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri
 - b Analisis Pasar Kerja Luar Negeri
 - 3 Bursa Kerja
 - a Bursa Kerja Dalam Negeri
 - b Bursa Kerja Luar Negeri
 - 4 Analisis Jabatan
 - a Analisis dan Informasi Jabatan
 - b Pengembangan Sistem Analisis Jabatan
- KT.03.01
- B Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
- 1 Antar Kerja
 - a Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) /Antar Kerja Lokal (AKL)
 - b Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja
 - 2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
 - a Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita
 - b Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia
 - 3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
 - a Penyuluhan Jabatan
 - b Bimbingan Jabatan
 - 4 Pemberdayaan Pengantar Kerja
 - a Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja
 - b Kerjasama antar Lembaga
- KT.03.02
- C Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
- 1 Kelembagaan Penempatan
 - a Perizinan Kelembagaan
 - b Evaluasi Kinerja
 - 2 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
 - a Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI
 - b Fasilitasi Penyediaan TKI
 - 3 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
 - a Advokasi dan Kepulangan
 - b Sarana dan Perlindungan
 - 4 Kerjasama Internasional
 - a Kerjasama Bilateral
 - b Kerjasama Regional dan Multilateral

- KT.03.03 D Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
- 1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal
 - a Tenaga Kerja Mandiri
 - b Tenaga Kerja Sektor Informal
 - 2 Pengembangan Padat Karya
 - a Padat Karya Perdesaan
 - b Padat Karya Perkotaan
 - 3 Terapan Teknologi Tepat Guna
 - a Pengembangan Teknologi Tepat Guna
 - b Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna
 - 4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
 - a Pemberdayaan Pendampingan
 - b Kerjasama Antar Lembaga
- KT.03.04 E Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 1 Analisis dan Perizinan Sektor Industri
 - a Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri
 - b Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri
 - 2 Analisis dan Perizinan Sektor Jasa
 - a Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa
 - b Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa
 - 3 Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan
 - a Pengendalian
 - b Kerjasama Kelembagaan
- KT.03.05 F Standardisasi Profesi
- 1 Sistem Informasi dan Registrasi
 - a Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi
 - b Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja
 - 2 Pembakuan Akreditasi
 - a Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi
 - b Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan
- KT.04 5 PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
- KT.04.00 A Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
- 1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
 - a Peraturan Perusahaan
 - b Perjanjian Kerja Bersama
 - 2 Perjanjian Kerja
 - 3 Kesejahteraan Pekerja
 - a Program Kesejahteraan
 - b Fasilitas Kesejahteraan
 - 4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
 - a Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja
 - b Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja
- KT.04.01 B Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan

- Industrial
- 1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
 - a Organisasi Pekerja
 - b Organisasi Pengusaha
 - 2 Kelembagaan Hubungan Industrial
 - a Lembaga Kerjasama BIPARTIT
 - b Lembaga Kerjasama TRIPARTIT
 - 3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial
 - a Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial
 - b Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial
- KT.04.02 C Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 1 Pengupahan
 - a Penerapan Standar Pengupahan
 - b Pengurusan Pengupahan
 - 2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
 - a Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja
 - b Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja
- KT.04.03 D Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
- 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
 - a Pencegahan Dini
 - b Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan
 - 2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - a Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial
 - b Evaluasi dan Pelaporan
 - 3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - a Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan Industrial
 - b Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan
- KT.05
KT.05.00 6 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
- A Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 1 Pengawasan Norma Kerja
 - a Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat
 - b Pengawasan Norma Pengupahan
 - 2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
 - a Pengawasan Norma Hubungan Kerja
 - b Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat
 - 3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
 - a Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri
 - b Pengawasan Norma Penempatan dan

- Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri
- c Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek
- KT.05.01 B Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
 - 1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
 - a Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi
 - b Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
 - 2 Pengawasan Norma Kerja Anak
 - a Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
 - b Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak
 - 3 Kerjasama Lintas Sektor
 - a Kerjasama Lintas Sektor Tenaga Kerja Perempuan
 - b Kerjasama Lintas Sektor Tenaga Kerja Anak
 - 4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
 - a Advokasi Tenaga Kerja Perempuan
 - b Advokasi Tenaga Kerja Anak
- KT.05.02 C Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
 - a Pengawasan Norma Mekanik
 - b Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan
 - 2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
 - a Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan
 - b Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
 - 3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
 - a Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja
 - b Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja
 - 4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
 - a Pengawasan Norma Lingkungan Kerja
 - b Pengawasan Norma Bahan Berbahaya
 - 5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
 - a Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3
 - b Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3
- KT.05.03 D Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
- KT.05.04 E Bina Penegakan Hukum
 - 1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
 - a Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
 - b Penindakan Norma Ketenagakerjaan
 - 2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
 - a Teknis Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
 - b Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
 - 3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - a Pemberdayaan PPNS
 - b Sarana dan Prasarana PPNS

- 4 Kerjasama Penegakan Hukum
 - a Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum
 - b Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan
- KT.06.
KT.06.00 7 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
 - A Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 1 Pengkajian K3
 - a Analisis dan Standardisasi bidang K3
 - b Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3
 - c Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3
 - 2 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
 - KT.06.01 B Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 1 SDM K3
 - a Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - b Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 2 Kompetensi K3
 - a Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - b Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - c Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - d Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

PD. XII PEMERINTAHAN DAERAH

- PD.00 A KEBIJAKAN
 - Kebijakan dan standarisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah.
 - PD.00.00 1. Pengkajian dan Pengusulan kebijakan
 - PD.00.01 2. Penyiapan Kebijakan
 - PD.00.02 3. Perumusan Kebijakan
 - PD.00.03 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
 - PD.00.04 5. MOU
- PD.01 B KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 - PD.01.00 1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - a. Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 1. penguatan ideologi negara
 - 2. implementasi ideologi negara
 - b. Wawasan Kebangsaan
 - 1. penguatan wawasan kebangsaan
 - 2. pembinaan dan sosialisasi
 - 3. implementasi
 - c. Bela Negara
 - 1. pendidikan bela negara
 - 2. pemberdayaan bela negara
 - d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
 - 1. penguatan nilai-nilai sejarah
 - 2. implementasi nilai-nilai sejarah
 - 3. penerbitan rekomendasi penelitian

- e. Pembauran dan Kewarganegaraan
 - 1. pembinaan pembauran kebangsaan
 - 2. pembinaan kewarganegaraan
- PD.01.01 2. Kewaspadaan Nasional
 - a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen Keamanan
 - b. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
 - c. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
 - 1. Pedoman Kewaspadaan Nasional
 - d. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
 - 1. pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing
 - 2. surat pemberitahuan penelitian orang asing
- PD.01.02 3. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama dan Kemasyarakatan
 - a. ketahanan Seni
 - 1. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian
 - 2. pelaksanaan dan perkembangan pelestarian kesenian
 - b. ketahanan Budaya
 - 1. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan
 - 2. pelaksanaan dan perkembangan nilai - nilai kebudayaan
 - c. Agama dan Kepercayaan
 - 1. fasilitasi
 - 2. data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
 - 3. pelaksanaan kerukunan Umat beragama dan kepercayaan
 - 4. pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan
 - 1. Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat
 - a. pendaftaran Ormas
 - b. database Ormas
 - 2. laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL
 - 3. evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi
 - 4. fasilitasi sengketa Ormas
 - 5. fasilitasi Ormas
 - e. Masalah Sosial Kemasyarakatan
 - 1. fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - 2. masalah sosial kemasyarakatan
- PD.01.03 4. Politik Dalam Negeri
 - a. Implementasi Kebijakan Politik
 - 1. Implementasi Kebijakan Politik
 - a. sosialisai dan publikasi *best practise* dan inovasi
 - 2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
 - b. fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
 - 1. Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat

- PD.02.02
3. Kawasan dan Pertanahan
- a. Kawasan Sumber Daya Alam
 - 1. fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian dan lingkungan
 - b. Kawasan Sumber Daya Buatan
 - 1. fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah pada kawasan perhubungan darat dan udara
 - c. Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas
 - 1. fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas
 - d. Pertanahan dan Kawasan Khusus
 - 1. penyelenggaraan urusan Pertanahan
 - 2. penyelesaian sengketa Pertanahan
 - 3. evaluasi penataan kawasan khusus
 - e. Kawasan Perairan dan kedirgantaraan
 - 1. fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah pada kawasan perairan dan kedirgantaraan
 - 2. fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan dan kedirgantaraan
- PD.02.03
- 4 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
- a. Identifikasi Potensi Bencana
 - 1. evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana
 - b. Organisasi Sistem dan Prosedur
 - 1. pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana
 - a. fasilitasi
 - _ database daerah rawan bencana
 - b. koordinasi
 - c. fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana
 - c. Sarana dan Prasarana
 - 1 evaluasi standarisasi aplikasi peralatan . penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - 2 evaluasi pengembangan informasi dan . teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana
- PD.03
- PD.03.00
- D OTONOMI DAERAH
- 1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - a. Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
 - 1. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
 - 2. penyusunan standar pelayanan minimal
- PD.03.01
- 2. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran
- PD.03.02
- 3. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah,

- DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga
- a. penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah
 - b. administrasi kepala daerah dan DPRD
 - c. penyiapan rumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan
 - d. hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD)
 - e. asosiasi daerah
- PD.03.03 4. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
- a. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah
 - c. pengembangan kapasitas daerah
- PD.04 E. BINA PEMBANGUNAN DAERAH
- PD.04.00 1. Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah
- PD.04.01 2. Pengembangn Wilayah
- a. penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah
 - b. penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah
 - c. penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah
 - d. Kawasan Strategis dan Andalan
 1. evaluasi pengembangan data
 2. pengembangan kawasan strategis dan andalan
 - e. Wilayah Tertinggal
 1. penyusunan data dan pemutahiran basis dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal
 2. penyususnanlaporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal
- PD.04.02 3. Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
- a. Penataan Ruang Wilayah
 1. evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah
 2. evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah
 3. implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
 - b. Penataan Ruang Kawasan
 - 1 evaluasi tata ruang kawasan
 - 2 pembinaan tata ruang kawasan
 - 3 implementasi
 - c. Konservasi dan Rehabilitasi
 1. evaluasi pelaksaan konservasi
 2. evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
 3. implementasi
 - d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air
 1. evaluasi pengembangan potensi sumber daya air
 2. evaluasi pemanfaatan sumber daya air
 3. implementasi
 - e. Pengendalian Lingkungan Hidup
 1. pengembangan instrumen kelembagaan

- lingkungan hidup
2. analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- PD.04.03 4. Pengembangan Ekonomi Daerah
- a. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
 - 1. identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah
 - 2. pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah
 - b. Promosi dan Investasi Daerah
 - 1. pelaksanaan promosi ekonomi daerah
 - 2. pelaksanaan investasi daerah
 - c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah
 - 1. pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah
 - 2. pelaksanaan perindustrian daerah
 - d. Kemitraan Usaha
 - 1. perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah
 - 2. pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah
 - e. kelembagaan Ekonomi Daerah
 - 1. pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah
 - 2. penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah
- PD.04.04 5. Penataan Perkotaan
- a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan
 - 1. evaluasi perencanaan perkotaan
 - 2. pengendalian penataan perkotaan
 - 3. fasilitasi
 - b. Penataan Kota
 - 1. pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan
 - 2. pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan
 - 3. fasilitasi
 - c. Kerjasama Perkotaan
 - 1) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak
 - 2) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah
 - 3) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan tinggi
- PD.05 F PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- PD.05.00 1. Pemerintahan desa dan Kelurahan
- a. Fasilitasi pengembangan Desa dan Kelurahan
 - 1. pelaksanaan pengembangan desa
 - 2. pelaksanaan pengembangan kelurahan
 - b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 1. pembinaan administrasi pemerintahan desa
 - 2. pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan
 - c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa
 - 1. pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Aset Desa

- 1. pembinaan pengelolaan keuangan desa
 - 2. pelaksanaan pengelolaan aset desa
 - e. Pengembangan Kapasitas Kelurahan
 - 1. pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan kelurahan
 - 2. pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan dan masyarakat
- PD.05.01
- 2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
 - a. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
 - 1. pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa
 - 2. pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat
 - b. Pembangunan Partisipatif
 - 1. pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif
 - 2. pelaporan kinerja pembangunan desa
 - c. Pendataan Potensi masyarakat
 - 1. inventarisasi potensi masyarakat
 - a. profil Kelurahan
 - 2. evaluasi perkembangan masyarakat
 - d. pengembangan Kawasan Kelurahan
 - 1. pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan
 - 2. pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan
 - e. Pelatihan Masyarakat
 - 1. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat
 - a. grand design pelatihan masyarakat
 - b. pedoman pelatihan masyarakat
 - c. fasilitasi
 - d. monitoring dan evaluasi
 - 2. evaluasi pelatihan masyarakat
 - a. penyelenggaraan pelatihan
 - b. monitoring dan evaluasi
- PD.05.02
- 3. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
 - a. Budaya Nusantara
 - 1. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
 - 2. pelaksanaan kerjasama adat istiadat
 - b. Pemberdayaan Perempuan
 - 1. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan
 - 2. pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan ketidaksetaraan gender
 - c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1. pelaksanaan pemberdayaan keluarga
 - 2. pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga
 - d. Kesejahteraan Sosial
 - 1 pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial
 - 2 pelaksanaan penanganan masalah sosial
 - e. Tenaga Kerja Kelurahan
 - 1. fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja
 - 2. fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan

- PD.05.03
4. perlindungan tenaga kerja
Usaha Ekonomi Masyarakat
- a. Usaha Pertanian dan Pangan
 1. pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agrabisnis dan lumbung pangan
 - a. identifikasi data pertanian
 - b. fasilitasi
 - c. monitoring dan evaluasi
 - b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
 1. pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam
 - a. inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum
 - b. inventarisasi dan pemetaan potensi desa
 - c. inventarisasi badan usaha milik desa
 - d. usaha ekonomi desa simpan pinjam
 2. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam
 - a. fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan
 - b. monitoring dan evaluasi
 - c. Produksi dan pemasaran
 1. pelaksanaan pengembangan informasi pasar
 - a. identifikasi produk unggulan perdesan
 - b. fasilitasi
 - c. monitoring dan evaluasi
 2. pelaksanaan diversifikasi pasar
 - a. fasilitasi pengelolaan pasar desa
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana desa
 - c. sistem penilaian kinerja pasar desa/ lomba pasar desa
 - d. monitoring dan evaluasi
 - e. data pasar desa
 - d. Usaha Ekonomi dan Keluarga
 1. pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian
 - a. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga
 - b. monitoring dan evaluasi
 2. pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil
 - a. penyusunan Modul
 - b. fasilitasi
 - c. monitoring dan evaluasi
 - e. Ekonomi Kelurahan
 1. ekonomi perdesaan
 - a. identifikasi dan investarisasi pengembangan usaha ekonomi
 - b. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi
 - c. monitoring dan evaluasi
- PD.05.04
5. Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan
 1. pembinaan pengelolaan konservasi kawasan
 2. pelaksanaan rehabilitasi lingkungan
 - b. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian

- Teknologi
1. Pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi
 2. Pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi
- c. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi
1. Pelaksanaan pemasarakatan teknologi
 2. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi
- PD.06
PD.06.00
- G KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. Pendaftaran Penduduk
 - a. Identitas Penduduk
 1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk
 2. Penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk
 3. Fasilitasi pencetakan dan distribusi blanko dokumen kependudukan
 - b. Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
 1. Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI
 2. Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing
 3. Fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat
 - c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara
 1. Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk indonesia keluar negeri dan WNI dari luar negeri
 2. Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas
 - d. Pendataan Penduduk Rentan
 1. Fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana
 2. Fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang
 3. Fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar
 4. Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan
 - e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
 1. Monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk
 2. Evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk
 3. Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk
 2. Pencatatan Sipil
 - a. Kelahiran dan Kematian
 1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kelahiran
 2. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kematian
 3. Fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian
 4. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian
 - b. Perkawinan dan Perceraian
 1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam

PD.06.01

- penduduk
 - 3 Pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk
 - 4 Penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk
 - c. Perencanaan Kependudukan
 - 1 Pelaksanaan perencanaan kependudukan
 - 2 Pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan
 - 3 Pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan
 - 4 Penyusunan dan penetapan perencanaan kependudukan
 - d. Penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintahan
 - 1 Penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga internasional
 - 2 Penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarkat dan nirlaba
 - 3 Penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta
 - 4 Penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemrintahan
 - e. Pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah
- PD.07 H. KEUANGAN DAERAH
- PD.07.00 1 Anggaran Daerah
- a. Anggaran Daerah Wilayah I, II, III dan IV
 - 1 Fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis
 - 2 Evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
 - 3 Monitoring
 - b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah
 - 1 Penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah
 - 2 Penyusunan tatalaksana anggaran daerah
 - 3 Penyiapan dukungan teknis anggaran daerah
 - 4 Penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah
- PD.07.01 2 Pendapatan dan Investasi Daerah
- a. Pajak Daerah dan Retribusi daerah
 - 1 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standarisasi pajak dan retribusi
 - 2 Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah
 - 3 Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah
 - 4 Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
 - b. Badan Usaha Milik Daerah
 - 1 Fasilitasi serta bimbingan teknis dibidang usaha milik daerah lembaga keuangan
 - 2 Fasilitasi serta bimbingan teknis dibidang

- usaha milik daerah lembaga non keuangan
 - 3 Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
 - c. Badan Layanan Umum Daerah
 - 1 Analisis, standarisasi teknis fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
 - 2 Pembinaan pelaksanaan kebijakan,standarisasi tekhnis,prosedur dan kriteria,fasilitas serta daerah bimbingan tekhnis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
 - 3 Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
 - d Pengerahaan kekayaan daerah
 - 1 Fasilitas serta bimbingan tekhnis pengelolaan kekayaan
 - 2 Fasilitas serta bimbingan tekhnis investasi daerah
 - 3 Penyiapan pelaksanaan momnitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi
 - e Pinjam dan Obligasi Daerah
 - 1 Fasilitas pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah
 - 2 Fasilitas pelaksanaaan kebijakan obligasi daerah
 - 3 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN
 - 4 Bimbingan teknis obligasi daerah,dana bergulir serta penyertaan modal daerah
 - 5 Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah,obligasi daerah dan dana
- PD.07.02 3 Fasilitasi Dana Perimbangan
- a Faasilitasi Dana Alokasi Umum
 - 1 Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum
 - 2 Sosialissi dan supervii dana alokasi umum
 - 3 Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
 - b Fasilitas Dana Alokasi Khusus
 - 1 Koordinasi penyiapan data dasar
 - 2 Sosialissi dan supervii dana alokasi khusus
 - 3 Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus
 - c Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan
 - 1 Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan
 - 2 Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan
 - 3 Penyiapan data imformasi untuk penyusunan laporan dana perimbngan
- PD.07.03 4 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

- a Akuntansi dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah
 - 1 Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban
 - 2 Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
- b Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1 Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
 - 2 Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
- c Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1 Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
 - 2 Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
- d Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli
 - 1 Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah
 - 2 Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
- e Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1 Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
 - 2 Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
 - 3 Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

PS.

XIII PERPUSTAKAAN

- PS.00 1 Kebijakan Perpustakaan Meliputi Kebijakan di Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dan Sumber Daya Perpustakaan
 - PS.00.00 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - PS.00.01 2 Penyiapan kebijakan
 - PS.00.02 3 Perumusan dan penyusunan bahan
 - PS.00.03 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
 - PS.00.04 5 Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan, Kajian Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pedoman Pengolahan, Pembakuan Perpustakaan, Kajian Kepuasan Pemustaka
- PS.01 2 Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
- PS.01.00 A Deposit Bahan Pustaka
 - 1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - 2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
 - 3 Terbitan Internasional dan

- Regional
- 4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- 5 Bibliografi dan Katalog
 - a. Bibliografi Nasional Indonesia (BNI)
 - b. Bibliografi Daerah (BD)
 - c. Katalog Induk Nasional (KIN)
 - d. Katalog Induk Daerah (KID)
 - e. Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- 6 Pendaftaran Nomor *International Standard Book Number (ISBN)*
- 7 Pendaftaran Nomor *International Standard Music Number (ISMN)*
- PS.01.01 B Pengembangan Koleksi
 - 1 Akuisisi
 - a. Pembelian
 - b. Hibah
 - c. Hadiah
 - d. Tukar Menukar
 - e. Implementasi Undang-Undang KCKR
 - f. Terbitan Internal
 - g. Pendistribusian bahan pustaka surplus
 - h. Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
 - 2 Pengolahan Bahan Pustaka
 - 3 Pangkalan Data Katalog Koleksi
- PS.01.02 C Jasa Perpustakaan dan Informasi
 - 1 Keanggotaan
 - 2 Sirkulasi
 - 3 Referensi
 - 4 Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara
 - 5 Kerjasama Perpustakaan
 - a. *MoU*
 - b. Perjanjian kerjasama
 - c. Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
 - 6 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
 - a. Pengembangan situs web
 - b. Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
 - c. Pengembangan program aplikasi perpustakaan
 - d. Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital
 - 7 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
- PS.01.03 D Preservasi Bahan Pustaka
 - 1 Konservasi
 - a. Perawatan Bahan Perpustakaan
 - b. Perbaikan Bahan Perpustakaan
 - c. Penjilidan Bahan Perpustakaan
 - 2 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
 - 3 Transformasi Digital
 - 4 Kurasi Digital
- PS.02 3 Sumber Daya Perpustakaan
- PS.02.00 A Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca

- 1 Pengembangan Perpustakaan
 - a. Perpustakaan Umum
 - b. Perpustakaan Khusus
 - c. Perpustakaan Sekolah
 - d. Perpustakaan Perguruan Tinggi
 - 2 Akreditasi Perpustakaan
 - a. Permintaan akreditasi
 - b. Pemberian akreditasi
 - c. Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi
 - 3 Pangkalan Data Perpustakaan
 - a. Nomor Pokok Perpustakaan
 - b. Perpustakaan Berbasis Wilayah
 - 4 Pemasarakatan Minat Baca
 - 5 Organisasi Perpustakaan
 - a. Forum Perpustakaan Umum
 - b. Forum Perpustakaan Khusus
 - c. Forum Perpustakaan Sekolah
 - d. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi
 - e. Gerakan Pemasarakatan Minat Baca
 - f. Organisasi Perpustakaan Lainnya
- PS.02.01 B Pengembangan Pustakawan
- 1 Sertifikasi Tenaga Perpustakaan
 - 2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan
 - 3 Penerbitan Jurnal
 - 4 Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan
 - a. Tim Penilai Instnasi/Perpustakaan Nasional
 - b. Tim Penilai Pusat
 - 5 Pemasarakatan
 - 6 Evaluasi Tenaga Perpustakaan
 - 7 Pangkalan data Tenaga Perpustakaan
 - 8 Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan

PP.

XIV PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- PP.00
- 1 Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional meliputi: rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan Daerah
 - PP.00.00 - Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - PP.00.01 - Penyiapan kebijakan
 - PP.00.02 - Perumusan dan penyusunan bahan
 - PP.00.03 - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
 - PP.00.04 - Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan
 - 2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
 - PP.01.00 a Musrenbang nasional
 - PP.01.01 b Musrenbang provinsi
 - 3 Perencanaan Pembangunan Kota Jambi
 - PP.02.00 a Rencana Pembangunan Jangka Menengah /Renstra-KL
 - PP.02.01 b Rencana Pembangunan Tahunan Kota Jambi/Lembaga (Renja-KL)
 - PP.02.02 c Program Kerja Tahunan
 - 1 Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya
 - 2 Program kerja tahunan Unit Kerja

- PP.02.03 d 3 Program Kerja Tahunan Kota Jambi
- PP.02.04 e Penetapan/Kontrak Kinerja
 - 1 Pimpinan Unit Kerja
 - 2 Kepala Daerah/OPD Kota Jambi
- PP.02.05 f Laporan
 - 1 Berkala
 - a Laporan Triwulan
 - b Laporan Semesteran
 - c Laporan Tahunan Unit Kerja
 - d Laporan Tahunan Kota Jambi
 - e Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD/Kota Jambi
 - 2 Laporan Insidental
- PP.03. 4 Evaluasi Program
- PP.04. 5 Unit Kerja
- PP.05. 6 Lembaga Daerah/OPD
- PP.06. 4 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
- PP.06.00 5 Konsultasi perencanaan pembangunan
- PP.06.01 6 Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan
- PP.06.02 7 Aksi Strategis Nasional
- PP.06.03 - Rancangan awal perencanaan aksi strategis nasional
- PP.06.04 - Rapat pembahasan rancangan awal dengan K/L
- PP.07. - Sosialisasi dengan K/L
- PP.07.00 - Rancangan akhir perencanaan aksi strategis nasional
- PP.07.01 - Penetapan perencanaan aksi strategis nasional
- PP.07.02 8 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
- PP.07.03 a Pendanaan Luar Negeri dan Hibah
- PP.07.03 b Pendanaan Dalam Negeri
- PP.07.03 c Kerjasama Pembangunan Internasional
- PP.07.03 d Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru

PA. XV PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- PA.00 1 Kebijakan
 - Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- PA.00.00 A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
- PA.00.01 B. Penyiapan kebijakan
- PA.00.02 C. Perumusan kebijakan
- PA.00.03 D. Masukan dan dukungan kebijakan
- PA.00.04 E. Penetapan NSPK
- PA.01 2 Pengarusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum
- PA.01.00 A. Data gender
- PA.01.01 B. Advokasi dan fasilitasi
- PA.01.02 C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender
- PA.02. 3 Perlindungan perempuan (kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban perdagangan)
- PA.02.00 A. Data perlindungan perempuan
- PA.02.01 B. Advokasi dan fasilitasi
- PA.02.02 C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
- PA.02.03 D. Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender

- PA.02.04 E. Analisis dan penyajian informasi gender
- PA.03. 4 Perlindungan anak (hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum)
 - PA.03.00 A. Data perlindungan anak
 - PA.03.01 B. Advokasi dan fasilitasi
 - PA.03.02 C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
- PA.04. 5 Tumbuh kembang anak (pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, pengembangan kota layak anak)
 - PA.04.00 A. Data tumbuh kembang anak
 - PA.04.01 B. Advokasi dan fasilitasi
 - PA.04.02 C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak

PW. XVI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- PW.00 1 Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi:
 - PW.00.00 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - PW.00.01 2 Penyiapan kebijakan
 - PW.00.02 3 Perumusan dan penyusunan bahan
 - PW.00.03 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
 - PW.00.04 5 Penetapan dalam bentuk NSPK
- PW.01 2 Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - PW.01.00 A. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
 - 1 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata)
 - 2 Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata)
 - 3 Pengembangan Zona Kreatif
 - a. Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
 - b. Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
 - 4 Investasi Pariwisata
 - a. Pengembangan Potensi Investasi
 - b. Promosi Investasi
 - PW.01.01 B. Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - 1 Bimtek Daya Tarik Wisata
 - 2 Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - 3 Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka
 - 4 Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan
 - 5 Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)
 - PW.01.02 C. Industri Pariwisata
 - 1 Sarana Pariwisata
 - a. usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata
 - b. penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.
 - 2 Jasa Pariwisata:

- 2 Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang
 - a. Promosi Media
 - b. Sarana dan Distribusi Media
 - 3 Kerjasama dan Kemitraan
 - a. Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah
 - b. Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah
- PW.02.04 E. Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus
- 1 Promosi KIE Korporasi
 - a. Korporasi Dalam Negeri
 - b. Korporasi Luar Negeri
 - 2 Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah
 - a. Pemerintah
 - b. Non Pemerintah
 - 3 Promosi Minat Khusus
 - a. Wisata Sungai
 - b. Wisata Non Sungai
- PW.03
PW.03.00 4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
- A. Pengembangan industri Perfilman
 - 1 Fasilitasi Industri Perfilman
 - a. Fasilitasi Usaha Perfilman
 - b. Fasilitasi Kegiatan Perfilman
 - 2 Festival dan Eksibisi Film
 - a. Festival Film
 - b. Eksibisi Film
 - 3 Produksi
 - a. Pengembangan Konten dan Lokasi Film
 - b. Pelayanan Produksi Film
- PW.03.00 B. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
- 1 Pengembangan Seni Pertunjukan
 - a. Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan
 - b. Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan
 - 2 Pengembangan Industri Musik
 - a. Kreasi dan Produksi Musik
 - b. Fasilitasi Pengembangan Industri Musik
 - 3 Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik
 - 4 Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik
 - a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan
 - b. Dokumentasi dan Publikasi
- PW.04
PW.04.00 5 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK
- A. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
 - 1 Pengembangan Film Animasi dan Komik
 - 2 Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi
 - 3 Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video
 - 4 Pengembangan Karya Kreatif Periklanan
 - a. Iklan Cetak
 - b. Iklan Elektronik
- PW.04.01 B. Desain dan Arsitektur
- 1 Arsitektur dan Desain Interior
 - 2 Komunikasi Visual
 - a. Desain Grafis

- b. Komunikasi Visual
 - 3 Desain Produk dan Kemasan
 - 4 Mode
 - a. Desain Busana
 - b. Desain Non Busana
 - PW.04.02 C. Kerjasama dan Fasilitas
 - 1 Lisensi Teknologi
 - a. Pengembangan Teknologi
 - b. Pemanfaatan Teknologi
 - 2 Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis
 - a. Pengembangan Sentra Inovasi
 - b. Pengembangan Inkubator Bisnis
 - 3 Sentra Kreatif
 - a. Pengembangan Sentra Kreatif
 - b. Pengelolaan Sentra Kreatif
 - 4 Akses Pembiayaan
 - a. Akses Pembiayaan Bank
 - b. Akses Pembiayaan Non Bank
- PW.05 6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- PW.05.00 A. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
 - 1 Program dan Evaluasi
 - 2 Data dan Publikasi
- PW.05.01 B. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
 - 1 Program dan Evaluasi
 - 2 Data dan Publikasi
- PW.05.02 C. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1 Program dan Evaluasi
 - 2 Penyelenggaraan dan Kerjasama
- PW.05.03 D. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1 Program dan Evaluasi
 - 2 Evaluasi dan Kerjasama

KI.

XVII KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- KI.00 1 KEBIJAKAN
 - Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas
 - KI.00.00 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - KI.00.01 2 Penyiapan bahan
 - KI.00.02 3 Perumus Kebijakan
 - KI.00.03 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
 - KI.00.04 5 penetapan dalam bentuk NSPK
 - KI.01 Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
 - KI.01.00 1 Teknik Pos dan Telekomunikasi
 - KI.01.01 2 Teknik Komunikasi Radio
 - KI.01.02 3 Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi
 - KI.01.03 4 Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar
 - KI.01.04 5 Standar dan Audit Perangkat Lunak
 - KI.02 2 SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

- KI.02.00
- A. Penataan Sumber Daya
- 1 Alokasi Spektrum Dinas
 - Alokasi Dinas Tetap
 - Alokasi Dinas Bergerak Darat
 - 2 Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat
 - Alokasi Dinas Penyiaran
 - Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit
 - 3 Ekonomi Sumber Daya
 - Analisa Industri dan Ekonomi
 - Penanganan Izin Pita
- KI.02.01
- B. Operasi Sumber Daya
- 1 Pelayanan Spektrum Dinas
 - Pelayanan Dinas Tetap
 - Pelayanan Dinas Bergerak Darat
 - 2 Pelayanan Spektrum Non Dinas
 - Pelayanan Dinas Penyiaran
 - Pelayanan Dinas Penerbangan, Maritim, dan Satelit
 - 3 Sertifikasi Operator Radio
 - Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpending
 - Pelayanan Operator Radio
 - 4 Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya
 - Konsultasi dan Informasi Sumber Daya
 - Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya
- KI.02.02
- C. Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
- 1 Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum
 - Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum
 - Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum
 - 2 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum
 - Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum
 - Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum
 - 3 Monitoring dan Penertiban Spektrum
 - Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial
 - Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial
 - 4 Monitoring dan Penertiban
 - Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika
 - Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika
- KI.03
- 3 PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
- KI.03.00
- A. Pos
- 1 Layanan dan Penerapan Pos Universal
 - Layanan
 - Penerapan Layanan
 - 2 Layanan Pos Komersial

- Tata Kelola Layanan
 - Data dan Informasi Layanan
 - 3 Prangko dan Filateli
 - Prangko
 - Filateli
 - 4 Iklim Usaha Pos
 - Pos Universal
 - Pos Komersial
- KI.03.01
- B. Telekomunikasi
- 1 Layanan Jaringan Telekomunikasi
 - Akses
 - Backbone
 - 2 Layanan Jasa Telekomunikasi
 - Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik
 - Jasa Multimedia
 - 3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
 - Penomoran Telekomunikasi
 - Penomoran Informatika
 - 4 Tarif dan Interkoneksi
 - Tarif Telekomunikasi
 - Interkoneksi Telekomunikasi
 - 5 Kelayakan Sistem Telekomunikasi
 - Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa
 - Penerapan Teknologi Telekomunikasi
- KI.03.02
- C. Penyiaran
- 1 Pemetaan dan Database
 - Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
 - Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
 - 2 Verifikasi dan Ujicoba Siaran
 - Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio
 - Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi
 - 3 Radio
 - Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio
 - Lembaga Penyiaran Swasta Radio
 - 4 Televisi
 - Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi
 - Lembaga Penyiaran Swasta Televisi
 - 5 Iklim Usaha Penyiaran
 - Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran
 - Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran
- KI.03.03
- D. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal
- 1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah
 - Analisa Penyelenggaraan
 - Pelayanan
 - 2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah
 - Analisa Penyelenggaraan
 - Pelayanan
 - 3 Layanan Khusus Penyiaran
 - Publik Radio
 - Publik Televisi

- 4 Pelayanan Kewajiban Universal
 - Perencanaan Pembangunan
 - Monitoring dan Evaluasi
 - 5 Pengembangan Infrastruktur
 - Perencanaan Infrastruktur
 - Analisa Ekonomis Infrastruktur
- KI.03.04 E. Pengendalian Pos dan Informatika
- 1 Monitoring dan Evaluasi Pos
 - Monitoring
 - Evaluasi
 - 2 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
 - Monitoring
 - Evaluasi
 - 3 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
 - Monitoring
 - Evaluasi
 - 4 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
 - Monitoring
 - Evaluasi
 - 5 Pencegahan dan Penertiban
 - Pencegahan
 - Penertiban
- KI.04
KI.04.00 4 APLIKASI INFORMATIKA
- A. e-Government
- 1 Tata Kelola e-Government
 - Program e-Government
 - Evaluasi e-Government
 - 2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government
 - Teknologi e-Government
 - Infrastruktur e-Government
 - 3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
 - Interoperabilitas e-Government
 - Interkonektivitas e-Governmen
 - 4 Aplikasi Layanan Kepemerintahan
 - Aplikasi Layanan Kepemerintahan Pusat
 - Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah
 - 5 Aplikasi Layanan Publik
 - Inisiasi Aplikasi Layanan Publik
 - Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik
- KI.04.01 B. Pemberdayaan Informatika
- 1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
 - Perancangan Model
 - Penerapan Model
- KI.04.02 C. Keamanan Informasi
- 1 Tata Kelola Keamanan Informasi
 - Kelembagaan
 - Manajemen Risiko
 - 2 Teknologi Keamanan Informasi
 - Infrastruktur
 - Aplikasi
 - 3 Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
 - Infrastruktur

- Aplikasi
 - 4 Penyidikan dan Penindakan
 - Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi
 - Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi
 - 5 Budaya Keamanan Informasi
 - Penyidikan
 - Penindakan
- KI.05
KI.05.00
- 5 INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
- A. Komunikasi Publik
- 1 Tata Kelola Komunikasi Publik
 - Program Komunikasi Publik
 - Monitoring dan Evaluasi
 - 2 Pengelolaan Opini Publik
 - Pengumpulan Opini Publik
 - Pengolahan Opini Publik
 - 3 Layanan Komunikasi Publik
 - Pengumpulan Data
 - Pengolahan Data
- KI.05.01
- B. Pengolahan dan Penyediaan Informasi
- 1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
 - Politik dan Keamanan
 - Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 2 Informasi Perekonomian
 - Keuangan, Perbankan, dan Jasa
 - Industri dan Perdagangan
 - 3 Informasi Kesejahteraan Rakyat
 - Agama, Sosial, dan Budaya
 - Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup
- KI.05.02
- C. Pengelolaan Media Publik
- 1 Media Cetak
 - 2 Media Online
 - 3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
- KI.05.03
- D. Kemitraan Komunikasi
- 1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
 - Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
 - Monitoring dan Evaluasi
 - 2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
 - Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha
 - Monitoring dan Evaluasi
 - 3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
 - Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
 - Monitoring dan Evaluasi
- KI.06
KI.06.00
- 6 PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA
- A. Infrastruktur Informatika
- Jaringan
 - Piranti Teknologi Informatika
 - Keamanan Informatika
- KI.06.01
- B. Sistem dan Data
- Portal dan Konten
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data

- KL.06.02
 - Pengembangan Aplikasi
 - D. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - 1 Pelayanan Informasi
 - Media Baru
 - Media Konvensional
 - Dokumentasi dan Perpustakaan
 - 2 Hubungan Masyarakat
 - Publikasi
 - Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik
 - Hubungan Internal dan Eksternal
 - 3 Bimbingan Teknis

Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas
 - 4. Evaluasi

Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas

KS.

XVIII KESEHATAN

- KS.00
 - 1 PERUMUSAN KEBIJAKAN

Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

 - KS.00.00 A Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - KS.00.01 B Penyiapan bahan
 - KS.00.02 C Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
 - KS.00.03 D Pengumpulan dan pengolahan data
 - KS.00.04 E Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi
 - 2 UPAYA KESEHATAN
 - KS.01 A Upaya Kesehatan Dasar
 - 1) Pelayanan Kedokteran Keluarga
 - 2) Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer
 - 3) Pelaksanaan Kesehatan Primer
 - 4) Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas
 - 5) Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit
 - 6) ICD 10, Destistry & Stomatology
 - 7) Infeksi Menular lewat tranfusi darah
 - 8) Penyakit Mulut di Tingkat Primer
 - 9) Pembiayaan Darah
 - 10) Penggunaan Darah Rasional
 - 11) Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah
 - 12) Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
 - 13) Akreditasi Puskesmas
 - 14) Puskesmas Berprestasi
 - KS.01.01 B Upaya Kesehatan Rujukan
 - 1) Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - a Rumah Sakit Bergerak

- b Rumah Sakit Pratama
- c Rumah Sakit Publik
- d Rumah Sakit Privat
- e Rumah Sakit Khusus
- 2) Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)
- 3) Pelayanan Rumah Sakit Privat
 - a Akses Pelayanan SPGDT Cal 119
 - b Akses Pelayanan Rekayasa Jaringan dan Sel Punca
 - c Pelayanan Gerartri
 - d Pelayanan Medical Tourism
 - e Pelayanan Hyperbarik
- 4) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
 - a Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan Kanker
 - b Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Regional
 - c Pencegahan Froud di Rumah Sakit
- 5) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan
 - a Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan
 - b Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri
- 6) Badan Pengawas di Rumah Sakit
 - a Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan
 - b Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri
- 7) Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit
 - a Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit
 - b Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi
 - c Profil dan data Rumah Sakit 3(tiga) Tahun Terakhir
 - d *Self Instrumen Assesment* sesuai dengan kelas yang diajukan
 - e Keputusan Penetapan Kelasa (Jika peningkatan kelas)
 - f Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika peningkatan kelas)
- 8) Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain
 - a Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI)
 - b Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional
 - c Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional
 - d *Surveyor* Akreditasi Rumah Sakit

KS.01.02

C

- Keperawatan dan Keteknisian Medik
- 1) Pelayanan Keperawatan Dasar
 - 2) Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit
 - 3) Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
 - 4) Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
 - 5) Bina Pelayanan Kebidanan
 - 6) Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan

- KS.01.03
- D Keterampilan Fisik
- Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
- 1) Mikrobiologi dan Imunologi
 - a Laboratorium Kesehatan
 - b Laboratorium Klinik
 - c Laboratorium Puskesmas
 - d Laboratorium Mikrobiolog Kultur
 - 2) Patologi dan Toksikologi
 - a PNPME
 - b Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
 - 3) Radiologi
 - a Pelayanan Radiologi
 - b Dosis Radiasi Nasional
 - c Radiologi, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir
 - d Radioterapi di Rumah Sakit
 - e Telemedicine
 - f Radiologi Diagnostik
 - g Teleradiologi
 - 4) Perijinan dan Sertifikasi
 - a Perijinan Pelayanan Radiologi
 - b Sertifikasi Peningkatan Kapabilitas
 - 5) Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - a Prasarana Bangunan Rumah Sakit
 - b Prasarana Ruang Gawat Darurat
 - c Prasarana Ruang Operasi
 - d Prasarana Ruang Perawatan Intensif
 - e Prasarana Ruang Rawat Inap
 - f Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik
 - g Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD)
 - h Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi Darurat dan Bencana
 - i Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - j Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - k Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa
 - l Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum medik
 - m Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara
 - n Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif
 - 6) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - a Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK
 - b Kalibrasi Rumah Sakit
 - c Kalibrasi Puskesmas
 - d Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit
 - e Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Puskesmas
 - 7) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)
 - a ASPAK Rumah Sakit
 - b ASPAK Puskesmas
 - c ASPAK Dinas Kesehatan Prof/Kab/Kota

- KS.01.04
- E Kesehatan Jiwa
- 1) Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - a Kesehatan Jiwa di Desa Siaga
 - b Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
 - c Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
 - 2) Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - a Layanan Unggulan di RS Jiwa
 - b Rehabilitasi Psikososial di RS Jiwa
 - c KalibIndikator mutu RS Jiwa
 - d Mutu Layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai Penyelenggaraan RS
 - 3) Etikolegal dan Asesmen
 - a Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang dengan Penderita Gangguan Jiwa
 - b Visum Et Repertum
 - 4) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol
 - a Program, Terapi Rumatan Metadon (PTRM)
 - b Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol
 - c Wajib Lapor Pecandu Narkotika
 - d Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan TembakauEtil Rehabilitasi Medis terkait Hukum
 - 5) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko
 - a Kesehatan Jiwa di Sekolah
 - b Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana
 - c Penanggulangan Autisme
 - d Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko
 - e Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana
- KS.02
- 3 PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
- KS.02.00
- A Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra
- 1) Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - a Difteri
 - b Polio
 - c Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis
 - d Surveilans influenza
 - e Keracunan Pangan
 - 2) Imunisasi
 - a Pekan Imunisasi Nasional
 - b Coldchain Bagi Petugas Imunisasi
 - c Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita
 - d Imunisasi Bagi Petugas Kesehatan
 - e Imunisasi di Daerah Sulit
 - fa Imunisasi TT bagi wanita usia subur (WUS)

- g Imunisasi bagi masyarakat umum
 - h Vaksin dan serum program imunisasi, Pencangan vaksin baru DPT-HIB-Hib
 - i Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/Haemophilus influenza tipe B
- 3) Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
- a Pemberian ICV (International Certificate Vaccine)
 - b Hapus Serangan dan Hapus Tikus
 - c Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas
 - d Vaksinasi Meningitis pada RS, KKP, dan Poliklinik
 - e Kekarantinaan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan
 - f Obat dan P3K Kapal
 - g Kesehatan Nakoda/Pilot dan ABK/Pesawat
 - h Air Bersih di Kapal
 - i Fumigasi di Kapal
- 4) Kesehatan Matra
- a Mudik Sehat
 - b Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara
 - c Kesehatan Migran
 - d Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik
 - e Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas
- KS.02.01 B Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- 1) Pengendalian Tuberkulosis
- a Pengendalian Penyakit TB
 - b TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB
 - c Laboratorium TB
- 2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual
- a Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / *Integrated Bio-Behavioural Surveillance (IBBS)*
 - b *Human Immuno Deficiency Virus (HIV)*
 - c Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test
 - d Obat Anti Retro Viral (ARV) dan reagen tes HIV
- 3) Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut
- a *Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV)*
 - b Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)
- 4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan
- a Diare
 - b Tifoid
 - c Hepatitis

- 5) Pengendalian Kusta dan Frambusia
- a Kusta
 - b Frambusia
 - c Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)
- KS.02.02 C Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
- 1) Pengendalian Malaria
 - a Kelambu berinsektisida (LLINs)
 - b Eliminasi malaria
 - c Crosschecker mikroskopis malaria
 - 2) Pengendalian Arbovirolesi
 - a DBD
 - b Chikungunya
 - c Ebola
 - 3) Pengendalian Zoonosis
 - a Penyakit flu burung
 - b Vaksin Anti Rabies (VAR) baru
 - c Penyakit Pes
 - d Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)
 - 4) Pengendalian Filariasis dan Kecacangan
 - a Filariasis
 - b Kecacangan
 - c Schistosomiasis
 - 5) Pengendalian Vektor
- KS.02.03 D Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
 - a Penyakit Jantung
 - b Penyakit Pembuluh Darah
 - c Penyakit Hipertensi
 - d Penyakit Stroke
 - 2) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik
 - a Penyakit Diabetes Militus
 - b Penyakit gangguan metabolik
 - c Penyakit gangguan Tiroid
 - d Gangguan Obesitas
 - 3) Pengendalian Penyakit Kanker
 - 4) Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif
 - a Penyakit Akibat Produk Tembakau
 - b Asma, Lupus, Thalassemia
 - 5) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan
 - a Pengendalian Cidera
 - b Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas
 - c Penanganan Kesehatan Akibat Tindak Kekerasan
- KS.02.04 E Penyehatan Lingkungan
- 1) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
 - a Pengawasan Kualitas Air Minum
 - b Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
 - 2) Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum
 - a Higiene sanitasi dan Bangunan Umum
 - b Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan

- c Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum
 - 3) Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
 - a Penanggulangan kedaruratan bidang kesehatan lingkungan
 - b Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan
 - c Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat
 - d Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar
 - 4) Higiene Sanitasi Pangan
 - a Makanan Jajanan
 - b Restoran / Rumah Makan
 - c Jasa Boga
 - d Depot Air Minum
 - 5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi
 - a Medis Fasyankes
 - b Limbah Medis (Free Mercury)
 - c Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
 - d Pengamanan Dampak Kesehatan Radiasi Non Pengion
- KS.02.05 F Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 1) Pengembangan Teknologi dan Laboratorium
 - a Laboratorium Kesehatan Lingkungan
- KS.02.06 G Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan
- 1) Ship Sanitation
 - a Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC)
 - b Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC)
 - c Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal
 - 2) Sertifikat
 - a Health Certificate
 - b International Certificate of Vaccination
 - c Surat Keterangan Pengujian Kesehatan Nahkoda/Pilot dan Anak Buah Kapal/Pesawat Udara
 - d Sertifikat Air Bersih
 - e Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di kapal
 - f Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga
 - g Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan
 - h Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan
- KS.03
KS.03.00 4 GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
- A Gizi
 - 1) Gizi Makro
 - a Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting)
 - b Pemantauan Pertumbuhan Anak (Posyandu)
 - 2) Gizi Mikro
 - a Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan

- Vitamin A), AGB (Anemia Gizi))
 - b Manajemen Taburia
 - c Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya
 - 3) Gizi Klinik dan Dietetik
 - a Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit dan Instansi
 - b Tatalaksana Anak Gizi Buruk
 - c Pencegahan dan Penanggulangan Gizi lebih
 - 4) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan
 - a Makanan Pendamping ASI
 - b ASI Eksklusif
 - c Pedoman Gizi Seimbang
 - d Makanan Bayi dan Anak
 - e Buffer Stock Makanan Pendamping ASI
 - f Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang
 - g Makanan Tambahan Anak Sekolah
 - 5) Kewaspadaan Gizi
 - a Suveilans Gizi
 - b Epidemiologi Kasus Gizi Buruk
 - c Penanganan Bidang Gizi dalam situasi Bencana
 - d Jejaring Informasi Pangan dan Gizi
- KS.03.01 B Kesehatan Ibu
- 1) Kesehatan Ibu Hamil
 - a Pelayanan Antenatal Terpadu
 - b Pelayanan Kelas Ibu Hamil
 - c Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)
 - 2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
 - a Kemitraan Bidan dan Dukun
 - b Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
 - c Supervisi Fasilitatif
 - 3) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi
 - a Audit Maternal Parinatal
 - b Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat
 - c Tanda Bahaya pada Kehamilan
 - d Surveilans Kematian Ibu
 - 4) Keluarga Berencana
 - a Pelayanan KB Pasca Persalinan
 - b Pelatihan KB Pasca Persalinan
 - 5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi
 - a Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)
 - b Program PerencPelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal / PPAM Kespro)
 - c Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
 - d Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)
- KS.03.02 C Kesehatan Anak
- 1) Kelangsungan Hidup Bayi
 - a Pelayanan Kesehatan Neonatal

- e Pengobat Tradisional (Lokal)
 - f Asosiasi Pengobat Tradisional
- KS.03.04 E Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 1) Pelayanan Kesehatan Kerja
 - a Penyakit Akibat Kerja
 - b Pemeriksaan Kesehatan Pekerja
 - c Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
 - 2) Kapasitas Kerja
 - a Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif
 - b Kapasitas Kesehatan Kerja
 - c TP ASI
 - 3) Lingkungan Kerja
 - a Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP
 - b K3 Perkantoran
 - c K3 Rumah Sakit
 - d K3 Puskesmas
 - e Biomonitoring Efek Kesehatan
 - f Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan
 - 4) Kemitraan Kesehatan Kerja
 - a Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja
 - b Kesehatan Nelayan
 - c Integrasi Pos UKK
 - d Kabupater/Kota Percontohan
 - e Penguatan Profesi
 - 5) Kesehatan Perkotaan
 - a Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan
 - b Forum Kota
 - 6) Kesehatan Olahraga
 - a Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja
 - b Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji
 - c Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah
 - d Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas
 - e Olahraga bagi Usia Lanjut
 - f Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat
- KS.04 5 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
- KS.04.00 A Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & Evaluasi)
- 1) Harga Obat Publik
 - a Harga Jual Obat Generik
 - b Harga Jual Obat Generik Berdagang
 - c Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat
 - 2) Pengadaan Obat
 - a Pengadan Vaksin Reguler
 - b Obat *Esensial*
 - c Obat pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional
 - d Obat Program Malaria
 - e Obat Program Kesehatan Anak
 - f Obat Program Kesehatan Ibu
 - g Obat Program Gizi
 - h Obat Anti Tuberkulosis
 - i Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2KTP)

- j Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia
 - k Obat Penderita *Thalassemia*
 - l Obat Psikotropika Generik
 - m Obat *Anti Retro Viral*
- 3) Perbekalan Kesehatan
- a Gudang Farmasi
 - b Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - c Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
 - d Pengadaan Reagen Screening Darah
 - e Obat *Buffer Stock*
 - f Hasil *Stock Opname Obat*
- KS.04.01 B Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
- 1) Alat Kesehatan
- a Alat Kesehatan
 - b Kependium Alat Kesehatan
 - c Pelabelan Alat Kesehatan dan PKRT
 - d Post Market & Surveillance Alat Kesehatan
 - e Produk Alat Kesehatan Elektronik
 - f Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik
- 2) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat
- a Industri Farmasi
 - b Pedagang Besar Farmasi
 - c Pedagang Eceran Obat
 - d Penyalur Alat Kesehatan
 - e Toko Alat Kesehatan
 - f Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan
- 3) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
- a Produk Diagnostik In Vitro
 - b Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
 - c PKRT Klas III
 - d PKRT Klas I dan II
 - e Perusahaan Rumah Tangga PKRT
 - f Penggunaan Pestisida di Rumah Tangga
 - g Post Market & Surveillance PKRT
- KS.04.02 C Kefarmasian (Standarisasi, Klinis, komunitas dan Obat Tradisional)
- 1) Pelayanan Kefarmasian
- a Visite untuk Apoteker
 - b Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety)
 - c Penulisan Resep
- 2) Farmasi Klinik
- a Pharmaceutical Care untuk Penyakit Arthritis Rematik
 - b Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma
 - c Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung
 - d Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati
 - e Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus
 - f Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan

- g Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis
 - h Pharmaceutical Care lainnya
 - i Dispensing Sediaan Steril
 - j Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika
 - k Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom Koroner Akut
- 3) Farmasi Komunitas
- a Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas
 - b Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care)
 - c Kefarmasian untuk Pasien Pediatri
 - d Kefarmasian untuk Penyakit Malaria
 - e Farmasi di Rumah Sakit
- 4) Penggunaan Obat Rasional
- a Obat Rasional
 - b Informasi Obat
 - c Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik
 - d Pemantauan Terapi Obat
- KS.04.03 D Produksi dan Distribusi Kefarmasian
- 1) Obat Tradisional
- a Farmakope Indonesia
 - b Farmakope Herbal Indonesia
 - c Suplemen I Farmakope Indonesia
 - d Suplemen II Farmakope Indonesia
 - e Suplemen III Farmakope Indonesia
 - f Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia
 - g Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia
 - h Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia
 - i Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
 - j Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT)
 - k Usaha Jamu Gendong (UJG)
 - l Usaha Jamu Racik (UJR)
 - m Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa Inggris
- 2) Kosmetik dan Makanan
- a Keamanan Pangan
 - b Kosmetika bagi Petugas
 - c Industri Rumah Tangga bagi Petugas
 - d Makanan Jajanan Anak Sekolah
 - e Kodeks Kosmetika Indonesia
 - f Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia
- 3) Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus
- a Narkotika dan Psikotropika
 - b Prekursor Farmasi
 - c Sediaan Farmasi Khusus
 - d Persetujuan Impor dan Ekspor
 - e Pelaksanaan Perizinan Import dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
- 4) Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat
- a Indonesian Pharmaceutical Industry Directory
- KS.05 6 SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN

| | | |
|----------|----|---|
| KS.05.00 | A | Sertifikasi dan Perijinan |
| | | 1) Perijinan dan Pengawasan Alat Kesehatan |
| | | 2) Perijinan Penyalur Alat Kesehatan |
| KS.06 | 7 | PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN |
| KS.06.00 | A | Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan |
| | | 1) Pencegahan dan Mitigasi |
| | | 2) Kesiapsiagaan |
| KS.06.01 | B | Tanggap Darurat dan Pemulihan |
| | | 1) Tanggap Darurat |
| | | 2) Pemulihan |
| KS.06.02 | C | Pemantauan dan Informasi |
| | | 1) Pemantauan |
| | | 2) Informasi |
| KS.06.03 | D | Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan |
| KS.06.04 | E | Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana |
| KS.07 | 8 | PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN |
| KS.07.00 | A | Tersedianya data NHA Setiap Tahun |
| KS.07.01 | B | Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN |
| KS.08 | 9 | INTELIGENSIA KESEHATAN |
| KS.08.00 | A | Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligencia Kesehatan |
| | | 1) Inteligencia Anak |
| | | 2) Inteligencia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia |
| KS.08.01 | B | Penanggulangan Masalah Inteligencia Kesehatan |
| | | 1) Inteligencia Akibat Gangguan Bawaan |
| | | 2) Inteligencia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan |
| KS.09 | 10 | KESEHATAN HAJI |
| KS.09.00 | A | Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji |
| | | 1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji |
| | | 2) Pelayanan Kesehatan jamaah Haji Kab/Kota |
| | | 3) Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP |
| | | 4) Pelayanan Kesehatan Embarkasi |
| | | 5) Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) |
| | | 6) Rekrutmen Tenaga Musiman |
| KS.09.01 | B | Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji |
| | | 1) Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji |
| | | 2) Kesehatan Haji di Kab/Kota |
| | | 3) Kesehatan Haji Terpadu |
| | | 4) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jamaah Haji |
| | | 5) Vaksinasi Jamaah Haji |
| | | 6) Sanitasi Asrama Haji |
| | | 7) Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi |
| KS.10 | 11 | PROMOSI KESEHATAN |
| KS.10.00 | A | Sarana Promosi Kesehatan |
| | | 1) Booklet |
| | | 2) Poster |
| | | 3) Leaflet |
| | | 4) Pamflet |

- 5) Lembar Balik
 - 6) Selebaran
 - 7) Buletin
 - 8) Festival
 - 9) Lomba
 - 10) Pameran
 - 11) Seminar
 - 12) Iklan Layanan Masyarakat
 - 13) Film
 - 14) Radio Spot
- KS.10.01 B Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran
- 1) Saka Bhakti Husada
 - 2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 3) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan
 - 4) Kawasan Tanpa Rokok
 - 5) Kerjasama dengan Swasta di bidang Kesehatan
 - 6) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan
 - 7) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan
 - 8) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak
- KS.10.02 C Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan
- 1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan
 - 2) Kampanye Promosi Kesehatan
 - 3) Video Animasi Promosi Kesehatan
- KS.10.03 D Hari Kesehatan
- 1) Hari Kesehatan Nasional
 - 2) Hari Kesehatan Dunia
 - 3) Hari Tanpa Tembakau se-Dunia
 - 4) Hari-hari Besar Kesehatan
- KS.11 12 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
- KS.11.00 A Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi
- KS.12 13 DATA DAN INFORMASI
- KS.12.00 A Statistik Kesehatan
- 1) Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan
 - 2) Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan
- KS.12.01 B Analisis dan Diseminasi Informasi
- 1) Analisis Data Kesehatan
 - 2) Diseminasi Informasi Kesehatan
- KS.12.02 C Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan
- 1) Pengembangan Sistem Informasi
 - 2) Bank Data
- KB.** **XIX KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**
- KB.00 1 Kebijakan
- Kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga
- KB.00.00 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan
- KB.00.01 2 Penyiapan kebijakan
- KB.00.02 3 Perumusan kebijakan
- KB.00.03 4 Masukam dan dukungan kebijakan

- KB.00.04 5 Penetapan NSPK
- KB.01 2 Pengendalian Penduduk
- KB.01.00 A. Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 1 Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - a. Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - b. Evaluasi dan Pelaporan
 - 2 Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - a. Penyiapan fasilitas
 - b. Evaluasi dan pelaporan
- KB.01.01 B. Perencanaan pengendalian penduduk
 - 1 Profil dan Proyeksi Penduduk
 - a. Data profil dan proyeksi Penduduk
 - b. Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
 - 2 Penetapan parameter pengendalian penduduk
 - a. Penetapan sasaran parameter
 - b. Evaluasi sasaran parameter
 - 3 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
 - a. Pemanfaatan profil dan proyeksi
 - b. Pemanfaatan Parameter
- KB.01.02 C. Kerja sama pendidikan kependudukan
 - 1 Pengembangan sistem
 - a. Pengembangan sistem jalur pendidikan formal
 - b. Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal
 - 2 Pengembangan Materi
 - a. Pengembangan materi jalur pendidikan formal
 - b. Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal
 - 3 Monitoring dan evaluasi
 - a. Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal
 - b. Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal
- KB.01.03 D Analisis dampak kependudukan
 - 1 Analisis Sosial
 - 2 Analisis Ekonomi
 - 3 Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan
 - 4 Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan
- KB.02 3 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- KB.02.00 A. Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah
 - 1 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
 - 2 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
 - 3 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

- KB.02.01 B. Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta
- 1 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
 - 2 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
 - 3 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
 - a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
 - b. Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
- KB.02.02 C. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus
- 1 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 2 Kesertaan keluarga berencana pria
 - a. Peningkatan akses keluarga berencana pria
 - b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
- KB.02.03 D. Kesehatan Reproduksi
- 1 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
 - 2 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
 - 3 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
- KB.03
KB.03.00 4 Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
- A. Bina keluarga Balita dan Anak
- 1 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
 - a. Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
 - b. Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
 - 2 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
 - a. Monitoring bina keluarga Balita dan anak
 - b. Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
- KB.03.01 B. Bina ketahanan remaja
- 1 Pelembagaan bina ketahanan remaja
 - a. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
 - b. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
 - 2 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
 - a. Monitoring bina ketahanan remaja
 - b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
- KB.03.02 C. Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 1 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - a. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
 - b. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
 - 2 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan

- 3 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 - a. Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 - b. Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah
- KB.04.02 C. Bina lini lapangan
 - 1 Tenaga lini lapangan
 - a. Pengembangan tenaga lini lapangan
 - b. Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
 - 2 Institusi Masyarakat Perkotaan
 - a. Pengembangan institusi masyarakat Perkotaan
 - b. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat Perkotaan
 - 3 Mekanisme Operasional lini lapangan
 - a. Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
 - b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
- KB.04.03 D. Pelaporan dan statistik
 - 1 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
 - a. Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
 - b. Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
 - 2 Pengumpulan dan pengolahan data
 - 3 Analisis dan evaluasi
 - a. Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
 - b. Analisi dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- KB.04.04 E. Teknologi Informasi dan Dokumentasi
 - 1 Sistem aplikasi dan bank data
 - a. Pengembangan sistem aplikasi
 - b. Pengelolaan bank data
 - 2 Infrastruktur teknologi informasi
 - a. Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi
 - b. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
 - 3 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
 - a. Dokumentasi dan perpustakaan
 - b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

HT.

XX URUSAN KEHUTANAN

- HT.00
 - 1 Perumusan Kebijakan dibidang : Penyuluhan, Planologi Kehutanan, Bina Usaha kehutanan, Standardisasi, Perlindungan Hutan dan Konservasi alam, Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Penelitian dan Pengembangan
 - HT.00.00 - Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - HT.00.01 - Penyiapan Kebijakan
 - HT.00.02 - Perumusan Kebijakan
 - HT.00.03 - Masukan dan dukungan kebijakan

- HT.00.04 - Penetapan NSPK
- HT.01
 - 2 Penyuluhan
 - 1 Program Kerja Penyuluhan
 - 2 Materi Penyuluhan
 - 3 Program Penyuluhan
 - 4 Sarana Penyuluhan
 - 5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
 - 6 Pemberdayaan Masyarakat
 - 7 Pelaksanaan Penyuluhan
 - 8 Diseminasi
 - 9 Evaluasi, dan Laporan
- HT.01.00
- HT.01.01
- HT.01.02
- HT.01.03
- HT.01.04
- HT.01.05
- HT.01.06
- HT.01.07
- HT.01.08
- HT.02
 - 3 Planologi Kehutanan
 - A Perencanaan Kawasan Hutan
 - 1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
 - 2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
 - 3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
 - HT.02.01 B Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
 - 1 Pengukuhan Kawasan Hutan
 - 2 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
 - 3 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
 - HT.02.02 C Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 - 1 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
 - 2 Pemantauan Sumber Daya Hutan
 - 3 Pemetaan Sumber Daya Hutan
 - 4 Jaringan Data Spasial
 - HT.02.03 D Penggunaan Kawasan Hutan
 - 1 Penggunaan Kawasan Hutan
 - 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
 - 3 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
 - HT.02.04 E Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
 - 1 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
 - 2 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
 - 3 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
- HT.03
 - 4 Bina Usaha Kehutanan
 - A HPH /HTI/IUPHHK
 - 1 Data areal HPH/HTI/IUPHHK
 - 2 SK HPH/HTI/IUPHHK
 - 3 Kerjasama
 - 4 Pembatalan/Penolakan
 - 5 Perpanjangan
 - HT.03.01 B Modal dan Peralatan
 - 1 Investasi Industri
 - 2 Peralatan
 - 3 Tenaga Kerja
 - 4 Pemegang Saham
 - 5 Neraca Perusahaan

- HT.03.02
 - C Rencana Karya
 - 1 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
 - 2 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
 - 3 Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
 - 4 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
- HT.03.03
 - D Produksi
 - 1 Target Produksi RKT dan Bagan Kerja
 - 2 Produksi Kayu
 - 3 Produksi Non Kayu
- HT.03.04
 - E Industri
 - 1 Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
 - 2 Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
 - 3 Industri Non Kayu
- HT.03.05
 - F Pembangunan Hutan Tanaman Industri
 - 1 Hutan Tanaman Industri Pulp
 - 2 Hutan Tanaman Industri Pertukangan
- HT.03.06
 - G Pelanggaran dan Sanksi
 - 1 Pemblokiran
 - 2 Denda
 - 3 Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
- HT.03.07
 - H Pemanfaatan Hutan Produksi
 - 1 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
 - 2 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
 - 3 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
 - 4 Pengembangan Investasi Usaha
- HT.03.08
 - I Pengembangan Hutan Alam
 - 1 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
 - 2 Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
 - 3 Produksi Hutan Alam
 - 4 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
- HT.03.09
 - J Pengembangan Hutan Tanaman
 - 1 Hutan Tanaman Industri
 - 2 Hutan Tanaman Rakyat
 - 3 Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman I
 - 4 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
 - 5 Pembiayaan Hutan Tanaman
- HT.03.010
 - K Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
 - 1 Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan
 - 2 Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
 - 3 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
- HT.03.011
 - L Pembinaan Hutan
 - 1 Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK

- 2 Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
- HT.04 5 Standardisasi Dan Lingkungan
- HT.04.00 A Standardisasi
 - 1 Kayu
 - 2 Non Kayu
 - 3 Produk
 - 4 Proses
- HT.04.01 B Sarana Pengujian Hasil Hutan
- HT.04.02 C Pengembangan
 - 1 Pengembangan Perusahaan
 - 2 Pengembangan Pemasaran
- HT.04.03 D Pemasaran Hasil Hutan
- HT.04.04 E Pengendalian Lingkungan
 - 1 Amdal di Dalam Kawasan Hutan
 - 2 Amdal di Luar Kawasan Hutan
- HT.04.05 F Angkutan Hasil Hutan
 - 1 Sarana dan Prasarana (Armada Angkutan, Kerjasama Angkutan, Tempat Pemuatan Hasil Hutan, Tempat Pengumpulan Log Pond dan Pengangkutan)
 - 2 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan (Angkutan dan Bongkar Muat)
- HT.04.06 G Tata Usaha Hasil Hutan
 - 1 Tanda Pengenal Perusahaan
 - 2 Legalitas
 - 3 Palu Tok Kualitas
 - 4 Pass Angkutan
 - 5 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
- HT.05 6 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
- HT.05.00 A Kawasan Konservasi
 - 1 Taman Wisata
- HT.05.01 B Pengamanan Hutan
 - 1 Pelanggaran
 - 2 Bencana Alam
 - 3 Kebakaran Hutan
 - 4 Sengketa Hutan
 - 5 Hama dan Penyakit
- HT.05.02 C Penyidikan dan Perlindungan Hutan
 - 1 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
 - 2 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah
 - 3 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- HT.05.03 D Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
 - 1 Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
 - 2 Pemanfaatan Jasa Lingkungan
 - 3 Pemanfaatan Wisata Alam
- HT.05.04 E Bina Cinta Alam
 - 1 Cinta Alam
 - 2 Kader Konservasi Sumber Daya Alam

- 3 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
- HT.06 7 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial
- HT.06.00 A Perbenihan
 - 1 Pemolaan Benih
 - 2 Kebun Benih
 - 3 Tegakan Benih
 - 4 Pengadaan Benih
 - 5 Pembibitan
 - 6 Pengembangan Sumber Benih
 - 7 Pengembangan Usaha Perbenihan
 - 8 Pengendalian Peredaran Benih
- HT.06.01 B Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 1 Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 2 Rehabilitasi Hutan
 - 3 Rehabilitasi Lahan
 - 4 Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah
- HT.06.02 C Tanaman Reboisasi
 - 1 Reboisasi Lahan Kritis
- HT.07 8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
- HT.07.00 A Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
 - 1 Perencanaan Program Penelitian
 - Penyusunan Rencana Anggaran Penelitian dan Pengembangan
 - Penyusunan Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
 - 2 Pelaksanaan Penelitian
 - Ijin penelitian data penelitian
 - Data Mentah Hasil Penelitian
 - Hasil Penelitian
 - Analisis Hasil Penelitian
 - Laporan Hasil Penelitian
- HT.07.01 B Monitoring dan Evaluasi Penelitian
 - 1 Monitoring Penelitian
 - 2 Evaluasi Penelitian
 - 3 Rekomendasi Penelitian
- HT.07.02 C Diseminasi
 - 1 Gelar Teknologi
 - 2 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
- KA. XX KEARSIPAN**
- KA.00 1 Kebijakan
 - Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip.
- KA.00.00 A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
- KA.00.01 B. Penyiapan kebijakan
- KA.00.02 C. Perumusan kebijakan
- KA.00.03 D. Penetapan NSPK
- KA.01 2 Pembinaan Kearsipan
- KA.01.00 A Akreditasi Kearsipan: Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan, Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan, dan Diklat Kearsipan

- 1 Proses Akreditasi
- 2 Berkas Penetapan Sertifikasi Akreditasi
- 3 Data Base Akreditasi
- KA.01.01 B Sertifikasi Arsiparis
 - 1 Proses Sertifikasi Arsiparis
 - 2 Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis
 - 3 Data Base Sertifikasi Arsiparis
- KA.01.02 C Bina Arsiparis
 - 1 Pengembangan Profesi Arsiparis
 - a. Formasi Jabatan Arsiparis
 - b. Standar Kompetensi Arsiparis
 - 2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
 - 3 Penilaian Arsiparis
 - 4 Pemilihan Arsiparis Teladan
 - a. Penyelenggaraan
 - b. Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
 - 5 Data Base Arsiparis
- KA.01.03 D Bimbingan dan Konsultasi
 - 1 Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan)
 - 2 Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
 - 3 Unit Kearsipan
 - 4 Sumberdaya Manusia
- KA.01.04 E Supervisi dan Evaluasi
 - 1 Perencanaan
 - 2 Pelaksanaan
 - 3 Laporan hasil supervisi dan Evaluasi
- KA.01.05 F Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
- KA.01.06 G Fasilitasi Kearsipan
 - 1 SDM Kearsipan
 - 2 Prasarana dan Sarana
- KA.01.07 H Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
 - 1 Penyelenggaraan
 - 2 Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
- KA.01.08 I Jadwal Retensi Arsip
 - 1 Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip
 - 2 Data Base Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip
- KA.02 3 Pengelolaan Arsip
- KA.02.00 A Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 1 Penciptaan
 - a Pencatatan
 - Buku Agenda
 - Kartu Kendali
 - Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi
 - b Pendistribusian
 - 2 Penggunaan
 - a Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip
 - b Peminjaman
 - 3 Pemeliharaan
 - a Pemberkasan
 - Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas)

- b Penataan Arsip Inaktif
 - Pengaturan fisik
 - Pengolahan informasi arsip
 - Penyusunan daftar arsip inaktif
 - c Penyimpanan arsip
 - Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif
 - Pengamanan
 - d Alih Media
 - Kebijakan alih media
 - Autentikasi
 - Berita acara
 - Daftar arsip yang alih mediakan
 - e Program Arsip vital
 - Identifikasi
 - Pelindungan dan pengamanan
 - Penyelamatan dan pemulihan
 - 4 Autentikasi Arsip Dinamis
 - a Pembuktian Autentisitas
 - b Pendapat tenaga ahli
 - c Pengujian
 - d Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip
 - 5 Penyusutan
 - a Pemindahan Arsip Inaktif
 - Berita acara Pemindahan
 - Daftar arsip yang di pindahkan
 - b Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna
 - Panitia penilai
 - Penilaian panitia penilai
 - Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan)
 - Penetapan arsip yang dimusnahkan
 - Berita Acara Pemusnahan Arsip
 - Daftar arsip yang dimusnahkan
 - c Penyerahan arsip statis
 - Pembentukan Panitia Penilai
 - Notulen Rapat Panitia
 - Surat pertimbangan Panitia Penilai
 - Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan
 - Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip
 - Keputusan Penetapan Penyerahan
 - Berita Acara Penyerahan Arsip
 - Daftar arsip yang diserahkan
 - 6 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
 - a Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
 - b Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
- KA.02.01 B Pengelolaan Arsip Statis
- 1 Akuisisi
 - a Monitoring fisik dan daftar
 - b Verifikasi terhadap daftar arsip
 - c Menetapkan status arsip statis
 - d Persetujuan untuk Penyerahan
 - e Penetapan arsip yang diserahkan

- f Berita Acara Penyerahan Arsip
- g Daftar arsip yang diserahkan
- 2 Sejarah Lisan
 - a Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan
 - b Hasil Wawancara Sejarah Lisan
 - Berita Acara wawancara Sejarah Lisan
 - Laporan Kegiatan
 - Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip
- 3 Daftar Pencarian Arsip Statis
 - a Pengumuman
 - b Akuisisi daftar pencarian arsip statis
- 4 Penghargaan dan Imbalan
- 5 Pengolahan
 - a Menata Informasi
 - b Menata Fisik
 - c Menyusun Sarana Bantu Temu Balik
 - Guide
 - Daftar Arsip Statis
 - Inventaris Arsip Statis
- 6 Preservasi
 - a Preventif
 - Penyimpanan
 - Pengendalian hama terpadu
 - Reproduksi (Alih Media)
 - 1. Berita Acara alih media
 - 2. Daftar Arsip yang dialih mediakan
 - Perencanaan dan Penanggulangan Bencana
 - b Kuratif
 - Perawatan Arsip
 - c Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi
- 7 Autentikasi Arsip Statis
 - a Pembuktian Autentisitas
 - b Pendapat tenaga ahli
 - c Pengujian
 - d Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan
- 8 Akses Arsip Statis
 - a Layanan Arsip
 - b Penerbitan Naskah Sumber
 - Administrasi dan proses penyusunan
 - hasil naskah sumber arsip
 - c Pameran arsip

PO.

PO.00

XXI PEMUDA DAN OLAHRAGA

- 1 Kebijakan Pemuda dan Olah Raga meliputi kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi dan Kemitraan meliputi : Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan
 - 2 Penyiapan kebijakan
 - 3 Perumusan dan penyusunan bahan
 - 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan

PO.00.00

PO.00.01

PO.00.02

PO.00.03

- PO.00.04 5 Penetapan dalam bentuk NSPK
- PO.01 2 Pemberdayaan Pemuda
- PO.01.00 A Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
 - 1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
 - a. Potensi Lokal (Provinsi)
 - b. Potensi Nasional
 - c. Potensi Internasional
 - 2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
 - a. Potensi Lokal (Provinsi)
 - b. Potensi Nasioanal
 - c. Potensi Internasional
 - 3 Pengembangan
 - a. Potensi Nasional
 - b. Potensi Internasional (Pertukaran Pemuda)
- PO.01.01 B Peningkatan Wawasan Pemuda
 - 1 Wawasan Kebangsaan
 - a. Program
 - b. Evaluasi
 - 2 Wawasan Lingkungan
 - a. Program
 - b. Evaluasi
 - 3 Wawasan Sosial dan Hukum
 - a. Program
 - b. Evaluasi
- PO.01.02 C Peningkatan Kapasitas Pemuda
 - 1 Kapasitas Imam dan Taqwa
 - a. Program
 - b. Evaluasi
 - 2 Kapasitas IPTEK
 - a. Program
 - b. Evaluasi
 - 3 Pemanfaatan IPTEK
 - a. Program
 - b. Evaluasi
- PO.01.03 D Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
 - 1 Kapasitas Imam dan Taqwa
 - a. Program
 - b. Evaluasi
 - 2 Pengembangan
 - a. Program
 - b. Evaluasi
 - 3 Pendayagunaan (fasilitas)
 - a. Program
 - b. Evaluasi
- PO.02 3 Pengembangan Pemuda
- PO.02.00 A Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
 - 1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
 - a. Program
 - b. Evaluasi
 - 2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan
 - a. Program
 - b. Evaluasi

- PO.02.01 B Kewirausahaan
 - 1 Kelembagaan
 - a. Program
 - b. Evaluasi
 - 2 Pengaderan
 - a. Program
 - b. Evaluasi
 - 3 Perintisan
 - a. Program
 - b. Evaluasi

- PO.02.02 C Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
 - 1 Organisasi Kepemudaan
 - a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
 - _ Program
 - _ Evaluasi
 - b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
 - _ Program
 - _ Evaluasi
 - c. Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
 - _ Program
 - _ Evaluasi
 - 2 Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
 - a. Pengkajian
 - b. Pengembangan

- PO.02.03 D Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda
 - 1 Standarisasi
 - a. Organisasi Kepemudaan
 - b. Prasarana dan Sarana Kepemudaan
 - c. Infrastruktur
 - 2 Infrastruktur Pemuda
 - a. Prasaranan Kepemudaan
 - b. Sarana Kepemudaan

- PO.02.04 E Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
 - 1 Kemitraan
 - a. Lintas Sektoral
 - b. Daerah
 - c. Luar Negeri
 - 2 Penghargaan Pemuda
 - a. Pengembangan Penghargaan Kepemudaan
 - b. Pengembangan Promosi Kepemudaan

- PO.03 4 Pembudayaan Olahraga
- PO.03.00 A Pengelolaan Olahraga Pendidikan
 - 1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
 - a. Pengembangan
 - b. Evaluasi
 - 2 Olahraga Pendidikan Tinggi
 - a. Pengembangan
 - b. Evaluasi
 - 3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
 - a. Pengembangan
 - b. Evaluasi

- PO.03.01 B Pengelolaan Olahraga Rekreasi
 - 1 Olahraga Massal
 - a. Pengembangan
 - b. Evaluasi
 - 2 Olahraga Tradisional
 - a. Pengembangan
 - b. Evaluasi
 - 3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
 - a. Pengembangan
 - b. Evaluasi

- PO.03.02 C Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
 - 1 Sentra Olahraga
 - a. Olahraga Pendidikan
 - _ Pengembangan
 - _ Evaluasi
 - b. Olahraga Rekreasi
 - _ Pengembangan
 - _ Evaluasi
 - a. Olahraga Prestasi
 - _ Pengembangan
 - _ Evaluasi
 - 2 Sekolah Khusus Olahraga
 - a. Kota
 - _ Pengembangan
 - _ Evaluasi

- PO.03.03 D Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
 - 1 Olahraga Tradisional
 - a. Lokal
 - b. Nasional
 - 2 Layanan Khusus
 - a. Olahraga Usia Dini dan Lansia
 - b. Olahraga Penyandang Cacat

- PO.03.04 E Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - 1 Kemitraan Keolahragaan
 - a. Lintas Sektoral
 - b. Daerah
 - c. Luar Negeri
 - 2 Penghargaan Olahraga
 - a. Penelusuran
 - b. Penyelenggaraan

- PO.04 5 Peningkatan Prestasi Olahraga
- PO.04.00 A Pebibitan dan IPTEK Olahraga
 - 1 Pembibitan Olahraga
 - a. Pemandu Bakat
 - _ Penelusuran Bakat
 - _ Penelaahan Bakat
 - b. Pengembangan Olahragawan Berbakat
 - _ Program
 - _ Evaluasi
 - c. Kompetisi
 - _ Nasional
 - _ Internasioanal
 - 2 IPTEK Olahraga
 - a. Penerapan

- UU.00.00 a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
- UU.00.01 b. Penyiapan kebijakan
- UU.00.02 c. Perumusan dan penyusunan bahan
- UU.00.03 d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
- UU.00.04 e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)
- UU.01 2 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/REGLING
- UU.01.00 a PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - 1) Usul Prakarsa Peraturan Perundang-Undangan
 - 2) Bahan/materi program legislasi daerah dari instansi daerah
 - 3) Program legislasi instansi daerah
- UU.01.01 b. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - 1) Naskah Akademik Peraturan Daerah (PERDA)
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
 - 3) Tanggapan/Pendapat Para Ahli terhadap Peraturan Daerah (Perda)
 - 4) Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di instansi Pengusul
 - 5) Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
 - 6) Keterangan, Jawaban Pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
- UU.01.02 c PEMBAHASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - 1) Permohonan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
 - 2) Tanggapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
 - 3) Penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan draft akhir
- UU.01.03 d PENGESAHAN DAN PENETAPAN
 - 1) Pemberian paraf oleh lembaga terkait
 - 2) Penandatanganan draf final oleh pimpinan lembaga pengusul
 - 3) Penandatanganan oleh pejabat yang menetapkan
- UU.01.04 e PENGUNDANGAN
 - 1) Permohonan pengajuan pengundangan pada Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah
 - 2) Permohonan pengajuan pengundangan pada Berita Daerah dan Tambahan Berita Daerah
 - 3) Permohonan pengajuan pengundangan pada Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah
 - 4) Permohonan pengajuan pengundangan pada Berita Daerah dan Tambahan Berita Daerah
- UU.02 3 PEMBENTUKAN KEPUTUSAN/PENETAPAN (*BESCHIKKING*)
- UU.02.00 a. Keputusan/Surat Edaran/Instruksi: Walikota
 - 1. Keputusan Pimpinan Pemerintah Daerah:
 - Pengajuan draf dari unit pengusul
 - Telaah hukum
 - Perbaikan draf
 - Penetapan

| | | |
|----------|----|--|
| UU.03 | 4 | PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi peraturan perundang-undangan Penyebarnya peraturan perundang-undangan |
| UU.04 | 5 | KERJASAMA HUKUM |
| UU.04.00 | a. | Usul prakasa dari lembaga/unit kerja |
| UU.04.01 | b. | konsultasi dan koordinasi |
| UU.04.02 | c. | Rapat interdep/antar unit |
| UU.04.03 | d. | draf/counter draf |
| UU.04.04 | e. | penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan/pemarafan |
| UU.04.05 | f. | Draf final |
| UU.04.06 | g. | Penandatanganan/pengesahan |
| UU.05 | 6 | DOKUMENTASI HUKUM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) |
| UU.06 | 7 | UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| UU.06.00 | a. | Pengajuan permohonan |
| UU.06.01 | b. | pendaftaran |
| UU.06.02 | c. | Penjadwalan sidang |
| UU.06.03 | d. | Pemeriksaan Pendahuluan |
| UU.06.04 | e. | Pemeriksaan Persidangan |
| UU.06.05 | f. | Putusan |

KK.

XXIII KEAMANAN DAN KETERTIBAN

| | | |
|----------|----|--|
| KK.00 | A. | KEBIJAKAN Kebijakan: profesi & pengamanan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, intelijen keamanan, pemelihara keamanan |
| KK.00.00 | 1. | Pengkajian dan pengusulan kebijakan |
| KK.00.01 | 2. | Penyiapan Kebijakan |
| KK.00.02 | 3. | Perumusan kebijakan |
| KK.00.03 | 4. | Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) |
| KK.00.04 | 5. | MOU |
| KK.01 | B. | Profesi dan Pengamanan |
| KK.01.00 | 1. | Pengamanan Internal |
| | a. | Pembinaan Pengamanan |
| | 1) | Pengamanan personel dan bahan keterangan |
| | 2) | Pengamanan materiil |
| | 3) | Pengamanan kegiatan |
| | b. | Penelitian personel |
| | 1) | Pembinaan operasional |
| | 2) | Pencatatan personel |
| | c. | Produksi dokumentasi |
| | 1) | Produksi, analisis dan evaluasi |
| | 2) | Dokumentasi |
| KK.01.01 | 2. | Pertanggungjawaban Profesi |
| | a. | Standardisasi |
| | 1) | Organisasi manajemen |
| | 2) | Sumber daya |
| | 3) | Akreditasi |
| | b. | Pembinaan etika |
| | 1) | Kode etik |
| | 2) | Penerapan etika |
| | c. | Penegakan etika |

- 1) Au
dit
 - 2) Pemeriksaan
- KK.02 C. Pemelihara Keamanan
- KK.02.00 1 Pembinaan penertiban masyarakat
 - a. Pembinaan pemuda, anak dan wanita
 - b. Penertiban sosial
 - c. Koordinasi dan rehabilitasi
 - KK.02.01 2 Pembinaan keamanan swakarsa
 - a. Pembinaan satuan pengamanan
 - b. Pengawasan jasa pengamanan
 - c. Manajemen pengamanan
 - KK.02.02 3 Pembinaan perpolisian masyarakat
 - a. Pembinaan dan kemampuan
 - b. Pembinaan potensi masyarakat
 - c. Pembinaan sistem keamanan lingkungan
 - KK.02.03 4 Pembinaan polisi khusus
 - a. Pembinaan dan pelatihan
 - b. Koordinasi dan pengawasan
 - c. Analisis dan evaluasi
 - KK.02.04 5 Pemeliharaan ketertiban umum
 - a. Tindak pidana ringan
 - b. Tindakan pertama tempat kejadian perkara
 - c. Pengamanan tenaga kerja Indonesia
 - KK.02.05 6 Pengendalian masyarakat
 - a. Negosiasi
 - b. Pembinaan pengendalian masyarakat
 - KK.02.06 7 Patroli dan pengawalan
 - a. Patroli
 - b. Pengawalan
 - c. Call center 110
 - d. *Police backbone*
 - KK.02.07 8 Pengamanan Obyek Vital
 - a. Pengamanan VVIP/VIP
 - b. Pengamanan pariwisata
 - c. Pengamanan obyek vital nasional/daerah/obyek vital
 - d. Audit sistem pengamanan obyek vital nasional
- KK.03 D Penanggulangan kejahatan terorisme
- KK.03.00 1. Intelijen
 - a. Analisis terhadap lapangan dan penilaian informasi
 - b. Deteksi
 - KK.03.01 2. Pencegahan
 - a. Pembinaan dan penyuluhan
- KK.04 E. Intelijen keamanan
- KK.04.00 Pelayanan masyarakat
 - a. Kegiatan masyarakat
 - b. Orang asing
- KK.05 F. Teknologi Informasi
- KK.05.00 1. Teknologi komunikasi
 - a. Pengkajian sistem komunikasi
 - b. Operasional komunikasi
 - c. Materiil komunikasi
 - d. Kontrak/surat perjanjian jual beli
 - KK.05.01 2. Teknologi Informasi

- KK.06 G a. Pengkajian sistem
- KK.06.00 b. Situs Pol PP
- KK.06.01 d. Dukungan Teknis
- KK.06.01 Komunitas Intelelejen daerah (Kominda)
- KK.06.01 a. Data
- KK.06.01 b. Fasilitasi

PL. XXIV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- PL.00 A. Kebijakan
- PL.00.00 Kebijakan bidang diklat
- PL.00.01 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakann
- PL.00.02 2 Penyiapan kebijakan
- PL.00.03 3 Perumusan kebijakan
- PL.00.04 4 Masukan dan dukungan kebijakan
- PL.01 B. Pendidikan dan pelatihan
- PL.01.00 1 Pengembangan program dan pembinaan diklat
- PL.01.01 a. Standarisasi
- PL.01.01 b. Akreditasi
- PL.01.01 1) Institusi penilai
- PL.01.01 2) Program/institusi yang dinilai
- PL.01.01 c. Kurikulum dan modul
- PL.01.01 d. Sistem informasi
- PL.01.01 e. Monitoring dan evaluasi
- PL.01.01 f. Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
- PL.01.01 2 Pembinaan widyaiswara
- PL.01.01 a. Seleksi dan pengembangan
- PL.01.01 b. Sertifikasi
- PL.01.01 c. Monitoring dan evaluasi
- PL.01.01 d. Penilaian
- PL.01.01 e. Konsultasi, advokasi dan asistensi
- PL.01.01 f. Sistem informasi
- PL.01.02 3 Penyelenggaraan diklat
- PL.02. a. Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan
- PL.02..00 b. Penyelenggaraan
- PL.02..01 c. Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
- PL.02..01 d. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
- PL.02..01 e. Sistem informasi diklat
- PL.02..01 f. Monitoring dan evaluasi
- PL.02..01 1) Penyelenggara
- PL.02..01 2) Pasca diklat
- PL.02. g. Alumni
- PL.02. C. Laporan Statistik Penyelenggaraan Diklat
- PL.02..00 1 Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester
- PL.02..01 2 Laporan Statistik Tahunan

PG. XXV PENGADAAN

- PG.00 A. Kebijakan: Pengembangan Strategi, Monitoring-evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
- PG.00.00 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan
- PG.00.01 2 Penyiapan kebijakan
- PG.00.02 3 Perumusan dan penyusunan bahan
- PG.00.03 4 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
- PG.00.04 5 Penetapan kebijakan

- PG.00.05 6 MOU
- PG.01 B. PELAKSANAAN PENGADAAN
- PG.01.00 1 Penyusunan rencana umum pengadaan
 - a. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa
 - b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan
 - c. Penetapan Kebijakan Umum
 - d. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - e. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
- PG.01.01 2 Pemilihan Penyedia
 - a. Persiapan Pemilihan Penyedia
 - 1) Kaji ulang pengadaan
 - 2) Menyusun dan Menetapkan spesifikasi teknis
 - 3) Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - 4) Menetapkan rancangan kontrak
 - 5) Menyusun dokumen pengadaan
 - b. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
 - 1) Organisasi Internasional
 - i Pengumuman
 - ii Pendaftaran
 - iii Penjelasan pekerjaan
 - iv Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - v Evaluasi penawaran
 - vi Penetapan dan pengumuman pemenang
 - 2) *e-Purchasing*
 - 3) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung
- PG.01.02 3 Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak
 - a. Penandatanganan Kontrak
 - 1) Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 - 2) Kontrak
 - 3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 - b. Pelaksanaan Kontrak
 - 1) Laporan Pelaksanaan
 - 2) Berita Acara Serah Terima (BAST)
- 4 Swakelola
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pengawasan dan evaluasi
- PG.02 C. PENGEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN
- PG.02.00 1 Pengembangan Strategi Pengadaan Umum
 - a. Barang dan jasa
 - 1) Barang dan jasa lainnya
 - 2) Jasa Konsultansi
 - b. Pekerjaan Konstruksi
 - 1) Pelaksana Konstruksi
 - 2) Perencana dan Pengawas Konstruksi
- PG.02.01 2 Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus
 - a. Kemitraan pemerintah dengan badan usaha
 - 1) Kemitraan infrastruktur
 - 2) Kemitraan non infrastruktur
 - b. Badan usaha dan keadaan khusus
 - 1) Badan usaha
 - 2) Bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus

- PG.02.02
 - 3 Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
 - a. Pengembangan pelaku usaha
 - 1) Laporan Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha
 - 2) Dokumen Kajian Pengembangan Pelaku Usaha
 - b. Pengembangan kesempatan usaha
 - 1) Laporan Kegiatan Pengembangan Kesempatan Usaha
 - 2) Dokumen Kajian Pengembangan Kesempatan Usaha
 - c. Kerjasama multilateral
 - 1) Laporan Kerjasama Multilateral
 - 2) Dokumen Kajian Kegiatan Kerjasama Multilateral
 - d. Kerjasama bilateral
 - 1) Laporan Kerjasama Bilateral
 - 2) Dokumen Kajian Kerjasama Bilateral
- PG.03
 - D. MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
- PG.03.00
 - 1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
 - a. Perencanaan pengadaan
 - 1) Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah
 - b. Monitoring dan evaluasi
 - 1) Pelaksanaan kebijakan pengadaan
 - 2) Kinerja pelaksanaan pengadaan
- PG.03.01
 - 2 Pengembangan Sistem Katalog
 - a. Riset dan kontrak
 - 1) Riset Pasar dan Industri
 - 2) Kontrak payung
 - b. Pengelolaan katalog
 - 1) Pengendalian pelaksanaan katalog
 - 2) Evaluasi katalog
- PG.03.02
 - 3 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
 - a. Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi
 - 1) Pengembangan aplikasi SPSE
 - 2) Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE
 - b. Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik
 - 1) Bimbingan Teknis LPSE
 - 2) Monitoring dan Evaluasi LPSE Daerah
- PG.04
 - E. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
- PG.04.00
 - 1 Pengembangan pengelola pengadaan
 - a. Karir pengelola pengadaan
 - b. Tata kelola pengelola pengadaan
 - c. Unit layanan pengadaan
 - d. Standar kompetensi
- PG.04.01
 - 2 Pelatihan Kompetensi
 - a. Penyelenggaraan diklat
 - 1) Konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat
 - 2) Perencanaan: peserta, pengajar, penjadwalan
 - 3) Penyelenggaraan
 - 4) Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
 - 5) Monitoring dan Evaluasi
 - 6) Sistem informasi
 - 7) Alumni
 - b. Pembinaan Pengajar/Narasumber
 - 1) Seleksi dan pengembangan
 - 2) Sertifikasi

- 3) Monitoring dan Evaluasi
 - 4) Sistem informasi
 - c. Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP)
 - 1) Penilaian (Pre Akreditasi, Akreditasi, Surveilen)
 - 2) Hubungan Kerjasama dengan LPP
 - 3) Kajian
 - 4) Sistem informasi
- PG.04.02 3 Sertifikasi Profesi
- a. Sistem dan sarana sertifikasi
 - 1) Sistem sertifikasi
 - i Dokumen ISO
 - ii Dokumen Kebijakan/Reguler
 - 2) Sarana sertifikasi
 - i Dokumen Inventarisasi dan Pemeliharaan Sarana
 - ii Master soal
 - b. Tata Kelola dan evaluasi sertifikasi
 - 1) Tata kelola sertifikasi
 - i Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Ujian
 - 2) Evaluasi dan surveilen
 - i Dokumen Evaluasi
 - ii Dokumen Surveilen
- PG.05 F. Hukum dan Penyelesaian Sanggah
- PG.05.00 1 Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi
Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara dan agama
- PG.05.01 2 Penanganan Permasalahan Hukum
- a. Penanganan permasalahan kontrak
 - 1) Penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa
 - 1) Penanganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi
 - b. Keterangan ahli
 - 1) Keterangan ahli barang dan jasa
 - 1) Keterangan ahli pekerjaan konstruksi
- PU. **XXVI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
- PU.00 A. KEBIJAKAN
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi: Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- PU.00.00 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan
- PU.00.01 2 Penyiapan kebijakan
- PU.00.02 3 Perumusan kebijakan dan penyusunan bahan
- PU.00.03 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
- PU.00.04 5 Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)
- PU.01 B SUMBER DAYA AIR
- PU.01.00 1 Bina Penatagunaan Sumber Daya Air
- a. Perencanaan Wilayah Sungai
 - 1) Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 3) Pelaporan
 - b. Pengaturan dan Pemantauan
 - 1) Bimbingan teknis dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya

- PU.01.05 6
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
 - f. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - Air Tanah dan Air Baku
 - a. Pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air
 - b. Penilaian kesiapan pelaksanaan air tanah dan air baku dan konservasi fisik sumber daya air
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
 - d. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- PU.01.06 7
- Bina Operasi dan Pemeliharaan
- a. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
 - 1) Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 3) Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
 - 4) Operasi dan pemeliharaan sumber daya air
 - 5) Audit teknis
 - b. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
 - 1) Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 3) Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
 - 4) Operasi dan pemeliharaan sumber daya air
 - 5) Audit teknis
 - c. Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau
 - 1) Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 3) Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
 - 4) Operasi dan pemeliharaan sumber daya air
 - 5) Audit teknis
 - d. Fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik jaringan Sumber Daya Air
- PU.02 C BINA MARGA
- PU.02.00 1 Pengembangan Jaringan Jalan
- a. Perencanaan dan Sistem Jaringan
 - 1) Perencanaan Strategis
 - 2) Sistem Jaringan
 - b. Program dan anggaran penyelenggaraan jalan
 - c. Pengembangan Aplikasi Manajemen Jalan
 - 1) Analisa Data Jalan dan Jembatan Nasional dan Daerah
 - 2) Pengembangan Sistem Jalan dan Jembatan Nasional dan Daerah
 - 3) Pengelolaan data dan informasi
 - d. Lingkungan dan Keselamatan Jalan
 - 1) Teknik lingkungan bidang jalan
 - 2) Keselamatan Jalan
 - 3) Audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan
 - e. Pemantauan dan Evaluasi
 - 1) Pemantauan
 - 2) Evaluasi dan pelaporan
- PU.02.01 2 Pembangunan Jalan

- a. Manajemen Konstruksi
 - 1) Program dan Anggaran
 - 2) Pengendalian dan pembinaan konstruksi jalan Daerah kabupaten/kota yang bersumber APBN
 - 3) Pengendalian dan pembinaan konstruksi jalan Daerah kabupaten/kota yang bersumber kerjasama luar negeri
 - 4) Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA
 - 5) Pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan
 - 6) Pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan
 - 7) Pembinaan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas
 - 8) Pembinaan teknis Sistem Manajemen Mutu
 - 9) Pembinaan teknis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 - 10) Pembinaan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan
 - 11) Pengujian mutu konstruksi
 - 12) Monitoring, koordinasi dan pengendalian pekerjaan konstruksi
 - 13) Penetapan leger jalan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Geometrik, Perkerasan dan Drainase
 - 1) Pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan
 - 2) Pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan jalan
 - 3) Pembinaan pelaksanaan teknologi bahan
 - 4) Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi
 - 5) Pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan teknologi tinggi drainase jalan
 - c. Geoteknik dan Manajemen Lereng
 - 1) Pembinaan teknis perencanaan tanah
 - 3) Pengembangan dan penerapan teknologi tanah
 - 4) Penyediaan konsultasi teknis
 - 5) Pembinaan teknis perencanaan mitigasi daerah rawan gempa, patahan dan manajemen
 - 6) Mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan
 - 7) Pembinaan manajemen mitigasi daerah rawan longsor
 - d. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan
 - 1) Pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan
 - 2) Rekomendasi dan penetapan laik fungsi jalan nasional
 - 3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan jalan
- PU.02.02 3 Preservasi Jalan
- a. Perencanaan dan Pemrograman
 - 1) Pengolahan, analisis dan validasi data
 - 2) Pembinaan teknis survey jalan
 - 3) Bimbingan teknis perencanaan program preservasi jalan
 - 4) Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan
 - 5) Pengaturan penyediaan, pemantauan

- pengendalian dan evaluasi pemanfaatan
 - 6) Pemenuhan serta pembinaan manajemen pemeliharaan dan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan
 - 7) Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran
 - 8) Pembinaan penyiapan bahan usulan penyusunan program
 - 9) Fasilitasi Unit Pengelola Dana
 - 10) Pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi
 - 11) Pengembangan teknologi bahan dan peralatan
 - 12) Pembinaan teknis pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam
 - 13) Pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam
 - 14) Pemantauan penanganan rawan kecelakaan
 - b. Teknik Rekonstruksi dan Berkala Jalan
 - 1) Pembinaan program, penyediaan konsultasi perencanaan
 - 2) Pengendalian program dan penyediaan konsultasi teknis rekonstruksi dan berkala jalan
 - 3) Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis
 - 4) Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan
 - 5) Penerapan teknologi bahan perkerasan
 - 6) Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian
 - 7) Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan nasional/Daerah
 - c. Teknik Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 1) Penyusunan, pembinaan dan pengembangan teknis perencanaan
 - 2) Pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis
 - 3) Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis
 - 4) Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan
 - 5) Penerapan teknologi bahan perkerasan
 - 6) Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian
 - d. Pemantauan dan Evaluasi
 - 1) Pemantauan
 - 2) Evaluasi
- PU.02.03 4 Jembatan
- a. Perencanaan dan Pemrograman
 - 1) Pengolahan, analisis dan validasi data jembatan nasional/daerah
 - 2) Pembinaan metodologi survey, sistem manajemen jembatan dan mitigasi bencana alam
 - 3) Audit keselamatan jembatan
 - 4) Pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan

- 5) Pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan
 - 6) Penyusunan usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah penyelenggaraan jembatan
 - 7) Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan jembatan nasional
 - 8) Penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan jembatan
 - 9) Pembinaan dan bantuan teknik Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan dan preservasi jembatan
 - j. Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi
 - b. Teknik Jembatan
 - 1) Pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknik pembangunan dan preservasi
 - 2) Monitoring dan evaluasi serta pengembangan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jembatan
 - 3) Perencanaan teknik jembatan berdasarkan permintaan khusus
 - 4) Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA
 - 5) Fasilitasi penetapan laik fungsi jembatan
 - c. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
 - 1) Pembinaan, bantuan teknik dan inventarisasi
 - 2) Monitoring dan evaluasi perencanaan teknik, pembangunan, preservasi
 - 3) Penggunaan (khusus) dan laik fungsi terowongan, underpass, jembatan bentang panjang dan *fly over*
 - 4) Standar dokumen spesifikasi khusus terowongan, *underpass*, jembatan bentang panjang dan *fly over*
 - 5) Perencanaan teknik terowongan, *underpass*, jembatan bentang panjang dan *fly over* berdasarkan permintaan khusus
 - 6) Pengembangan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi terowongan, *underpass*, jembatan bentang panjang dan *fly over* berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan terowongan
 - 7) Analisa perilaku jembatan khusus dan terowongan
 - 8) Inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi bahaya jembatan khusus dan terowongan
 - 9) Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA
 - 10) Evaluasi teknis jembatan khusus dan terowongan
 - d. Pemantauan dan Evaluasi
 - 1) Pemantauan
 - 2) Evaluasi
- 5 Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah
- a. Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah
 - 1) Penilaian, koordinasi dan fasilitasi usulan program penanganan jalan daerah yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana

PU.02.04

- pusat lainnya
- 2) Tata laksana pengelolaan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan dan proses fasilitasi pembiayaan untuk jalan daerah
- 3) Rencana pengendalian program jalan daerah dan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan
- 4) Pengolahan, analisis dan validasi data manajemen jalan daerah
- 5) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan daerah
- b. Bimbingan Teknik Jalan Daerah
 - 1) Perencanaan daerah beserta konektivitas jaringan jalan
 - 2) Pemrograman jalan beserta konektivitas jaringan jalan
 - 3) Pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan jalan
- c. Pengendalian pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan jalan
- d. Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
 - 1) Pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan, teknik pelaksanaan pembangunan, pemrograman jalan
 - 2) Pengolahan, validasi, dan analisis data
 - 3) Monitoring dan Evaluasi
- e. Jalan Bebas Hambatan
 - 1) Pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan pemrograman jalan bebashambatan dan jalan tol
 - 2) Perencanaan teknis jalan tol dengan biaya APBN/dengan dukungan pemerintah
 - 3) Pengembangan jaringan jalan tol terintegrasi jalan nasional
 - 4) Pengolahan, validasi dan analisis data manajemen jalan bebas hambatan
 - 5) Monitoring dan Evaluasi
- f. Pengadaan Tanah
 - 1) Perencanaan dan pemrograman
 - 2) Inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah
 - 3) Prosedur kerja dan fasilitasi sosialisasi pengadaan tanah
 - 4) Sertifikasi hasil pengadaan tanah
 - 5) Pembinaan pelaksanaan studi pembebasan tanah
 - 6) Pengamanan aset hasil pembebasan lahan
 - 7) Koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah
- 6 Pengaturan Jalan Tol
 - a. Persiapan pengusahaan jalan tol
 - 1) Analisa kelayakan jalan tol
 - 2) Studi kelayakan jalan tol
 - 3) Analisa dampak lingkungan jalan tol
 - b. Pengadaan investasi jalan tol
 - c. Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol

- d. Pemantauan dan evaluasi
 - e. Evaluasi Rencana Teknik Akhir (RTA) dan *Detail Engineering Design* (DED)
- PU.03
PU.03.00
- D. CIPTA KARYA
- 1 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
- a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
 - 1) Keterpaduan perencanaan pembangunan
 - 2) Fasilitasi kemitraan
 - b. Keterpaduan Pembiayaan
 - 1) Penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan
 - 2) Fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan
 - 3) Fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya
 - c. Keterpaduan Pelaksanaan
 - 1) Fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan
 - 2) Pemantauan dan pelaporan
 - d. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
 - 1) Pengelolaan data
 - 2) Pengembangan sistem informasi
 - e. Pemantauan dan Evaluasi
 - 1) Pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan
 - 2) Pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman
- PU.03.01
- 2 Pengembangan Kawasan Permukiman
- a. Perencanaan Teknis
 - 1) Pemantauan dan evaluasi
 - 2) Pengelolaan data dan informasi
 - 3) Penyebarluasan informasi
 - b. Kawasan Permukiman Perkotaan
 - 1) Pelaksanaan pembangunan
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan
 - 3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan
 - c. Kawasan Permukiman Perdesaan
 - 1) Pelaksanaan pembangunan
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan
 - 3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan
 - d. Kawasan Permukiman Khusus
 - 1) Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu
 - 3) Fasilitasi penyediaan tanah, implementasi inovasi dan pengembangan jaringan kemitraan
 - e. Standarisasi dan Kelembagaan
 - 1) Standarisasi Pengembangan Kawasan Permukiman
 - 2) Kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat

- PU.03.02
- 3) Pemantauan dan evaluasi
- 3 Bina Penataan Bangunan
- a. Perencanaan Teknis
- 1) Penyusunan rencana
 - 2) Pemantauan dan evaluasi
 - 3) Pengelolaan data dan informasi
 - 4) Penyebarluasan informasi
 - 5) Analisa Teknis
- b. Penataan Bangunan Gedung Umum dan Gedung Negara
- 1) Bimbingan dan bantuan teknis
 - 2) Supervisi
 - 3) Pengembangan jejaring kemitraan
 - 4) Pengelolaan sistem informasi
 - 4) Fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan
- c. Pengelolaan Rumah Negara
- 1) Bimbingan Teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara
 - 2) Layanan Data dan Informasi
 - 3) Pendaftaran pengalihan status Rumah Negara
- d. Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
- 1) Pembangunan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik
 - 3) Inventarisasi data dan pengembangan jaringan kemitraan
- e. Standarisasi dan Kelembagaan
- 1) Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan
 - 2) Pelembagaan pengaturan
 - 3) Pengembangan jejaring kemitraan
 - 4) Pembinaan sumber daya manusia
- PU.03.03
- 4 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- a. Perencanaan Teknis
- 1) Analisa Teknis
 - 2) Pengelolaan data dan informasi
 - 3) Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 4) Evaluasi dan Pelaporan
- b. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
- 1) Pelaksanaan pembangunan
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan
- c. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan
- 1) Pelaksanaan pembangunan
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan
- d. Sistem Penyediaan Air Minum Khusus

- 1) Pembangunan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu
 - 3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan
 - e. Standarisasi dan Kelembagaan
 - 1) Standarisasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum
 - 2) Kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum
 - 3) Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 4) Pemantauan dan evaluasi
 - f. Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun
 - g. pengolahan sistem penyediaan air minum Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum
- PU.03.04 5 Pengembangan Kesehatan Lingkungan Pemukiman
- a. Perencanaan Teknis
 - 1) Analisa Teknis
 - 2) Pengelolaan data dan informasi
 - 3) Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem
 - 4) Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Pengelolaan Air Limbah
 - 1) Pelaksanaan pembangunan
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 3) Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset
 - c. Pengelolaan Persampahan
 - 1) Pengembangan sistem
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 3) Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset
 - d. Kesehatan Lingkungan Permukiman Khusus
 - 1) Pembangunan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu
 - 2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu
 - 3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset, implementasi inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan
 - e. Standarisasi dan Kelembagaan
 - 1) Standarisasi penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan
 - 2) Kelembagaan penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan
 - 3) Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Kesehatan Lingkungan

- Permukiman
- 4) Pemantauan dan evaluasi
- f. Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman
- g. Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman
- PU.03.05 6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a. Penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah
 - b. Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah
 - c. Pemberian rekomendasi
 - 1) Peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum
 - 2) Keseimbangan kepentingan antara penyelenggaraan dengan pelanggan
- PU.04 E PENYEDIAAN PERUMAHAN
- PU.04.00 1 Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - a. Keterpaduan Perencanaan
 - 1) Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan
 - 2) Bimbingan Perencanaan
 - b. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
 - 1) Skala besar
 - 2) Bukan skala besar
 - c. Kemitraan dan kelembagaan
 - 1) Kemitraan dengan lembaga pemerintah
 - 2) Pembinaan kelembagaan
 - d. Pengelolaan Data dan Informasi
 - e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- PU.04.01 2 Penyediaan Rumah Susun
 - a. Perencanaan Teknik
 - 1) Analisa teknik
 - 2) Penyusunan rencana
 - b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi
- PU.04.02 3 Penghunian dan pengelolaan rumah susun
 - a. Fasilitasi penghunian, pengalihan dan pemanfaatan
 - b. Fasilitasi pengelolaan
 - c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- PU.04.03 4 Penyediaan Rumah Khusus
 - a. Perencanaan teknis rumah tapak khusus
 - 1) Analisa teknik
 - 2) Penyusunan rencana
 - b. Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara
 - c. Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
 - 1) Pengelolaan Aset di bidang Rumah Khusus
 - 2) Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Tapak Khusus
 - d. Bimbingan teknis dan supervisi
 - e. Pemantauan dan Evaluasi
 - 1) Penyusunan pedoman evaluasi kinerja

- 2) Pemantauan dan evaluasi
 - d. Manajemen Mutu
 - 1) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 2) Pemantauan dan evaluasi
 - 3 Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
 - a. Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat
 - 1) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 2) Pemantauan dan evaluasi
 - b. Material dan Peralatan Konstruksi
 - 1) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 2) Pemantauan dan evaluasi
 - c. Teknologi Konstruksi dan Produk Dalam Negeri
 - 1) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 2) Pemantauan dan evaluasi
 - d. Usaha Jasa Konstruksi
 - 1) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 2) Pemantauan dan evaluasi
- 4 Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
 - a. Standar dan Materi Kompetensi
 - 1) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 2) Pemantauan dan evaluasi
 - b. Penerapan Kompetensi
 - 1) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 2) Pemantauan dan evaluasi
 - c. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
 - 1) Standarisasi profesi
 - 2) Fasilitasi penyetaraan kompetensi
 - d. Produktivitas
 - 1) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 2) Pemantauan dan evaluasi
- 5 Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - a. Kerjasama
 - 1) Bimbingan teknis dan supervisi
 - 2) Pemantauan dan evaluasi
 - b. Pemberdayaan Wilayah
 - 1) Penjaminan Mutu
 - 2) bimbingan teknis dan supervisi
 - 3) Pemantauan dan evaluasi
- 6 Jasa Konstruksi oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya
 - a. Rencana Kerja Pengendalian Mutu
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
 - c. Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya
 - d. Pelaksanaan Pengendalian Mutu
 - 1) Peningkatan kapasitas jasa konstruksi
 - 2) Penyelenggaraan jasa konstruksi
 - e. Pelaporan dan Pengawasan
- 7 Penerapan Teknologi Konstruksi
 - a. Rencana Kerja
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama
 - 1) Kordinasi peningkatan penerapan teknologi konstruksi
 - 2) Sinkronisasi peningkatan penerapan teknologi konstruksi
 - 3) Kerjasama peningkatan penerapan teknologi konstruksi

- c. Fasilitasi Pengembangan dan Penyebarluasan Materi
 - d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- PU.05.07 8 Material dan Peralatan Konstruksi
 - a. Rencana Kerja
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama
 - 1) Kordinasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi
 - 2) Sinkronisasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi
 - 3) Kerjasama bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi
 - c. Pengelolaan Data dan Aset
 - d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- PU.06
- PU.06.00 G PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 - 1 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
 - a. Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan
 - b. Pembiayaan Perumahan dan Analisis Pasar
 - 1) Analisis pasar perumahan dan indikator makro ekonomi
 - c. Kemitraan dan kerja sama
 - 1) Dalam Negeri
 - 2) Luar Negeri
 - d. Data dan Dokumentasi
 - 1) Pengelolaan data dan dokumentasi
 - 2) Pengelolaan sistem informasi
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
 - PU.06.01 2 Pola Pembiayaan Perumahan
 - a. Perencanaan, Program dan Pelaporan
 - b. Pengembangan pola pembiayaan rumah umum dan rumah tapak Fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah
 - c. Pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya, dan mikro perumahan
 - d. Pengembangan pola investasi rumah
 - e. Fasilitasi kemudahan dan bantuan
 - PU.06.02 3 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan
 - a. Rencana, program, dan pelaporan
 - b. Pendayagunaan sumber pembiayaan primer dan sekunder
 - c. Pendayagunaan sumber tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya
 - PU.06.03 4 Bina Sistem Pembiayaan Perumahan
 - 1 Rencana, Program dan Pelaporan
 - 2 Bimbingan Teknis dan Supervisi
 - PU.06.04 5 Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan
 - 1 Rencana
 - 2 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
 - PU.06.05 6 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
 - a. Layanan Pembiayaan Perumahan
 - 1) Sosialisasi dan promosi
 - 2) Kerjasama
 - 3) Verifikasi tagihan
 - b. Operasi kegiatan
 - 1) Pendayagunaan dan pengembangan teknologi dan informasi
 - 2) Pendayagunaan dan pemeliharaan database

- 3) Pemantauan dan evaluasi
- PU.07 H. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
- PU.07.00 1 Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- a. Rencana strategis dan analisa manfaat
- 1) Rencana strategis
 - 2) Analisa manfaat dan skema pembiayaan
 - 3) Pengelolaan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu
 - 4) Kerja sama tingkat regional dan global
- b. Perencanaan infrastruktur
- 1) Rencana keterpaduan antarsektor
 - 2) Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu lingkup pulau/kepulauan,
 - 3) Rencana aksi keterpaduan antarsektor
 - 4) Bimbingan keterpaduan antarsektor dan antar wilayah
- PU.07.01 2 Pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- a. Program
- 1) Analisis kelayakan dan kriteria program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
 - 2) Fasilitasi penyusunan dan sinkronisasi program jangka pendek keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan dalam lingkup maupun WPS
- b. Sinkronisasi program dan pembiayaan
- 1) Sinkronisasi program dan dana pembangunan jangka tahunan dalam keterpaduan
 - 2) Sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana dalam keterpaduan pengembangan kawasan
 - Dana alokasi khusus
 - Dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
 - Skema pendanaan lainnya
- PU.07.02 3 Pemantauan dan evaluasi program
- 1) Pemantauan dan evaluasi
 - 2) Pelaporan
- PU.07.03 4 Pengembangan kawasan strategis
- 1 Program keterpaduan infrastruktur kawasan dan antarkawasan strategis
 - a. Rencana dan program
 - b. Pengembangan area inkubasi di kawasan dan antarkawasan strategis
 - 2 Fasilitasi pengadaan tanah
 - a. Inventarisasi ketersediaan tanah
 - b. Rencana dan program
 - c. Fasilitasi pengadaan tanah dan pencadangan tanah
 - d. Pengadaan tanah area inkubasi
 - e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- PU.07.04 5 Pengembangan kawasan perkotaan
- 1 Pengembangan infrastruktur kawasan metropolitan
 - a. Rencana dan program

- b. Pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan
- 2 Pengembangan infrastruktur kota besar dan kota baru
 - a. Rencana dan program
 - b. Pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru
- 3 Pengembangan infrastruktur kota kecil dan perdesaan
 - a. Rencana dan program
 - b. Pengembangan area inkubasi di kota kecil dan perdesaan

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

| SURAT INI TELAH DITELITI DENGAN BAIK DAN CERMAT OLEH | |
|--|---|
| KABID Pengolahan Arsip TGL : 5 Maret 2020 | KADIS DKP Kota Jambi TGL : 5 Maret 2020 |
| <u>DESY PURLINAWATI, SH</u> NIP. 19681207 199412 2 003 | <u>ARZI EFENDI, SH</u> NIP. 19680425 199903 1 001 |